

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang aktif berperan dalam berbagai kerja sama internasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional yang unik dan memiliki sejarah yang panjang terkait keterlibatan Indonesia adalah Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang awalnya dikenal dengan Kerja Sama Teknik Negara Berkembang. Dilatarbelakangi oleh semangat Konferensi Asia Afrika 1955, khususnya semangat dekolonialisasi saat itu, KSS hadir sebagai manifestasi solidaritas di antara negara-negara berkembang dalam bentuk kerja sama ekonomi dan teknik. Bentuk kerja sama tersebut adalah salah satu upaya peningkatan kemakmuran ekonomi di negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang baru merdeka dan menghadapi masalah kemiskinan pasca-Perang Dunia II.

KSS sesungguhnya hadir sebagai pelengkap dari kerja sama pembangunan yang selama ini didominasi negara-negara Utara melalui bantuan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Sebagai bentuk kerja sama yang baru di antara negara-negara berkembang, KSS memiliki prinsip yang berbeda dengan kerja sama pembangunan yang selama ini berjalan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain *solidarity*, *demand driven*, *non-conditionality*, *equality*, *mutual-trust* dan *benefit*. Bentuk-bentuk program yang dilakukan sifatnya berbasis kepada berbagi pengalaman (*sharing knowledge*) seperti pertukaran keahlian teknologi (*exchanging technological know-how*). Dalam perkembangannya, konsep KSS ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1978 melalui *Buenos Aires Plan of Action (BAPA) on Technical Cooperation among Developing Countries*.

Peran strategis Indonesia dalam KSS ditunjukkan melalui keterlibatan Indonesia di berbagai forum yang relevan dengan upaya penguatan KSS telah diawali pada tahun 1960an melalui keterlibatan di G-77, GATT, G-15, dan D-8. Kemudian di era 2000-an, Indonesia menunjukkan peran aktif melalui *Bogota High Level Event on South-South Cooperation and Capacity Development* (Bogota HLE) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010 dan *Task Team on South-South Cooperation (TT-SSC)*, di mana Indonesia duduk sebagai satu dari 15 anggota *Steering Committee*, serta berbagai keterlibatan Indonesia di berbagai forum multilateral lainnya seperti PBB, ESCAP dan IsDB. Momentum lain yang juga menjadi landasan kuat keterlibatan Indonesia dalam KSS adalah penandatanganan "*Jakarta Commitment*" pada tahun 2009 yang menekankan pada upaya efektivitas bantuan dan prinsip kesetaraan dalam kerja sama dengan menekankan pada konsep kemitraan.

Tak hanya itu, secara spesifik program KSS juga telah tertuang dalam RPJMN tahun 2010–2014. Selanjutnya, pada RPJMN 2014–2019, KSS telah menjadi salah satu alat pencapaian diplomasi ekonomi Indonesia yang kemudian pada saat bersamaan mulai dibicarakan wacana pembentukan *single agency* untuk pengelolaan bantuan Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merespon dinamika politik internasional dan mengambil peran penting dalam dinamika global. Lebih jauh, hingga tahun 2017, Indonesia telah tercatat memberikan beragam program bantuan dalam bidang kesehatan, pertanian, dan program bantuan lainnya yang tersebar di berbagai kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan Pasifik. Serangkaian keterlibatan Indonesia dalam berbagai program KSS, dinamika kebijakan yang melandasi dan capaian KSS Indonesia, serta arah KSS Indonesia ke depan akan menjadi fokus penulisan dari buku ini.

Buku ini menekankan pada pendekatan historis, melalui pembahasan tentang KAA sebagai spirit dari KSS dan keberlanjutan ide KSS serta peran Indonesia. Selanjutnya, buku ini menjelaskan perkembangan KSS di Indonesia baik secara kelembagaan maupun kebijakan. Hal ini penting untuk menunjukkan respon Indonesia terhadap dinamika domestik dan global. Tak kalah penting, buku ini juga memaparkan distribusi program dan capaian KSS Indonesia. Bagian ini untuk menunjukkan kiprah Indonesia dalam perkembangan KSS. Selanjutnya, buku ini akan membahas tantangan yang dihadapi KSS Indonesia baik secara domestik maupun global dan kemudian ditutup dengan pembahasan mengenai arah dan masa depan KSS Indonesia.

BAB 1

KONFERENSI ASIA AFRIKA 1955: SEMANGAT KERJA SAMA SELATAN–SELATAN

Konferensi Asia Afrika tahun (KAA) 1955 diakui menjadi salah satu tonggak sejarah dalam menelusuri kemunculan Kerja Sama Selatan–Selatan (KSS). Konferensi ini menjadi titik awal kesadaran akan pentingnya menggalang kerja sama di antara negara–negara Selatan untuk bangkit dari situasi ekonomi yang buruk pascakolonialisasi dan mendorong kemerdekaan bangsa–bangsa yang masih terjajah saat itu. Semangat dekolonialisasi sangat mewarnai langkah negara–negara Selatan. Dalam upaya menelusuri lebih dalam sejarah kemunculan KSS, bab ini secara spesifik akan mengawali pembahasan mengenai situasi dunia pasca–Perang Dunia Kedua dan kaitannya dengan kebangkitan solidaritas Selatan. Kemudian, pembahasan akan lebih difokuskan pada inisiasi KAA dan pelaksanaannya, yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang tindak lanjut dari pelaksanaan KAA yang difokuskan pada respon global dan peran Indonesia.

1.1. Dunia Pasca Perang Dunia Kedua dan Kebangkitan Solidaritas Selatan

Berakhirnya Perang Dunia Kedua tidak lantas secara otomatis menghentikan ketegangan di dunia. Perang Dingin menjadi bentuk ketegangan baru yang nyata terjadi di masa itu antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan blok timur oleh Uni Soviet.¹ Ketegangan juga hadir di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Barat. Perjanjian damai antara Jerman Barat dengan sekutu menjadikan Jerman terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat di pihak AS, Inggris, dan Prancis sedangkan Jerman Timur berada di pihak Uni Soviet. Di samping itu, ketegangan juga hadir di kawasan Asia Timur. Perang Korea (1950–1953) berkecamuk, ditandai dengan invasi pasukan Korea Utara ke Korea Selatan.² Sementara itu,

¹ Robert S. McNamara. *Out of Cold: New Thinking for American Foreign Policy in the 21st Century*. London: Bloomsbury, 1989, hlm. 23.

² Stack, Liam. *“Korean War, a ‘Forgotten’ Conflict That Shaped the Modern World”*. diakses dari <https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/korean-war-history.html> pada tanggal 28 Januari 2019.

di kawasan Asia Tenggara, sepanjang 1945 hingga 1954 perang terus berlangsung antara tentara kolonial Prancis dengan tentara Viêt Minh (Perang Indochina)³.

Namun demikian, berakhirnya Perang Dunia Kedua ini juga menjadi momentum kemerdekaan negara-negara jajahan di berbagai penjuru dunia, menandai kehadiran masa dekolonisasi. Isu dekolonisasi kemudian mendorong kemunculan semangat dan gerakan solidaritas di antara negara-negara jajahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara jajahan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Gambaran ini dapat terlihat misalnya dalam permasalahan antara Tunisia dengan kolonial Prancis yang berakhir dengan kemerdekaan Tunisia pada 1956. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, Indonesia berusaha menggalang solidaritas dengan negara-negara Arab dan Asia agar masalah Tunisia dapat dibicarakan di DK-PBB dan selesai dengan cara yang damai.⁴ Perlu dicatat bahwa Indonesia telah menjadi anggota PBB pada tahun 1950.

Tidak hanya ketegangan politik dan keamanan, kondisi selepas Perang Dunia Kedua membawa negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia juga menghadapi situasi sosial ekonomi yang buruk dan ketergantungan mereka pada negara-negara eks kolonialnya. Situasi ini digambarkan sebagai bentuk ketimpangan antara negara-negara dunia ketiga⁵ terhadap negara-negara adidaya. Pada saat bersamaan, berbagai kesepakatan internasional didominasi oleh representasi kepentingan negara-negara industri maju. Sebagai contoh, Konferensi Bretton Woods tahun 1944 menata ulang ekonomi global melalui pembentukan

³ Keadaan Internasional dan Hubungan Indonesia dengan Negeri-Negeri Asing dalam "Bahan Pidato Presiden pada 17 Agustus 1952 tentang Keadaan Internasional dan Hubungan RI dengan negara-negara asing", 31 Juli 1952, Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), No. 467, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Juga Bruno Philip. "*Battle against oblivion: the defeat that ended French colonial rule in Vietnam*" diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2014/jul/01/dien-bien-phu-battle-france-vietnam-indochina-war> pada tanggal 28 Januari 2019.

⁴ *Ibid.*

⁵ Penggunaan istilah "Dunia Ketiga / *Third World*" mengalami transformasi dalam definisi. Istilah ini pertama kali digunakan Alfred Sauvy (ekonom Perancis) dengan nama "*Tiers Monde*" dalam majalah *L'Observateur* tahun 1952 untuk menggambarkan gelombang massa di era Revolusi Perancis. Di masa akhir Perang Dunia Kedua dan awal Perang Dingin, istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan negara-negara lemah dan miskin. Memasuki era dekolonisasi, istilah ini pun bertransformasi. Negara "Dunia Ketiga" ditandai dengan pertumbuhan negara-negara non-blok baik timur ataupun barat. Lihat Holm, Hans-Henrik (1990), "*The End of the Third World?*", *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 1, hlm. 1-7, Tabah, Leon (1991), "Alfred Sauvy: 'Statistician, Economist, Demographer and Iconoclast (1989-1990)'", *Population Studies*, Vol. 45, No. 2, hlm 353-357, Berger, Mark T (1994), "The End of the 'Third World'?", *Third World Quarterly*, Vol. 15, No.2, hlm. 257-275.

institusi global seperti *International Monetary Fund* (IMF), *General Agreement on Tariffs and Trade* (sekarang *World Trade Organization*) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang World Bank) yang dirasakan kurang berpihak terhadap kepentingan negara-negara dunia ketiga.

Kondisi ini mendorong kemunculan gerakan solidaritas negara-negara dunia ketiga yang kemudian mewarnai dinamika politik internasional pasca Perang Dunia Kedua. Salah satu tonggak sejarah yang terpenting adalah inisiasi Indonesia dan beberapa negara di kawasan Selatan seperti India, Pakistan, Myanmar, serta Srilanka dalam menggagas KAA untuk memperkuat solidaritas antara negara-negara dunia ketiga. Hal ini juga sekaligus menunjukkan keinginan negara-negara dunia ketiga untuk memainkan peran di kancah internasional.

1.2. Konferensi Asia Afrika 1955: Penguatan Solidaritas

“Ingat, Ali, ini adalah cita-cita bersama; hampir 30 tahun yang lalu kita dalam pergerakan nasional melawan penjajahan, kita sudah mendengarkan solidaritas Asia-Afrika.”

(Presiden RI Soekarno)⁶

Sebagai tindak lanjut atas gagasan untuk mengadakan pertemuan di antara negara-negara Asia dan Afrika, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di Bogor dan di Kolombo pada tahun 1954. Pertemuan dilakukan untuk mematangkan rencana dan tujuan pelaksanaan KAA. Dalam pertemuan di Bogor, PM Burma (kini Myanmar) U Nu, menyatakan bahwa tujuan diadakannya Konferensi Afro-Asian (Asia Afrika) tidaklah untuk membentuk blok baru, tetapi untuk mengundang perdana menteri dari negara-negara Asia Afrika untuk duduk bersama dan bertukar pandangan untuk dapat memahami satu sama lain.⁷

Lebih jauh, PM Ceylon (kini Srilanka) Jenderal Sir John Lionel Kotelawala menekankan pentingnya negara-negara Kolombo dalam memperkuat asosiasi mereka untuk memainkan

⁶ Merupakan percakapan antara Presiden Soekarno dengan PM Ali Sastroamidjojo pada pertengahan April 1954 di Istana Merdeka. Ini adalah desakan Presiden Soekarno kepada PM Ali Sastroamidjojo agar Indonesia sekalipun tidak boleh mundur dalam gagasan konkretisasi kerja sama Asia-Afrika. Lihat Dr. H. Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection*. Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, Cetakan ke-1, Penerbit Gunung Agung, Tahun 1980.

⁷ *Short Report on the 1st Session of the Conference of the Prime Ministers of the Five Colombo Countries at Bogor* dalam “Laporan Singkat pada sesi I Konferensi Lima Perdana Menteri di Bogor”, 28 Desember 1954, Inventaris Arsip Leonardus Nicodemus Palar (1928–1981), No. 289, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

peran sebagai instrumen perdamaian dan usulan adanya pembentukan tim yang berisi ahli-ahli ekonomi dari negara-negara Kolombo untuk membuat studi bersama terkait masalah ekonomi dan merancang kemungkinan adanya perencanaan perdagangan di antara negara-negara tersebut.⁸

Permasalahan ekonomi di masa dekolonisasi bagi negara-negara Kolombo memang menjadi perhatian utama. Kerja sama ekonomi dan teknik sudah digagas sebelumnya dalam Pertemuan PM di Bogor ketika Konferensi Bogor pada 22 Desember 1954. Dalam dokumen “Catatan Pertemuan di tempat Kediaman Perdana Menteri pada 22 Desember 1954”, dijelaskan bahwa setelah adanya pembicaraan terkait dengan politik dan ekonomi, persoalan kerja sama kebudayaan dan teknik (*Cultural and Technical Cooperation*) juga dibahas.⁹

Secara tegas, dalam pertemuan Konferensi Bogor sebagai pendahuluan dari KAA, disepakati komunike Bersama yang dikenal dengan “*Joint Communique of the Bogor Conference*” pada 29 Desember 1954 yang menerangkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang perlu dicapai. Komunike Bersama tersebut juga menegaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi, diperlukan pendekatan yang efektif melalui ilmu pengetahuan terhadap ketersediaan sumber daya alam. Aspek ilmu pengetahuan tersebut yang dapat dipenuhi negara dengan melakukan kerja sama dalam suplai tenaga teknik dan lainnya.¹⁰

Pada akhirnya para perwakilan negara inisiator menyepakati tujuan pelaksanaan KAA sebagai berikut.¹¹

1. *To promote goodwill and cooperation between nations of Asia and Africa, to explore and advance their mutual as well as common interests and concerns and to establish and further friendliness and neighbourly relations.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Tjatanan Pertemuan di Tempat Kediaman Perdana Menteri dalam “Catatan dari Kementerian Luar Negeri mengenai pertemuan di tempat kediaman Perdana Menteri, tanggal 22 Desember 1954 tentang rencana dan negara-negara yang akan diundang dalam KAA”, 22 Desember 1954. Inventaris Arsip Leonardus Nicodemus Palar (1928-1981), No. 288, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

¹⁰ Tjatanan Pertemuan di Tempat Kediaman Perdana Menteri dalam “Catatan dari Kementerian Luar Negeri mengenai pertemuan di tempat kediaman Perdana Menteri, tanggal 22 Desember 1954 tentang rencana dan negara-negara yang akan diundang dalam KAA”, 22 Desember 1954. Inventaris Arsip Leonardus Nicodemus Palar (1928-1981), No. 288, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

¹¹ Siaran Pemerintah Djam 20.05 tanggal 28 April 1955 dalam “Siaran Pemerintah dari Kementerian Penerangan Terbitan Terbitan No. 166, 167, 172, 174, 177, 180, 183, 189, 190, 195, 198 tanggal 29 April 1955 sampai dengan 18 Mei 1955 mengenai jalannya acara dan hasil KAA”, 28 April 1955, Inventaris Arsip Djamal Marsudi (1947-1979), No.120, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

2. *To consider social, economic and cultural problems and relations of the countries represented*
3. *To consider problems of special interest to Asian and African peoples, e.g problems affecting national sovereignty, of racialism and colonialism.*
4. *To view the position of Asia and Africa and their peoples in the world of today and the contribution they can make to the promotion of world peace and cooperation.*

Dari tujuan KAA seperti yang dirumuskan tersebut, poin utama yang ingin dicapai dari pertemuan KAA adalah memperkuat solidaritas di antara negara-negara dunia ketiga untuk menjawab masalah domestik dan tantangan internasional sekaligus juga sebagai upaya untuk mengukuhkan identitas dan kedaulatan negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka.

“It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. Only a few decades ago it was frequently necessary to travel to other countries and even other continents before the spokesmen of our people could confer.”

Boks 1. Pidato Presiden RI Soekarno dalam Pembukaan KAA 1955

Sumber: Arsip Nasional RI¹²

Dalam Pertemuan Bogor tersebut, pada akhirnya disepakati bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan KAA. Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Kota Bandung sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang diadakan pada tanggal 18–24 April 1955. Kesepakatan pelaksanaan konferensi ini dapat dikatakan menjadi awal tumbuhnya kesadaran negara-negara dunia ketiga untuk melakukan kerja sama internasional. Konferensi ini menghadirkan 29 negara-negara dari Asia dan Afrika (lihat Boks 2).

¹² Pidato Pembukaan KAA Presiden RI Soekarno. Data Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Inventaris Arsip Dr. A. Roeslan Abdul Gani tahun 1950–1976 no. 1806.

Negara Inisiator, ¹³				
				
India	Indonesia	Burma (Kini Myanmar)	Pakistan	Ceylon (Kini Sri Lanka)
Negara Peserta.				
				
Afghanistan	Arab Saudi	Ethiopia	Filipina	Irak
				
Iran	Jepang	Kamboja	Laos	Lebanon
				
Liberia	Libya	Mesir	Nepal	Gold Coast (kini, Ghana)
				
Sudan ¹⁴	Suriah	Thailand	Republik Rakyat Tiongkok	Turki

¹³ Bendera-bendera ini adalah bendera yang digunakan setiap delegasi pada saat berlangsungnya KAA pada 29 April 1955.

¹⁴ Saat mengikuti KAA, Sudan tidak menggunakan bendera resmi yang digunakan sekarang. Bendera yang digunakan Sudan hanya menggunakan tulisan "Sudan" yang dibuatkan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan KAA.



Boks 2. Negara-negara Peserta KAA 1955

Posisi Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi yang monumental tersebut menjadi legitimasi kuat atas peran Indonesia dalam mendukung eksistensi, kesetaraan, dan keadilan bagi negara-negara dunia ketiga. Hal tersebut ditekankan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pembukaan KAA 1955 dengan menyampaikan bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak lagi bangsa yang tidak bersuara di dunia (*voiceless people*) melainkan bangsa yang memiliki tanggung jawab besar kepada dunia dan generasi mendatang.¹⁵



Gambar 1 Dokumentasi Saat Pelaksanaan KAA 1955

Sumber: Dokumentasi Museum KAA Bandung

Di samping itu, berlangsungnya KAA menjadi perhatian baik pers domestik maupun internasional. Harian AS *Chicago Herald Tribune* yang masa itu termasuk salah satu media AS dengan sirkulasi terbesar sudah memberitakan KAA jauh sebelum KAA dimulai. Dalam edisi 26 September 1954 berita mengenai rencana diadakannya KAA dituangkan dalam satu

¹⁵ Siaran Pemerintah Jam 20.05 tanggal 12 Mei 1955 dalam "Siaran Pemerintah dari Kementerian Penerangan Terbitan Terbitan No. 166, 167, 172, 174, 177, 180, 183, 189, 190, 195, 198 tanggal 29 April 1955 sampai dengan 18 Mei 1955 mengenai jalannya acara dan hasil KAA". 12 Mei 1955, Inventaris Arsip Djamil Marsudi (1947-1979), No. 120, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

headline “Asian African Lands Plan to Discuss Peace”. Pers internasional melihat hal positif terkait dengan munculnya kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk bangkit menentukan nasibnya sendiri secara bebas.¹⁶



Gambar 2. Liputan Utama Menjelang KAA 1955

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan Nasional RI

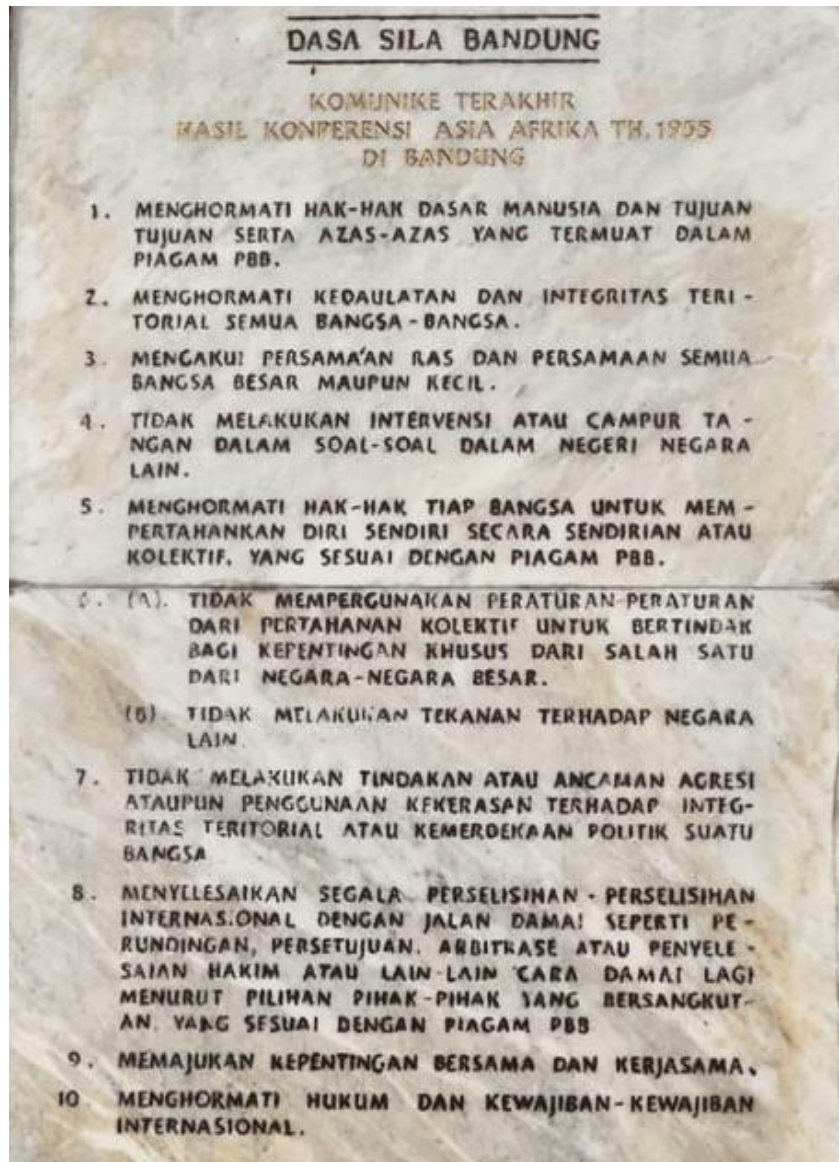


Gambar 3. Liputan Utama Saat Pelaksanaan KAA 1955

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan Nasional RI

¹⁶ Memorandum Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat tentang “Reaksi Pers Amerika Serikat dan Inggris terhadap Konperensi Asia Afrika yang Direncanakan untuk Akhir Bulan April 1955” dalam Inventaris Arsip Kabinet Perdana Menteri (1950-1959), Nomor 2199, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Pada akhirnya, KAA menghasilkan kesepakatan penting yang tertuang dalam Dasasila Bandung. Semangat solidaritas menjadi kekuatan penting yang tertuang dalam 10 poin utama kesepakatan tersebut. Secara tegas pada poin ke-9 disebutkan “Memajukan Kepentingan Bersama dan Kerja sama”, yang menekankan bahwa di dalam semangat solidaritas, negara-negara Asia dan Afrika perlu untuk meningkatkan kerja sama demi kepentingan bersama.



Gambar 4. Dokumen Dasasila Bandung

Sumber: Dokumentasi Museum KAA Bandung

Selain Dasasila Bandung, KAA 1955 juga menghasilkan Komunike Bersama di berbagai bidang. Beberapa butir dalam komunike bersama tersebut memiliki pengaruh cukup penting dalam perkembangan KSS Indonesia. Salah satunya adalah butir-butir yang berkaitan dengan kerja sama yang akan dibangun dalam bidang ekonomi.¹⁷ Dalam Pasal 1 Komunike Bersama, ditegaskan bahwa:

“KAA mengakui mendesaknya keperluan untuk memajukan perkembangan ekonomi di daerah Asia-Afrika. Di antara negara-negara peserta terdapat keinginan umum untuk bekerja sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional masing-masing. Usulan mengenai kerja sama dalam bidang ekonomi di antara negara peserta sendiri tidaklah menutup keinginan atau kebutuhan akan kerja sama dengan negara-negara yang terletak di luar daerah ini, termasuk penanaman modal asing.”¹⁸

Ada dua hal yang ingin ditekankan pada pasal ini, yaitu pentingnya kerja sama antara kawasan Asia-Afrika dan kerja sama dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing (*mutual interest and respect for national sovereignty*). Hal ini yang mendorong kerja sama tidak hanya sebatas di bidang ekonomi tetapi juga di bidang kebudayaan dan politik. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa kerja sama teknik menjadi implementasi dari kerja sama yang akan dibangun antar negara-negara Asia Afrika.¹⁹ Beberapa bidang pertukaran yang berpotensi untuk dibangun di antara negara-negara Asia Afrika, yaitu (1) Pertukaran pengetahuan administrasi dalam rangka pembangunan ekonomi (*Exchange of administrative knowledge in the sphere of economic development*), (2) Pertukaran tenaga ahli dalam bidang kedokteran, pendidikan, dan pertanian (*Exchange of technical expert, these remarks apply with even greater force to technical experts in the spheres of medicine, education and agriculture*), (3) Pertukaran *industrial know-how*, (4) Pertukaran pengetahuan terkait teknik keuangan yang dapat diaplikasikan di dalam *under-developed countries*.²⁰

¹⁷ Siaran Pemerintah jam 20.05 tanggal 12 Mei 1955 “Kerja Sama Ekonomi Asia-Afrika” dalam “Siaran Pemerintah dari Kementerian Penerangan Terbitan Terbitan No. 166, 167, 172, 174, 177, 180, 183, 189, 190, 195, 198 tanggal 29 April 1955 sampai dengan 18 Mei 1955 mengenai jalannya acara dan hasil KAA”. 12 Mei 1955, Inventaris Arsip Djamil Marsudi (1947-1979), No. 120, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ *Working Paper from Government of India on Programmes of Economic Development: Ways and Means of Co-Operation within the Asian-African Region for the Asian-African Conference* dalam “Surat dari Sekretaris Perdana Menteri tentang Penyampaian beberapa dokumen mengenai Konferensi Asia-Afrika di Bandung, April 1955”, Inventaris Arsip Abdul Wahab Soerdjoadiningrat (1946-1973), No. 30, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Spirit kerja sama ini yang ditegaskan kembali oleh PM Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Presiden KAA dalam sesi penutupan. Ali Sastroamidjojo menyampaikan bahwa bangsa-bangsa Asia Afrika melalui keberadaan KAA menunjukkan bahwa mereka bisa bersama-sama berupaya menciptakan perdamaian yang ditujukan untuk kebermanfaatan bangsa-bangsa seluruh dunia.²¹ Spirit tersebut yang juga mengemuka melalui pernyataan berbagai tokoh dunia terkait dengan KAA (lihat Boks 3).

Usaha meningkatkan solidaritas di antara negara-negara kawasan Asia dan Afrika terlihat nyata dari terselenggaranya KAA. Konferensi ini menjadi jalan pembuka bagi terbangunnya solidaritas dalam hal yang lebih konkret di antara negara-negara Selatan. Oleh karena itu, usaha itu tidak terhenti di KAA. Sejumlah pertemuan baik dalam level bilateral maupun multilateral dibangun dan menjadi sarana bagi penguatan solidaritas selatan-selatan.

²¹ Pidato Penutup PM. Mr. Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Presiden Konferensi Asia Afrika dalam "Siaran Pemerintah dari Kementerian Penerangan terbitan No.166, 172, 177, 180, 183, 189, 190, 195, 198 tanggal 29 April 1955 sampai 18 Mei 1955 mengenai jalannya acara dan hasil KAA". Inventaris Arsip Djamil Marsudi (1947-1979), No. 120, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

“Jikalau Banteng Indonesia sudah bekerja bersama-sama dengan Sphinx dari Negeri Mesir, dengan Lembu Nandi dari Negeri India, dengan Liong Barongsai dari Negeri Tiongkok, dengan kampiun-kampiun kemerdekaan dari negeri lain, –jikalau Banteng Indonesia bisa bekerja bersama-sama dengan semua musuh kapitalisme dan internasional –imperialisme di seluruh dunia–, wahai tentu hari-harinya internasional-kapitalisme itu segera terbilang!”

Soekarno, Bandung, Maret 1933

“Bebaskan jiwa Asia dan tuan-tuan akan memperoleh perdamaian, bukan perdamaian dengan paksaan pedang, tetapi perdamaian berdasarkan kemauan baik. Jiwa Asia pada dasarnya adalah jiwa damai!”

Moh. Hatta, Bierville, Perancis, Agustus 1926

“Kerjasama dan *solidariteit* bangsa-bangsa Asia Afrika itu akan besar faedahnya untuk penyelesaian perdamaian dunia... Maka usaha yang penting sekarang ini bagi sekalian anggauta golongan negara-negara Asia Afrika itu ialah likuidasi sisa-sisa kolonialisme itu, baik di daerah Asia Afrika sendiri, maupun di lain-lain daerah di benua-benua lain, di mana mereka menjumpai negara-negara yang karena sejarahnya sendiri juga mempunyai pandangan politik yang sama.”

Soenario Sastrowardoyo, Jakarta, Maret 1954

“.. and Bandung has been the focal centre–perhaps I might ever say the capital of Asia and Africa during this period.”

Jawaharlal Nehru (PM India), Bandung, April 1955

Boks 3. Kutipan Beberapa Tokoh tentang Kebangkitan Solidaritas Selatan

Sumber: Dokumentasi Museum KAA Bandung²²

1.3. Tindak Lanjut dan Peran Indonesia

Menindaklanjuti hasil kesepakatan KAA dan sebagai upaya menunjukkan tindakan kolektif yang solid di antara negara-negara dunia ketiga, dibentuklah GNB pada tahun 1961. Pembentukan GNB ini juga sekaligus sebagai penegasan netralitas negara-negara dunia

²² Roeslan Abdul Gani. *The Bandung Connection: Konperensi Asia–Afrika di Bandung tahun 1955*. Jakarta: Penerbit MKAA – Dirjen Diplomasi Publik Kemenlu RI, 2011

ketiga terhadap situasi Perang Dingin yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Keanggotaan GNB ini tidak lagi terfokus pada negara-negara Asia dan Afrika, namun sudah melibatkan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Eropa Tengah. Hal ini menunjukkan meluasnya solidaritas dan semangat kolektif di antara negara-negara Selatan. GNB mengisyaratkan kehadiran kekuatan baru yang diharapkan dapat membentuk tatanan dunia baru.²³

Pada Konferensi GNB pertama tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang secara tegas menyampaikan pentingnya netralitas negara-negara Selatan. Bagi Presiden Soekarno, GNB lahir berdasarkan keyakinan menjadi sebuah kekuatan baru di dunia (*a growing force in the world*) yang bertujuan menciptakan persahabatan antarnegara untuk perdamaian, keadilan sosial dan kekuatan moral yang terkoordinasi serta kehadirannya bukan bagian dari blok tertentu. GNB merupakan kumpulan negara-negara yang memiliki kebijakan tanpa keberpihakan dan tidak menciptakan blok baru.²⁴

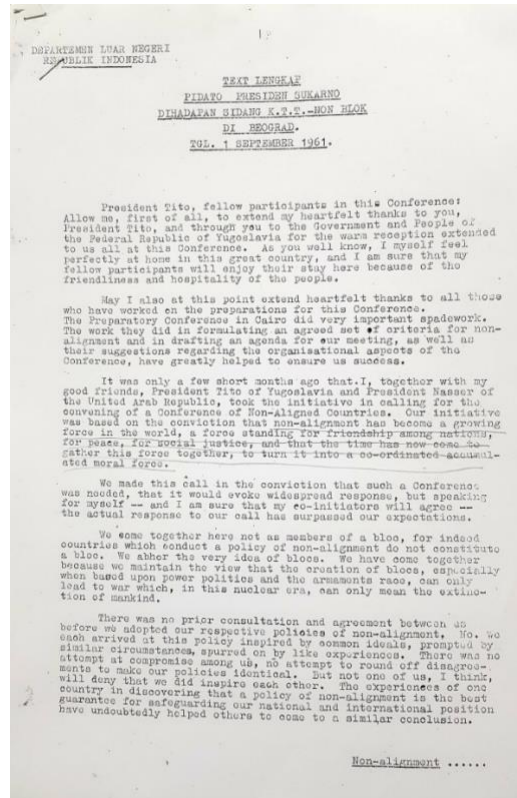


Gambar 5. Suasana Konferensi Beograd 1961²⁵

²³ Pidato Presiden selama Kunjungan Presiden Filipina, Diosda Macapagal di Indonesia, 22–28 Februari 1964, Inventaris Arsip Pidato Presiden Soekarno 1958–1967, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

²⁴ Pidato Presiden di hadapan Sidang KTT Non-Blok di Beograd, 1 September 1961, Pidato Presiden Soekarno (1958–1967), No. 333, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

²⁵ Ivana Ancic. August 17, 2017. "Belgrade, The 1961 Non-Aligned Conference." Global South Studies. A Collective Publication with The Global South. <https://globalsouthstudies.as.virginia.edu/key-moments/belgrade-1961-non-aligned-conference> Diakses pada tanggal 2 Desember 2018.



Gambar 6. Pidato Presiden Soekarno dalam Pembukaan KTT GNB Beograd 1961

Sumber: Arsip ANRI

Setelah GNB, kemudian dibentuk Grup 77 (G-77) pada 15 Juni 1964. Pembentukan G-77 ini didasari oleh *Joint Declaration of Seventy-Seven Countries* yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* di Jenewa, Swiss. G-77 secara konkret menginisiasi upaya peningkatan kapasitas di antara negara-negara Selatan, misalnya *Arusha Programme for Self-Reliance and Framework for Negotiations* tahun 1979. Kegiatan lain juga berkembang pada tahun-tahun berikutnya di bidang pertanian, perdagangan, investasi dan finansial. Tidak hanya itu, pada tahun 1965, Presiden Soekarno menyampaikan pidato terkait gagasan tentang CONEFO yang memperlihatkan semangat anti-kolonialisme dan keinginan untuk membentuk tatanan dunia baru di antara negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.²⁶

Di level regional, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand pada tahun 1967 membentuk organisasi regional yang dikenal dengan *Association for Southeast Asia*

²⁶ Pidato Presiden pada waktu tiba kembali di Tanah Air menghadiri KTT Negara-Negara Non-Blok di Beograd di lapangan terbang Kemayoran Jakarta, 21 September 1961, Pidato Presiden Soekarno (1958-1967), No. 334, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Dan Pidato Presiden pada rapat raksasa dasawarsa KAA di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 19 April 1965, Pidato Presiden Soekarno (1958-1967). No. 735, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Nations (ASEAN) sebagai wujud netralitas dalam situasi Perang Dingin saat itu. ASEAN kemudian secara aktif berperan dalam menghasilkan berbagai kesepakatan dalam mendorong pengembangan KSS, yang berlanjut hingga hari ini. Di kawasan lainnya juga mulai dibentuk kerja sama regional, seperti *Andean Community* di kawasan Amerika Latin pada tahun 1969.

Pemerintah Indonesia pada periode ini secara bilateral berusaha membangun jalinan komunikasi dengan Uni Soviet sebagai salah satu negara adidaya saat itu. Kunjungan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev terselenggara pada tahun 1960. Kunjungan ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan politik luar negeri Indonesia dalam membangun citra negara baru merdeka yang mampu membangun persahabatan dengan negara adidaya.



Gambar 7. Presiden Soekarno bersama Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev dalam Kunjungan Uni Soviet ke Indonesia pada tahun 1960

(Permainan Angklung memiliki filosofi pentingnya harmonisasi nada. Hal ini menggambarkan pentingnya kerja sama antar negara dalam penyelarasan berbagai kepentingan.²⁷)

Sumber: Dokumentasi Saung Mang Udjo

Secara konkret, tindak lanjut dan peran Indonesia dalam konteks solidaritas Selatan pada periode 1960-an diwujudkan melalui penerimaan *agricultural mission* dari Ghana ke Indonesia pada tahun 1965. Delegasi ini memperoleh pelatihan dari perusahaan negara di lingkungan Kementerian Pertanian selama enam bulan. Pelatihan yang dilakukan mencakup pengolahan komoditas karet (3 orang), minyak sawit (3 orang), padi (2 orang), dan tembakau (2 orang).²⁸ Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi pada UNDP untuk komponen

²⁷ Wawancara dengan Pengelola Saung Angklung Mang Udjo pada tanggal 21 September 2018 di Bandung.

²⁸ Menteri Pertanian kepada Menteri Luar Negeri. Surat bulan April 1966 tentang rencana pelatihan untuk *Goodwill Agricultural Mission* dari *Ghana State Farms Corporation* di perusahaan-perusahaan negara di

Expanded Program for Technical Assistance (EPTA) dan *Special Fund*. Indonesia berkomitmen memberikan sebesar USD 285.000. Indonesia juga berkontribusi ke WHO pada tahun 1966 sebesar USD 152.320. Di tahun yang sama, Indonesia juga berkontribusi ke FAO sebesar USD 121.533 dan ke UNICEF sebesar USD 100.000.²⁹

Perjalanan komitmen dan peran aktif Indonesia dalam kerja sama teknis didorong pula oleh dibentuknya *United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC)* pada tahun 1974. UNOSSC didirikan untuk mempromosikan kerja sama teknis antarnegara berkembang dengan tujuan mengintegrasikan kegiatan tersebut secara penuh dalam program yang konkret.³⁰ Hal ini kemudian diperkuat dalam dokumen *Buenos Aires Plan of Action (BAPA)* yang disepakati tanggal 12 September 1978 dalam *United Nations Conference on Technical Cooperation among Developing Countries (UN-TCDC)* yang menyepakati area kerja sama teknis.³¹ Kesepakatan ini kemudian menjadi dasar implementasi kerja sama teknik di antara negara-negara berkembang yang kemudian menjadi cikal bakal KSS.

Periode 1980–2000, peran dan komitmen Indonesia terus menguat dalam mempromosikan kerja sama antarnegara berkembang. Hal ini ditunjang oleh dinamika internasional yang membuka ruang terhadap eksistensi negara-negara Selatan. Beberapa momentum penting dalam penguatan kerja sama tersebut terlihat sangat jelas misalnya pada pertemuan GNB di New Delhi tahun 1983 dan Sidang ke VI UNCTAD di Beograd, Yugoslavia di mana istilah KSS mulai digunakan. Beberapa dokumen yang membahas tentang KSS juga diterbitkan seperti *Beyond the Slogan on South-South Cooperation* (1980); *South-South Cooperation and Economic Order* (1982), *Brandt Commission Report: Common Crisis North-South. Cooperation for World Recovery* (1983), *The Challenges of South-South Cooperation* (1983). Selain itu, pembentukan *South Commission* (1987) dan grup untuk konsultasi dan koordinasi kelompok selatan-selatan (1989) yang kemudian dikenal dengan G-15 di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, menunjukkan eksistensi dan semangat kerja sama antarnegara berkembang. Dua tahun kemudian, dalam *NAM Ministerial Conference ke-10* di Accra, Ghana, *Accra Declaration* mengenai peningkatan kerja sama di antara negara-negara Selatan disetujui (1991). Di era 1990an ini penting juga mencatat peran serta

lingkungan Kementerian Pertanian dalam Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 006/MenPert./66 April 1966, 27 Maret–25 Juli 1966, Arsip Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, No. 568, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

²⁹ Sumbangan Sukarela Indonesia pada UNDP untuk tahun 1967, Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri tahun 1967–1973, No. 1812. Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

³⁰ United Nation for South South Cooperation, “About UNOSSC”, <https://www.unsouthsouth.org/about/about-unossc/> diakses pada tanggal 18 Februari 2019.

³¹ *Ibid.*

Indonesia dalam pencapaian kesepakatan tentang target pembangunan di kawasan Afrika yang merupakan hasil pertemuan *1st Tokyo International Conference on African Development* (TICAD) yang dipelopori oleh Jepang. Keaktifan Indonesia dalam mendorong pengembangan KSS kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu *“pivotal countries”* bagi KSS yang ditetapkan dalam *Meeting on TCDC Pivotal Countries*, Santiago Chile, 1997. Pada era ini, secara domestik program KSS Indonesia juga mendapatkan perhatian serius pemerintah Indonesia melalui serangkaian kebijakan dan implementasi program (dibahas lebih lanjut dalam bab 2).

Selain itu, seiring dengan kesepakatan-kesepakatan internasional dan meluasnya isu-isu pembangunan, peran KSS juga semakin melekat dengan agenda pembangunan internasional seperti MDGs (2000) dan SDGs (2015). Kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain *The First Summit of the South* di Havana pada tahun 2000 yang menyepakati KSS sebagai instrumen pembangunan dan kemandirian ekonomi, *World’s Summit on Sustainable Development* tahun 2002, dan *Paris Declaration* tahun 2005 tentang *aid effectiveness* yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Piagam Jakarta oleh Indonesia pada tahun 2009. Pada tahun 2007 Indonesia bersama Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki menggagas berdirinya organisasi Developing-8 (D8). Peran Indonesia juga semakin aktif seiring dengan terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 pada tahun 2008. Terpilihnya Indonesia dalam forum G-20 tidak lepas dari citra dan peran positif, baik secara politik maupun ekonomi yang telah dibangun Indonesia selama ini di kawasan dan secara global.

Melihat dinamika cikal bakal KSS, dapat disimpulkan bahwa konteks global pasca Perang Dunia Kedua mengarah pada kerja sama yang lebih didominasi oleh semangat solidaritas dalam kaitan dengan pertarungan ideologi isu kesetaraan dan ketimpangan global. Penguatan identitas nasional dan upaya perlawanan terhadap ketidakadilan global menjadi narasi yang mendominasi landasan kerja sama antarnegara berkembang di masa awal. Namun demikian, dinamika internasional dan konstelasi politik yang berubah turut mempengaruhi arah pengembangan KSS termasuk KSS Indonesia, sebagai wadah kerja sama antar negara berkembang. Solidaritas sebagai spirit KSS diimplementasikan dalam bentuk kerja sama ekonomi dan teknis yang konkret, sebagai upaya untuk saling memperkuat dan memberdayakan satu sama lain di antara negara-negara berkembang. Peran dan kontribusi Indonesia dalam pengembangan dan penguatan solidaritas dalam konteks KSS ini menjadi bahasan lebih lanjut buku ini.

BAB 2

KSS INDONESIA: PEMBENTUKAN ORGANISASI, STRATEGI, DAN KERANGKA KEBIJAKAN

Dinamika internasional yang secara aktif mendorong penguatan solidaritas Selatan, direspon oleh Indonesia dengan keaktifannya di berbagai forum baik di tingkat regional maupun multilateral. Indonesia secara aktif menyuarakan pentingnya perhatian dunia internasional ditujukan untuk kesetaraan dan kemakmuran bagi negara-negara Selatan. Tidak hanya itu, respon Indonesia juga ditunjukkan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat peran Indonesia dalam mendukung solidaritas Selatan. Bab ini akan membahas fase awal KSS Indonesia dengan menekankan pada inisiasi-inisiasi kerja sama yang dilakukan. Bagian selanjutnya akan difokuskan pada upaya penguatan KSS Indonesia melalui penguatan kelembagaan dan paparan tentang strategi dan evolusi kebijakan sebagai bukti perhatian Indonesia yang tidak pernah putus terhadap isu pembangunan dan kesetaraan negara-negara Selatan. Peran dan kontribusi Indonesia dalam pengembangan dan penguatan solidaritas dalam konteks KSS ini menjadi bahasan lebih lanjut buku ini.

2.1. Fase Awal KSS Indonesia

Merujuk pada sejarah kehadiran KSS yang telah dibahas pada bab sebelumnya, secara jelas tergambar posisi Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam membangkitkan semangat solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara berkembang baik melalui pendekatan bilateral maupun multilateral. Pendekatan tersebut secara formal dilakukan Indonesia sejak periode awal kemerdekaan melalui penempatan perwakilan diplomatik dan konsuler di berbagai negara.³² Hal ini didasari oleh penandatanganan "*Treaty of Friendship*" antara Indonesia dengan beberapa negara Selatan seperti India, Pakistan, Filipina, dan Burma (1951), Thailand (1954), Afghanistan (1955), Irak (1956), dan Iran (1958).³³

³² Keadaan Internasional dan Hubungan Indonesia dengan Negeri-Negeri Asing dalam "Bahan Pidato Presiden pada 17 Agustus 1952 tentang Keadaan Internasional dan Hubungan RI dengan negara-negara asing", 31 Juli 1952, Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), No. 467, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

³³ *Ibid*; Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Elex Media Nusantara, 2016, hlm. 161.

Sementara itu, pendekatan secara multilateral juga dilakukan Indonesia dengan menjadi anggota PBB pada tahun 1951 yang kemudian fokus terlibat dalam Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (1956-1958). Selanjutnya, meskipun Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965 dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, Indonesia secara aktif memberikan dukungan dan terlibat dalam berbagai kegiatan di PBB. Salah satunya dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia pertama kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (1974-1975), yang kemudian terpilih lagi pada periode 1995-1996, periode 2007-2008, dan yang terbaru adalah periode 2019-2020.

Tidak hanya keterlibatan di PBB, Indonesia di periode awal kemerdekaan juga terlibat dalam berbagai pertemuan internasional termasuk KAA dan GNB seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dasasila Bandung sebagai hasil kesepakatan pertemuan KAA kemudian menjadi pondasi dasar KSS Indonesia. Selain itu, bergabungnya Indonesia dalam GNB, G-77, G-15, dan D-8 juga menjadi pilar yang mengokohkan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama antarnegara berkembang. Dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 dengan Indonesia sebagai salah satu penggagasnya dan keterlibatan aktif Indonesia di dalamnya hingga hari ini serta di berbagai forum kerja sama multilateral lainnya seperti WTO dan G-20 menunjukkan secara nyata keterlibatan aktif Indonesia dalam mendorong penguatan dan perluasan KSS.

Di level domestik, dalam konteks kerja sama pemberian bantuan, Indonesia telah mulai aktif memberikan bantuan luar negeri secara formal melalui keputusan pembentukan Panitia Koordinasi Bantuan Teknik Luar Negeri pada tahun 1967. Pembentukan ini lebih diarahkan untuk mengatur tata cara penerimaan bantuan untuk Indonesia, namun peraturan ini menjadi dasar dan arahan pengelolaan bantuan. Sejak saat itu, Indonesia secara resmi menjadi penerima bantuan dari negara-negara maju. Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menjadi negara pertama yang memberikan bantuan ke Indonesia sejak peraturan tersebut diterbitkan. Bantuan tersebut berupa pinjaman komoditas, pembangunan bendungan multifungsi di Kali Konto, Riam kanan, jaringan *microwave* di bagian timur dan pembangkit listrik termal di Tanjung priok, dan bantuan keluarga berencana.³⁴ Perlu dicatat bahwa pada periode tersebut, forum negara pemberi bantuan untuk Indonesia, *The Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI), juga dibentuk. Pengalaman Indonesia sebagai negara penerima bantuan menjadi salah satu modalitas dalam upaya menginisiasi kerja sama pembangunan antar negara berkembang.

³⁴ JICA, *Indonesia's Development and Japan's Cooperation: Building the Future Based on Trust*, JICA Report, 2018, hlm. 5.

Keinginan Indonesia untuk secara konkret lebih aktif dalam kerja sama teknis antarnegara berkembang kemudian diwujudkan melalui Program Penugasan tenaga ahli Indonesia di bidang pelayaran ke Tanzania sebanyak 10 orang setiap tahun dari tahun 1977-1980. Program ini untuk membantu Tanzania dalam mengoperasikan kapal feri di Teluk Tanzania.³⁵

Sebagai bagian usaha memformalkan keterlibatan Indonesia dalam KTNB, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 60/M/1981 membentuk Panitia Koordinasi Kerja sama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) yang diketuai oleh Sekretariat Kabinet. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk *Indonesia Technical Cooperation Programme* (ITCP). Pemerintah Indonesia juga meminta kepada setiap kementerian yang telah memiliki legalitas menjalankan kerja sama teknik untuk menyiapkan Program KTNB dengan negara berkembang lain. Respon pemerintah ini merupakan respon atas dokumen BAPA yang disepakati tahun 1978 yang menyepakati langkah yang harus diambil oleh negara di level nasional untuk menginisiasi KTNB.³⁶ Program KTNB Indonesia saat itu dilakukan melalui keterlibatan pendanaan dari negara/institusi internasional seperti JICA dan UNDP.

Dalam perkembangannya, pengelolaan Program KTNB Indonesia dilakukan di bawah arahan Dewan Pengarah, dikenal dengan istilah “Kaki Empat”, yang terdiri dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pelaksana program tersebut adalah Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri (KTLN) di bawah Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, untuk merespon permintaan dan dukungan yang semakin meningkat terhadap Program KTNB Indonesia, pada tahap berikutnya dibentuk secara khusus Bagian KTNB di bawah koordinasi Biro KTLN, Sekretariat Kabinet.

Salah satu program yang dijalankan Indonesia di periode ini yaitu *The Apprenticeship Project on Rice Culture and Transfer Technology on Rice Cultivation* di Gambia dan Tanzania (1985) yang diikuti dengan didirikannya pusat pelatihan di Tanzania (1996) dan Gambia (1998).³⁷ Program tersebut didukung oleh Yayasan Amal Masyarakat Petani Indonesia (YAMPI) dengan Kementerian Pertanian bersama FAO. Program ini ditujukan sebagai upaya dalam menjawab tantangan pembangunan di masa itu. Program ini menjadi program yang sukses karena produksi beras para petani di Tanzania dan Gambia kemudian meningkat dan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Suprpto (Mantan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara RI), pada tanggal 11 Desember 2018 di Jakarta.

³⁶ Lihat Dokumen BAPA, hlm. 10-11. Diakses dari <https://www.unsouthsouth.org/bapa40/documents/buenos-aires-plan-of-action/> pada tanggal 18 Februari 2019.

³⁷ NCT-SSTC, *Annual Report of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) 2014*, (Jakarta: NCT-SSTC), 2014.

pemanfaatan pusat pelatihan berperan secara efektif dalam meningkatkan keterampilan petani. Program tersebut tidak lepas dari keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 1984. Atas keberhasilan program ini, pada tahun 1985 Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO. Program Indonesia di negara-negara Afrika ini menunjukkan bahwa semangat berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) atas dasar pengalaman (*best practices*) termanifestasi secara nyata dalam pendirian pusat pelatihan di kedua negara tersebut.



Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFRC) di Gambia yang didukung oleh Yayasan Amal Masyarakat Petani Indonesia (YAMPI), Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan FAO

Sumber foto: Dokumentasi Kementerian Pertanian Republik Gambia
(<http://www.moa.gov.gm/node/149>)

Pada tahun 1966, Pemerintah Indonesia mencanangkan program BIMAS (Bimbingan Massal) di bidang pertanian untuk memandu petani-petani Indonesia mengembangkan praktik pertanian dan mengorganisasi bisnis pertanian yang lebih produktif. Melalui partisipasi aktif dari para petani dalam program BIMAS, Indonesia akhirnya mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang pertama kalinya sejak merdeka. Sebagai bentuk ungkapan syukur, para petani Indonesia memutuskan untuk berbagi hasil produksinya, dalam bentuk 100.150 ton beras, dengan petani-petani Afrika yang kerap mengalami kekeringan dan kekurangan pangan. Donasi ini juga disalurkan secara tunai melalui FAO, dan sejak 1990, dana yang tersisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan teknis kepada petani Afrika. Pada Desember 1993, Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI) dibentuk untuk mengelola sisa dana tersebut. Indonesia lantas membangun dua pusat pelatihan di dua negara yaitu *Farmers Agriculture Rural Training Centre* /FARTC di Mkindo, Tanzania tahun 1996, dan *Agricultural Rural Farmer Training Center* (ARFRC) di Jenoi, Gambia pada tahun 1998. Kerja sama antara Indonesia dan kedua negara di bidang pertanian hingga kini berjalan dengan baik.

Boks 4. KSS Indonesia di Bidang Pertanian: Pusat Pelatihan Pertanian di Tanzania dan Gambia

Sumber: ANRI dan Kementerian Luar Negeri RI³⁸

³⁸ "Serahkan Surat Kepercayaan, Dubes RI Dakar: Presiden Gambia Minta RI Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Pertanian" diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/credentials-dubes-ri-dakar-pada-presiden-gambia.aspx> Pada tanggal 15 Januari 2019; "Petani Tanzania Harus Belajar dari Indonesia" diakses dari <https://www.kemlu.go.id/daressalaam/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Petani-Tanzania-Harus-Belajar-dari-Indonesia.aspx> pada tanggal 15 Januari 2019. lihat

Tidak hanya itu, pada periode 1980-an ini Indonesia juga banyak memberikan pelatihan tentang teknik Sabo. Pada tahun 1988, pelatihan internasional tentang teknik sabo (*The 1st International Training Course on Sabo Engineering*) pertama kali diadakan di Sabo Training Centre, Yogyakarta. Kegiatan ini terus berlanjut hingga pelatihan ke-11 pada tahun 1999 dengan jumlah peserta berkisar 10-20 orang per kegiatan yang berasal dari berbagai negara.³⁹ Di periode ini tepatnya pada tahun 1989, tercatat Indonesia melaksanakan dua kegiatan di bidang kependudukan dengan lembaga pelaksana adalah BKKBN. Kegiatan pertama adalah seminar kependudukan (*20th Seminar on Population and Family Planning*) dengan jumlah peserta 42 orang dari beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Nepal dan Bangladesh. Kemudian disusul oleh kegiatan kedua yang mencakup pelatihan tentang kependudukan (*Integrated Family Planning Service*) dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang yang berasal dari berbagai negara yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Mesir, Eithopia, Papua Nugini dan Samoa Barat. Implementasi program ini didorong oleh penghargaan yang diterima Indonesia pada tahun 1989 dalam bidang kependudukan (*UNFPA Population Award*) atas keberhasilan Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun-tahun berikutnya, BKKBN secara intensif membuat berbagai kegiatan seperti magang (*internship*) yang banyak diikuti peserta dari negara-negara di kawasan Afrika dan berbagai bantuan teknis lainnya.⁴⁰ Sama dengan program pertanian di Tanzania dan Gambia, program ini merupakan salah satu bentuk nyata mengenai saling berbagi dan bertukar pengalaman (*share and exchange*) Indonesia dalam bidang kependudukan.

Lebih jauh, pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia bersama Yayasan Dian Desa, sebuah kelompok masyarakat sipil yang berfungsi sebagai badan pelaksana program (*implementing agency*), memberikan bantuan teknis dalam Program *Rural Development* di Kamboja. Program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang didukung oleh JICA dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari Indonesia (bidang kesehatan dan pertanian), Filipina, dan Thailand. Program ini merupakan komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional mengenai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kamboja tahun 1992. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan BAPA butir 21 tentang penguatan sistem informasi untuk pelaksanaan KTNB, Indonesia mengembangkan TCDC INRES (*Information Referral*

juga Martaamidjaja, A. S. dan H. Anwarhan, "South-South Cooperation: Indonesian Apprenticeship Program for African Rice Farmers," dalam Cheryl L. Baisden (ed.), *South Jersey Farming*, Charleston: Arcadia Publishing, 2006, hlm. 269-270.

³⁹ Lihat Lampiran data kegiatan tahun 1989-1997.

⁴⁰ *Ibid.*

System) dan membuat situs web tentang KTNB serta *data base* tenaga ahli atau konsultan, yang mulai beroperasi pada tahun 1997.

Komitmen Indonesia untuk mendukung penguatan kerja sama antar negara berkembang juga ditunjukkan dengan posisi Indonesia sebagai ketua dalam KTT X GNB tahun 1992. KTT ini kemudian menghasilkan “Pesan Jakarta” yang berisi tentang sorotan terhadap masalah global dan penguatan KSS dengan bertumpu pada prinsip pemenuhan kebutuhan secara mandiri (*collective self reliance*). Komitmen Indonesia semakin nyata terlihat ketika Indonesia mengusulkan pendirian sebuah pusat GNB pada konferensi XI GNB di Kolombia.

“NAM CSSTC merupakan elemen penting dalam kerja sama internasional dalam pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan dengan prinsip ‘*sustainable development*’. NAM juga memegang prinsip-prinsip yang diakui internasional. NAM Center bukan menyempurnakan kerja sama yang ada, seperti Utara-Selatan, tetapi melengkapi yang sudah ada”

Inisiatif ini kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan *Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation* (NAM-CSSTC) di Jakarta, yang pendanaan pembangunannya dibantu oleh Brunei Darussalam. NAM-CSSTC kemudian diresmikan pada tahun 1998 (lihat Boks 5).

Boks 5. Kutipan Wawancara dengan Duta Besar Ronny P. Yuliantoro,

Direktur NAM CSSTC & Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri (menjabat sejak Juli 2017)⁴¹

NAM CSSTC mulai melaksanakan berbagai kegiatan sejak tahun 2000. Kegiatan ini diawali dengan penguatan kelembagaan melalui program “*Manual Preparation on Development of the Information Network and Database for NAM CSSTC*” yang diadakan di Jakarta. Kemudian di tahun 2001, diadakan program pertemuan ahli “*Expert Group Meeting on the Establishment of NAM CSSTC Networking System*” dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang berasal dari Brunei Darussalam, Ghana, Guatemala, Indonesia, Iran, Jordania, Malaysia, Namibia, Sri Lanka, Syiria, Thailand, Uzbekistan, dan Venezuela serta kehadiran JICA selaku mitra pembangunan. Kegiatan pertemuan ahli di berbagai isu seperti pemberantasan kemiskinan, usaha kecil dan menengah, dan isu lainnya, terus berlangsung hingga tahun 2003. Setelah itu, kegiatan NAM CSSTC lebih banyak difokuskan pada kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas negara-negara selatan dengan fokus isu yang beragam.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Duta Besar Ronny P. Yuliantoro (Direktur NAM CSSTC dan Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri pada 5 November 2019 di Jakarta.

⁴² NAM CSSTC, *Brief Report of Programme Activities* (2001–2016) Lihat juga lampiran data tahun 1997–2017.



Gedung NAM CSSTC, Kemayoran, Jakarta (http://www.csstc.org/v_ket1.asp?info=26&mn=2)

Visi: Memperkuat kapasitas nasional dan kemandirian kolektif dari negara berkembang

Misi. NAM CSSTC: Memberikan kontribusi pada percepatan dan kemajuan pembangunan nasional dengan memperkuat serta memperluas Kerja Sama Selatan-Selatan dan tripartit dalam konteks kerja sama pembangunan internasional.

NAM CSSTC didirikan pada tahun 1995, atas inisiatif Pemerintah Indonesia dalam Konferensi ke-11 di Cartagena, Kolombia. Melalui pendirian NAM CSSTC ini, pembangunan negara berkembang khususnya anggota GNB dapat terfasilitasi. NAM CSSTC terletak di Gedung NAM Centre, Kemayoran, Jakarta yang diresmikan oleh Presiden Soeharto dan Sultan Hassanal Bolkiah pada tanggal 25 Februari 1998. Peresmian beroperasinya NAM CSSTC dilakukan pada tanggal 9 September 1998 oleh Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas. Sejak 2008, Indonesia menjadi kontributor tunggal untuk pengelolaan operasional NAM CSSTC.

NAM CSSTC mulai menjalankan program pada tahun 2001. Sejak itu, NAM CSSTC telah melaksanakan program KSS yang meliputi beberapa topik berikut: 1) pengentasan kemiskinan; 2) pembangunan sosial dan ekonomi; 3) demokrasi dan pemilu; 4) tata kelola pemerintahan yang baik; 5) kesehatan masyarakat; 6) teknologi informasi dan komunikasi; 7) energi terbarukan; dan 8) pertanian yang berkelanjutan. Selama 2001-2018, NAM CSSTC telah melaksanakan 101 program KSS.

Boks 6. Sekilas mengenai NAM CSSTC

Sumber: Dokumentasi NAM CSSTC⁴³; Brosur Profil NAM CSSTC

Dari paparan data yang ada, dapat dikatakan bahwa selama dua dekade (1980-2000an), KTNB Indonesia telah berbagi pengalaman dan bertukar pengalaman (*exchange dan sharing of experiences*) dengan sebagian besar negara di kawasan Asia dan Afrika dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang lain dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Berbagai capaian Indonesia yang ditunjukkan melalui penghargaan

⁴³ "NAM CSSTC Historical Background" diakses dari

<http://www.csstc.org/AboutNAMCS/NAM%20CSSTC%20Historical%20Background.pdf> pada tanggal 18 Januari 2019

yang diterima di bidang pertanian dan bidang kependudukan membuktikan bahwa Indonesia memiliki modalitas terutama dalam aspek pengalaman. Hal ini sekaligus menjadikan program di bidang-bidang tersebut sebagai program unggulan Indonesia. Program KTNB Indonesia tercatat terus berkembang dengan variasi aktor dan program yang dijalankan (akan dibahas lebih detail dalam bab 3).

Merespon semakin intensifnya program yang dilakukan oleh Indonesia dan keinginan untuk semakin memperluas jangkauan kegiatan KSS Indonesia, maka Pemerintah Indonesia pada tahun 2006 membentuk direktorat baru di Kementerian Luar Negeri, yaitu Direktorat Kerja Sama Teknik (KST). Direktorat KST ini berfungsi untuk meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan dengan negara-negara berkembang. Tak hanya itu, tahun 2010 pemerintah juga mengambil langkah terobosan dengan membentuk Tim Kornas yang bertujuan agar KSS Indonesia bisa bersinergi antarpemangku kepentingan (K/L, swasta, akademisi dan kelompok masyarakat sipil) sehingga pencapaiannya diharapkan dapat lebih maksimal.

2.2. Penguatan KSS Indonesia

Perkembangan KSS Indonesia di fase awal yang melalui serangkaian proses yang dinamis, tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif. Prinsip ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan secara aktif di forum-forum internasional. Peran Indonesia di KAA tahun 1955, kemudian keterlibatan Indonesia di GNB, serta di badan-badan PBB seperti UNCTAD dan UNOSSC merupakan beberapa contoh peran aktif Indonesia yang turut mendukung capaian dalam fase awal KSS Indonesia. Tahun 1985, misalnya, Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO yang dinilai berhasil menangani persoalan pangan dan kemiskinan dengan program utama yang diarahkan ke negara-negara di Afrika, khususnya Tanzania dan Gambia. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan penghargaan UNPA pada tahun 1986 atas keberhasilannya dalam menangani masalah kependudukan. Keberhasilan tersebut memberi dampak signifikan atas dipilihnya Indonesia sebagai salah satu *pivotal countries* pada tahun 1997. Pengalaman Indonesia dalam menjalankan program KTNB menjadi modalitas dalam upaya penguatan KSS Indonesia ke depannya.

Ada dua hal penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mendorong penguatan KSS Indonesia, yaitu penguatan kelembagaan dan perumusan strategi kebijakan. Kedua hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam kesepakatan BAPA 1978, yang menyebutkan pentingnya

penguatan institusi nasional yang menjalankan kerja sama teknis.⁴⁴ Selain itu, dalam merespon dinamika yang berkembang dalam tatanan internasional dan berbagai tantangan global, Indonesia memerlukan kelembagaan, strategi, dan kebijakan yang terarah untuk mendukung KSS Indonesia.

2.2.1. Penguatan Kelembagaan KSS Indonesia

Keseriusan dan konsistensi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan KSS ditandai dengan masuknya KSS dalam RPJMN 2010–2014. Kebijakan ini sekaligus juga menunjukkan signifikansi KSS bagi Indonesia yang tidak semata ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas di antara negara–negara berkembang dalam menjawab tantangan global, namun juga untuk mendukung upaya diplomasi Indonesia baik di level bilateral maupun dalam forum regional dan internasional. Hal ini sejalan dengan visi kebijakan luar negeri Indonesia saat itu yang dilaksanakan di bawah slogan “*million friends, zero enemies*”. Slogan ini menekankan pentingnya meningkatkan hubungan baik dengan negara–negara berkembang dan negara–negara maju sebagai strategi mengoptimalkan program KSS. Pada masa ini pula kebijakan KSS diarahkan pada pelibatan pihak ketiga, dalam hal ini negara maju, melalui skema *triangular cooperation* atau lebih dikenal dengan KSST. KSST melibatkan dua atau lebih negara berkembang yang bekerja sama dengan pihak ketiga—yaitu lembaga atau pemerintah negara maju—dalam memberikan kontribusi sumber daya dan pengetahuan. KSST memiliki peran penting dalam kerja sama pembangunan internasional dan menjadi komplemen skema kerja sama Utara–Selatan yang kemudian menjadi cikal bakal KSS.

Pada periode 2010 ini, penguatan KSS juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan dengan pembentukan Tim Kornas, yang kemudian dilengkapi rumusan–rumusan strategi kebijakan dalam dokumen–dokumen formal perencanaan. Formalitas kelembagaan pertama kali dibuat melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No 67 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kerja Sama Selatan–Selatan yang diperbarui dengan Kepmen PPN No. 101 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.67/M.PPN/HK/05/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kerja Sama Selatan–Selatan. Pada tahun 2013, keberadaan Tim Kornas diperkuat lagi dengan penetapan Kepmen PPN No. 51 Tahun 2013

⁴⁴ Lihat Dokumen BAPA 1978, hlm. 12. Diakses dari

<https://www.unsouthsouth.org/bapa40/documents/buenos-aires-plan-of-action/> pada tanggal 18 Februari 2019.

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; dan dengan Kepmen PPN No. 89 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. Tim ini kemudian bertugas menformulasikan draf rencana induk, draf cetak biru penyusunan 17 prosedur operasi standar di berbagai bidang kerja, perumusan program unggulan (*flagship programmes*), dan pedoman pelaksanaan serta *master plan* keterlibatan Indonesia dalam KSS periode 2011-2025. Restrukturisasi kelembagaan Tim Kornas yang menekankan pada aspek diplomasi antarnegara terlihat melalui penugasan Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri No. 83/B/KPP/I/2017/I.

Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program KSS, penting untuk mengupayakan pembentukan satu lembaga khusus yang mengelola berbagai bantuan Indonesia (*single agency*) dan kebijakan yang terintegrasi (*one gate policy*). suatu kelembagaan yang efektif diharapkan dapat berfungsi untuk mempromosikan kapabilitas dan inovasi-inovasi yang telah dimiliki oleh Indonesia yang dapat diterapkan di negara-negara Selatan lainnya dengan slogan "*better partnership for prosperity*."

" We are planning to strengthen National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation by establishing a one gate policy. Our goal is to have a single agency for Indonesia's South-South and Triangular Cooperation with a vision of "Better

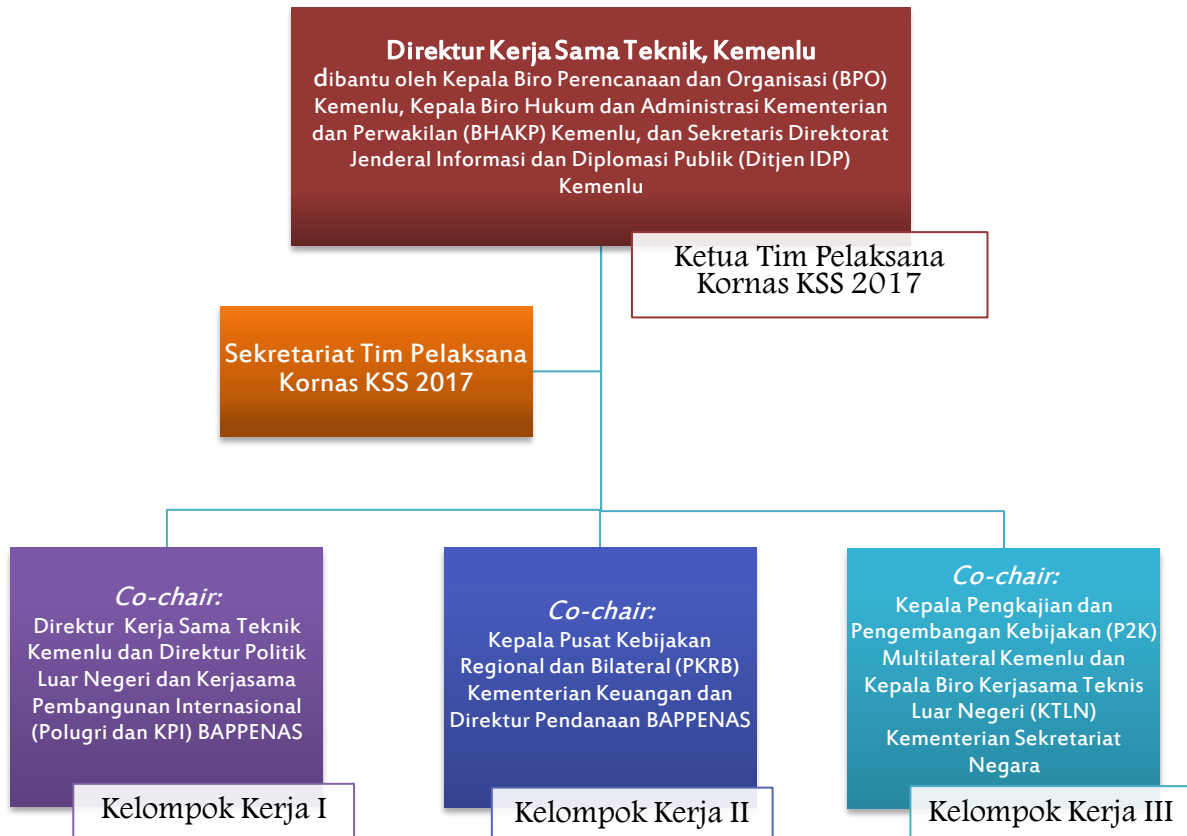
Boks 7. Pidato Pembukaan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi Suparlan dalam *Exhibition of Indonesia's South-South Cooperation* pada *The 60th Commemoration of the Asian-African Conference* di Jakarta, tanggal 19 April 2015.



Gambar 8. Tahap Penguatan Kelembagaan KSS Indonesia 2010–2018

Untuk itu, Tim Kornas KSS Indonesia disusun dalam tiga kelompok kerja yang dibuat sedemikian rupa untuk efisiensi dan efektivitas program. Tim Kornas juga telah mengidentifikasi peran penting lembaga tersebut melalui sebuah kajian akademis,⁴⁵ antara lain: 1) mengarahkan seluruh kegiatan KSS dalam kerangka kebijakan satu pintu (*one gate policy*) supaya sesuai dengan kepentingan nasional dan sekaligus untuk merespon perkembangan regional dan global, 2) membantu mencari dukungan bagi diplomasi dan kepemimpinan Indonesia di fora internasional, 3) membantu mengatasi isu ketimpangan sosial ekonomi dan keamanan regional yang dapat menghambat perwujudan komunitas ASEAN dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional, dan 4) meningkatkan kontribusi Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti diamanatkan oleh UUD 1945 melalui pemenuhan komitmen Indonesia pada forum-forum global seperti PBB, G20, G77 dan GNB.

⁴⁵ Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (2017). Kajian Akademik Pembentukan *Single Agency* Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia.

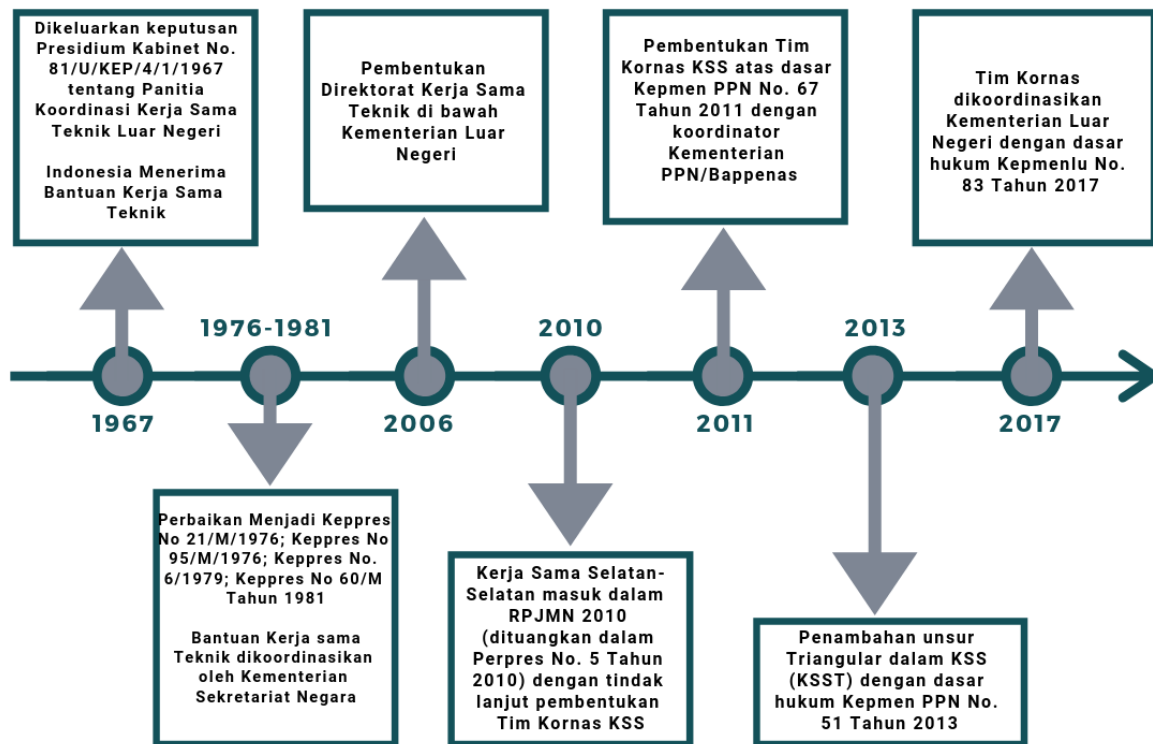


Gambar 9. Struktur Tim Kornas KSS Indonesia

Proses penguatan yang terjadi pada tahap ini tidak lepas dari dinamika internasional. Pada periode ini, beberapa perjanjian internasional untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung KSS ditandatangani, seperti Deklarasi Paris 2005; *Accra Agenda for Action* 2008; *Doha Conference: Review on Financing for Development* 2008; dan Konferensi PBB mengenai Kerja sama Selatan-Selatan di Nairobi, Kenya, tahun 2009 yang menghasilkan *Nairobi Outcome Document*. Bahkan, Indonesia pada tahun yang sama kemudian menandatangani Piagam Jakarta dengan 22 lembaga donor. Pada saat bersamaan tuntutan terhadap peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional dengan meningkatnya posisi Indonesia sebagai *middle income country* dan dalam upaya menjadi *middle power* pemerintah Indonesia menempatkan KSS sebagai sebuah kerja sama yang strategis. Pada akhirnya, diharapkan Tim Kornas menjadi entitas yang kuat untuk menangani KSS sehingga pelaksanaan program lintas sektor dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan terpadu.

2.2.2. Strategi dan Kerangka Kebijakan

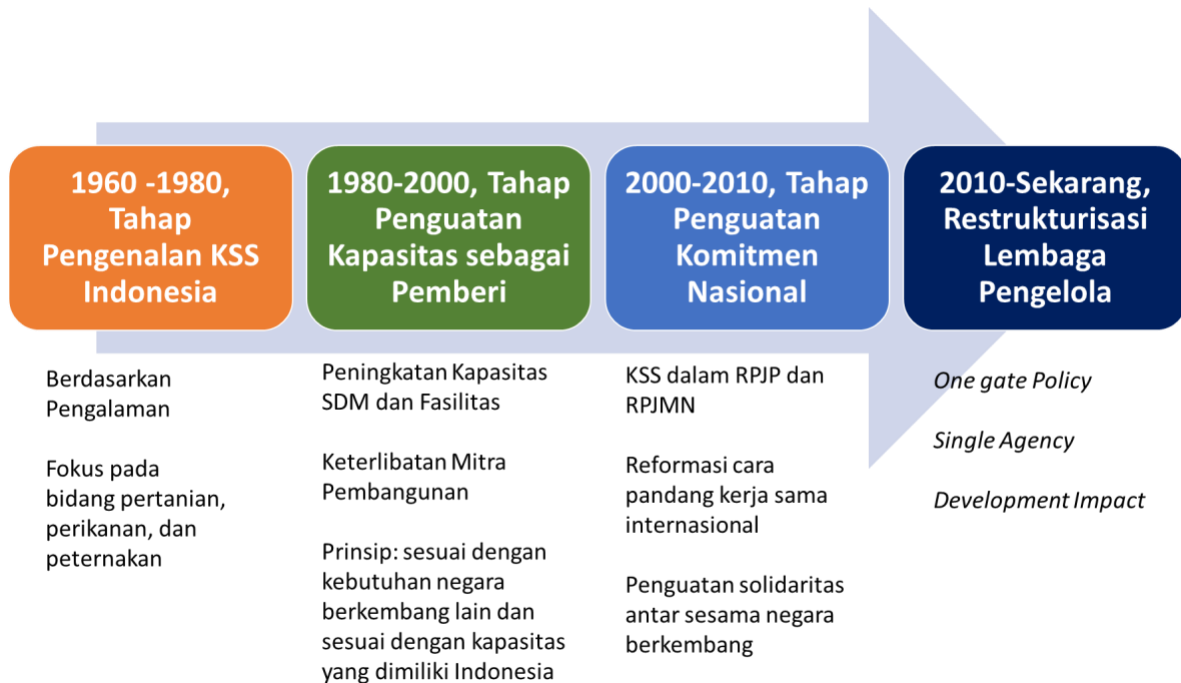
Untuk merespon dinamika yang berkembang dalam tatanan internasional dan berbagai tantangan global, Indonesia memerlukan kelembagaan, strategi dan kebijakan untuk mendukung KSS Indonesia. Dinamika strategi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk kebijakan dapat dilihat dari evolusi kebijakan yang difokuskan pada perubahan kelembagaan yang mengelola program KSS Indonesia.



Gambar 10. Evolusi Kebijakan KSS Indonesia

Perubahan kelembagaan pengelola program KSS Indonesia tersebut juga mencerminkan bentuk strategi implementasi kebijakan KSS Indonesia, dari mulai pengenalan beberapa program di tahun 1960-an sampai kemudian secara resmi memasukkan program KSS Indonesia sebagai bagian dari dokumen perencanaan nasional dan menuju ke pembentukan *single agency*. Perubahan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: perubahan kepemimpinan nasional dan politik dalam negeri yang mendorong perubahan prioritas kebijakan serta kecenderungan global yang berpengaruh secara signifikan dalam intensitas keterlibatan Indonesia dalam KSS.

Dari berbagai evolusi kebijakan tersebut, buku ini merangkum strategi kebijakan KSS Indonesia dalam empat periode, yaitu periode 1960–1980 (tahap Pengenalan KSS), periode 1980–2000 (tahap penguatan kapasitas sebagai pemberi), periode 2000–2010 (tahap penguatan komitmen) dan periode 2010–sekarang (tahap restrukturisasi kelembagaan).



Gambar 11. Tahapan Strategi Kebijakan KSS Indonesia

Penjelasan atas strategi di setiap tahapan sebagai berikut.

1. 1960–1980, Tahap Pengenalan KSS Indonesia. Pada tahapan ini Indonesia mulai memperkenalkan program KSS dan hanya berfokus kepada program-program yang secara historis Indonesia sudah mempunyai keunggulan komparatif dan keahlian berdasarkan pengalaman seperti bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Pada periode ini Indonesia mulai berbagi pengalaman melalui berbagai program pelatihan, pertukaran tenaga ahli baik dalam kerangka kerja sama secara bilateral ataupun multilateral melalui keterlibatan mitra pembangunan.
2. 1980–2000, Tahap Penguatan Kapasitas sebagai Pemberi. Pada tahapan ini program KSS dilakukan dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan negara berkembang lain dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia berusaha

meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan visi pembangunan dari SDM yang dimiliki dengan mempelajari teknologi dan pengetahuan dari negara-negara yang sudah lebih maju tingkat pembangunannya. Selain didukung SDM yang berpengalaman, Indonesia juga memperkuat fasilitas yang dimiliki untuk menunjang proses transfer pengetahuan kepada negara berkembang lainnya. Dalam hal ini, mitra pembangunan berperan juga dalam penyediaan fasilitas dan tenaga ahli yang didatangkan ke Indonesia.

Dengan bekal teknologi dan pengetahuan yang sudah diadaptasi di Indonesia, Indonesia mulai menawarkan program KSS yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan negara berkembang lainnya serta memperkuat solidaritas antar negara berkembang. Melalui Program KTNB atau ITCP yang dilakukan sejak tahun 1981, Indonesia mulai lebih aktif dalam berbagi pengalaman berupa kapasitas dan pengetahuan yang sudah mengadopsi teknologi lebih tinggi baik dengan dukungan secara bilateral maupun multilateral. Selama periode tersebut, KTNB Indonesia telah berbagi pengalaman dan bertukar pengalaman (*exchange dan sharing of experiences*) dengan negara-negara di Asia dan Afrika antara lain di bidang-bidang kependudukan, pertanian, irigasi dan perumahan, serta informasi.

3. 2000–2010, Tahap Penguatan Komitmen Nasional. Pada tahap ini, pemerintah Indonesia melakukan formalisasi program dalam dokumen perencanaan nasional RPJP/M. Bentuk komitmen Indonesia yang paling mendasar telah tertulis dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 tentang peran aktif Indonesia dalam tataran nasional secara umum, dan secara khusus mengenai pentingnya peran aktif Indonesia melalui KSS dalam rangka memperjuangkan kerja sama internasional dan tatanan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan. Tahapan implementasi saat ini adalah yang ketiga yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015–2019 dengan visi utama adalah memperkuat kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dan subagenda yaitu memperkuat peran dan kerja sama global dan regional dengan sasaran meningkatkan peran Indonesia dalam KSST.

Perubahan mendasar dalam strategi kebijakan KSS yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan reformasi cara pandang kerja sama internasional dari sekedar

diplomasi politik melalui kegiatan yang berbasis sukarela (*charity*) atau dalam rangka pembangunan citra di dunia Internasional, ke cara pandang yang lebih komprehensif yaitu sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Cara pandang baru ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara luas dalam bentuk penciptaan perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saling menguntungkan. Dengan demikian, melalui KSS, Indonesia memiliki ruang besar dan kesempatan untuk mempromosikan produk dan pasar investasi Indonesia, yang sekaligus menjadi jembatan bagi para pelaku bisnis dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penciptaan nilai tambah dan output ekonomi antar negara-negara Selatan.

Pada dasarnya, KSS Indonesia tidak hanya menjadi program untuk memperjuangkan kepentingan sesama negara-negara Selatan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan sejajar serta saling menguntungkan. Namun demikian, KSS Indonesia juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pencapaian kepentingan politik dan ekonomi (sebagai instrumen diplomasi) dengan tetap mengutamakan esensi solidaritas antar sesama negara berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015–2019.

4. 2010–Sekarang, Restrukturisasi Lembaga Pengelola.

Kontribusi dan capaian Indonesia dalam kerangka kerja sama pembangunan dengan sesama negara berkembang, dalam hal ini KSS, telah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB melalui UNESCAP dan UNOSSC dalam rangka hari peringatan "*Regional Commemoration of the United Nations Day for South–South Cooperation*", di Bangkok pada tanggal 12 September 2018. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan dunia internasional kepada Indonesia yang telah berperan besar dalam bidang KSS di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut menjadi bukti konsistensi Indonesia yang telah secara aktif menerapkan kerja sama pembangunan dengan sesama negara berkembang sejak KAA di Bandung pada 1955.

Jika ditelusuri program bantuan Indonesia dalam kerangka KSS saat ini sangat bervariasi dan meliputi manajemen penanggulangan bencana, peternakan dan pertanian, pendidikan, resolusi konflik dan perdamaian, pengembangan demokrasi, dan pengembangan ekonomi yang sudah mencapai lebih dari 648 program bantuan KSS dan diikuti oleh peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah,

Amerika Selatan dan lain sebagainya sejak 1999 hingga 2017.⁴⁶ Capaian ini diharapkan dapat diperluas baik secara jangkauan maupun dampaknya. Atas dasar tersebut saat ini sedang diwacanakan pembentukan kelembagaan yang lebih kuat (*single agency*) dan kebijakan yang lebih terpadu terpadu (*one gate policy*) dalam perencanaan dan penganggaran program KSS lintas sektor (lihat kembali subbab 2.2.1).

Berdasarkan serangkaian penguatan kelembagaan dan evolusi kebijakan yang dilakukan, Indonesia diharapkan dapat berperan secara lebih aktif dan memberikan dampak pada kemandirian negara-negara berkembang dalam mengupayakan pembangunannya. Peran aktif Indonesia secara konkret akan dibahas dengan detail pada bagian selanjutnya dengan memaparkan data distribusi dan capaian Indonesia dalam implementasi program KSS Indonesia.

⁴⁶ "Kontribusi Kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia Terima Penghargaan dari PBB", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Duta-Besar-RI-Bangkok-mewakili-Indonesia-menerima-penghargaan-dari-UNESCAP-dan-UNOSSC-atas-kontribusi-dan-capaian-Indonesia-di-bidang-Kerja-Sama-Selatan-Selatan-dan-Triangular.aspx> pada tanggal 16 Desember 2018.

BAB 3:

IMPLEMENTASI KSS INDONESIA: DISTRIBUSI PROGRAM, RAGAM PELAKSANA, DAN PERAN MITRA PEMBANGUNAN

Peran aktif Indonesia dalam KSS dapat ditelusuri sejak Indonesia menggagas penyelenggaraan KAA (1955) di Bandung, menjadi salah satu negara pendiri GNB (1961), dan secara konkret aktif memberikan berbagai skema bantuan atau program dalam berbagai sektor. Hal ini juga didukung oleh arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional tidak hanya dalam kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia, namun juga sebagai upaya mendukung solidaritas bagi kebangkitan negara-negara berkembang dalam membangun sebuah tatanan internasional yang lebih adil dan setara.

Program KSS Indonesia yang terinstitusionalisasi telah diimplementasikan secara rutin sejak periode 1980-an. Di periode ini, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi masalah pangan dan kependudukan menjadikan program pertanian dan kependudukan sebagai program unggulan yang mendapatkan banyak respon positif dari negara berkembang lainnya (lihat bab 2). Sejak itu pula, kepercayaan diri Indonesia untuk berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) dengan negara berkembang terus menguat hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak dan beragamnya program-program yang diimplementasikan dan meluasnya jangkauan wilayah program. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan negara-negara berkembang terhadap Indonesia terus meningkat, mengingat KSS didasari oleh prinsip *demand driven*. Dalam perjalanannya Indonesia kemudian menawarkan beberapa program unggulan (*flagship program*) berdasarkan modalitas yang dimiliki Indonesia dengan berfokus pada tiga isu, yaitu isu-isu pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan isu ekonomi. Program unggulan ini ditetapkan pada tahun 2012 ketika pelaksanaan *High Level Meeting Country Led Knowledge Hub* di Bali. Adapun program unggulan dalam merespon isu-isu pembangunan seperti pemberantasan kemiskinan, pertanian dan peternakan, manajemen resiko bencana, infrastruktur, pendidikan, perencanaan dan penganggaran. Sedangkan untuk isu-isu ekonomi, program yang diunggulkan adalah manajemen ekonomi makro, keuangan publik, dan keuangan mikro.

Sementara itu, untuk isu-isu tata kelola yang baik dan pembangunan perdamaian, program yang diunggulkan adalah demokratisasi, penegakan hukum, resolusi konflik dan desentralisasi.

Dalam kaitan dengan misi tersebut, bagian selanjutnya akan menguraikan tentang distribusi KSS Indonesia, termasuk ragam pelaksana dan keterlibatan mitra pembangunan dalam rentang waktu akhir 1980an (awal 1990an) hingga 2017.⁴⁷ Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk nyata kontribusi dan komitmen Indonesia dalam memperkuat negara-negara berkembang. Bagian ini sekaligus juga bermanfaat untuk mengidentifikasi ruang-ruang kerja sama yang dapat ditingkatkan baik melalui skema bilateral maupun triangular.

3.1. Distribusi Program KSS Indonesia

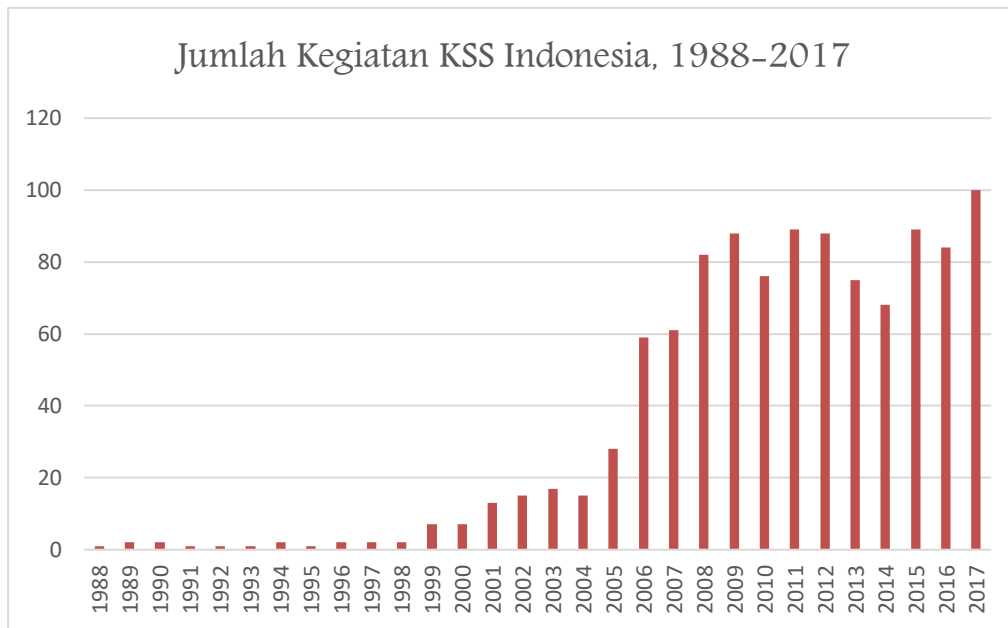
Dalam prakteknya, program KSS Indonesia, khususnya kerja sama teknis dapat dikategorikan dalam lima jenis kegiatan (lihat gambar 12). Yang pertama adalah pelatihan, yang merupakan bentuk yang paling umum. Peserta dari negara-negara berkembang akan datang langsung ke Indonesia untuk mengikuti serangkaian program pelatihan, seperti sesi kelas, praktikum, turun lapangan, dan lain-lain. Kedua, Indonesia menawarkan format seminar dan *exchange views* (forum pertukaran pembelajaran). Program ini umumnya memiliki durasi lebih singkat dan berlangsung dua arah, di mana pihak Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain. Ketiga, Indonesia mengirimkan sejumlah tenaga ahlinya ke negara-negara berkembang. Tenaga ahli dari Indonesia akan memberikan sesi kelas, praktik, dan pendampingan langsung di negara-negara mitra. Keempat, Pemerintah Indonesia, biasanya melalui Kementerian Pendidikan, memberikan beasiswa, baik untuk program untuk mendapatkan gelar (*degree*) maupun non-gelar (*non-degree*) kepada mahasiswa dari negara-negara berkembang. Kelima, Indonesia juga turut memberikan hibah. Hibah dari Indonesia biasanya berupa *in-kind* dan bukan berwujud uang tunai, misalnya alat-alat pertanian yang kerap kali diberikan oleh Kementerian Pertanian.

⁴⁷ Data kegiatan dan anggaran program KSS Indonesia yang digunakan pada keseluruhan bab ini merupakan data dari beberapa K/L dan mitra pembangunan yang teridentifikasi/terkumpul dan dapat diakses. Hal ini disebabkan *database* program KSS Indonesia yang masih dalam proses penataan. Sangat terbuka kemungkinan jumlah kegiatan dan anggaran lebih besar dari yang ditampilkan.



Gambar 12. Jenis Kegiatan Program KSS Indonesia

Menelusuri kegiatan yang berhasil diidentifikasi, jumlah kegiatan program KSS Indonesia sejak 1988 hingga 2017 berjumlah 1.078 kegiatan. Secara umum, jumlah program KSS Indonesia mencapai jumlah tertingginya pada tahun 2017, mencapai 100 kegiatan (Grafik 1). Namun demikian, jumlah tersebut hanyalah kegiatan KSS yang terdata, sehingga tidak menutup kemungkinan pada kenyataannya Indonesia telah melaksanakan lebih dari itu. Jika dilihat pada Grafik 1, keaktifan Indonesia dalam KSS meningkat signifikan pasca 2005. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menjadikan penyelenggaraan KSS sebagai salah satu prioritas dalam agenda nasional RPJMN 2004-2009. Tidak hanya itu, pada saat bersamaan juga disepakatinya Deklarasi Paris dan masuknya Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah semakin mendorong Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam agenda pembangunan global.

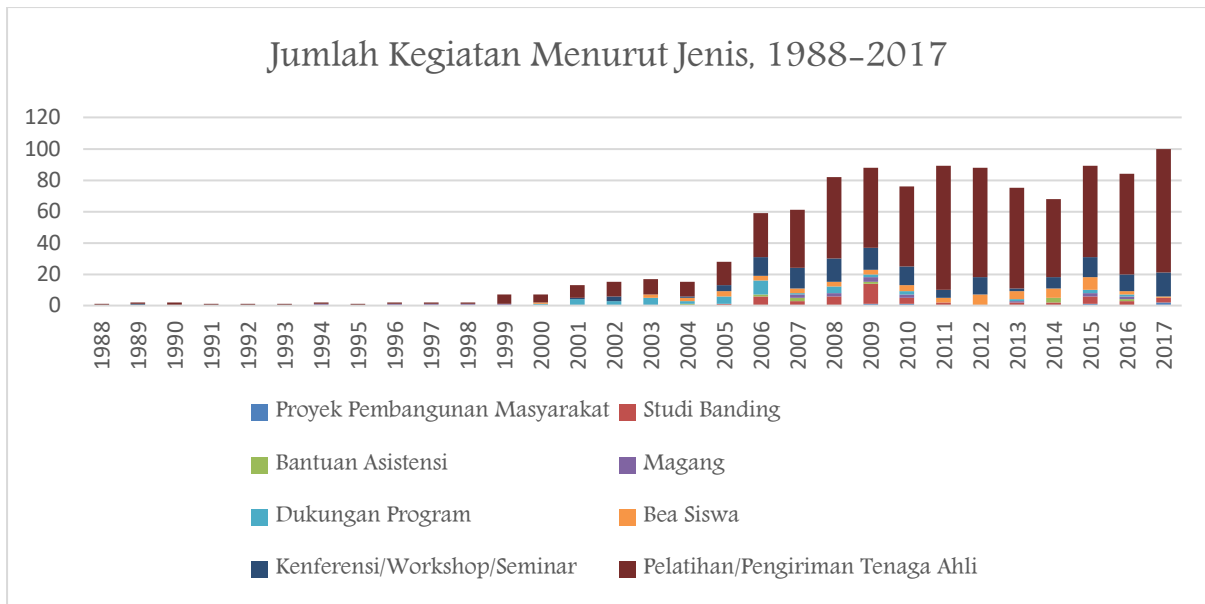


Catatan: Total kegiatan KSS Indonesia yang terdata tahun 1988-2017 sebanyak 1078 kegiatan. Jumlah kegiatan meningkat sejak tahun 2005 dan terus meningkat sampai pada tahun 2011 dan mencapai puncaknya di tahun 2017. Dari 2008 sampai 2017, rata-rata jumlah kegiatan berkisar sekitar 80 kegiatan per tahun.

Grafik 1. Jumlah Kegiatan KSS Indonesia (1988-2017)

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

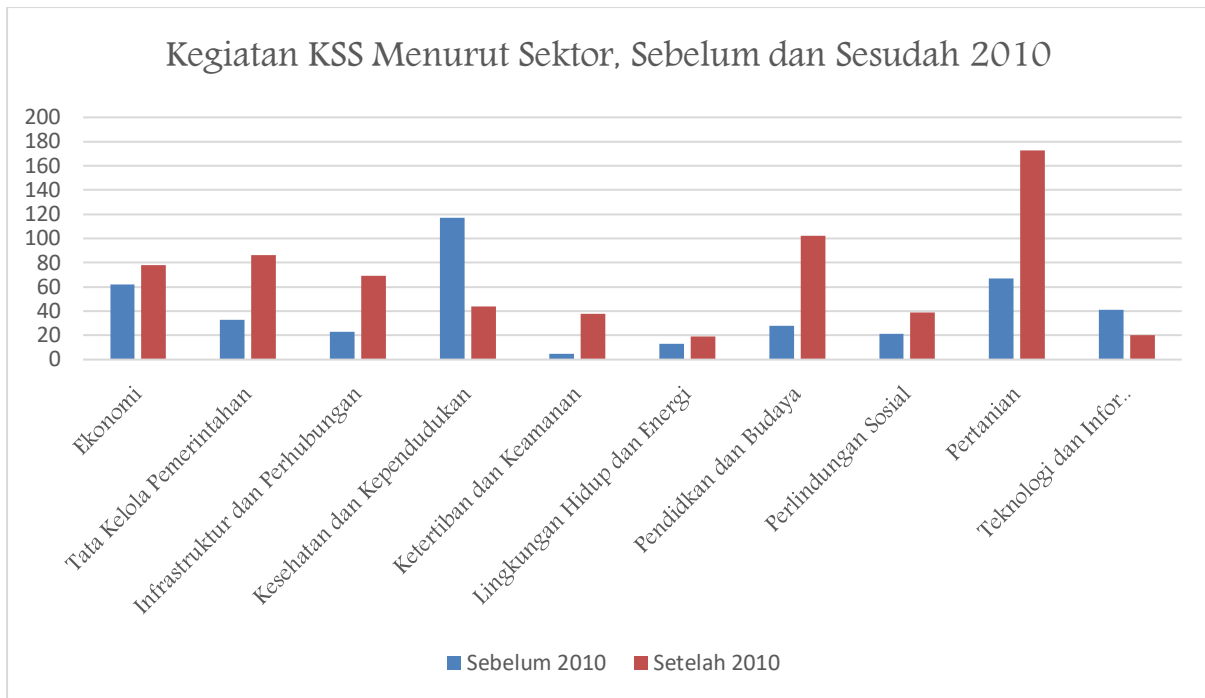
Bentuk program KSS Indonesia menurut jenis kegiatannya menunjukkan bahwa kegiatan KSS sudah dilakukan sesuai dengan keunggulan komparatif Indonesia, keahlian, kapasitas, dan juga untuk mendukung program unggulan (lihat Grafik 2). Jumlah kegiatan KSS Indonesia semakin meningkat setelah tahun 2005. Dalam rentang 2005-2017, bentuk kegiatan yang paling banyak dilakukan adalah pelatihan, pengiriman tenaga ahli, dan transfer pengetahuan terutama di bidang-bidang seperti pertanian, administrasi pemerintahan, perekonomian, infrastruktur, dan pendidikan. Sejak tahun 2009, kegiatan berupa studi banding dari negara berkembang baik ke Indonesia maupun ke negeri maju mulai banyak juga dilakukan dalam kerangka program KSS.



Grafik 2. Jumlah Kegiatan KSS Indonesia menurut jenis (1988-2017)

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

Sedangkan kalau dilihat dari sektornya, kegiatan KSS Indonesia lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu-isu pembangunan dan kemudian disusul oleh isu-isu tata kelola pemerintahan dan pembangunan perdamaian serta isu-isu ekonomi (Grafik 3). Dalam pelaksanaannya, program KSS Indonesia telah mengalami perubahan prioritas dari program KSS di tahun 2010. Dengan membandingkan kegiatan KSS antara sebelum dan sesudah tahun 2010, terlihat adanya perubahan prioritas dan strategi KSS Indonesia. Setelah tahun 2010, kegiatan di sektor ekonomi, infrastruktur dan perhubungan, dan pertanian meningkat tajam sebagaimana peningkatan di sektor tata kelola pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pendidikan dan budaya, dan perlindungan sosial. Sedangkan sektor terkait kesehatan dan pendudukan serta teknologi informasi dan komunikasi mengalami penurunan jumlah kegiatan. Perubahan tersebut antara lain disebabkan karena perubahan kepemimpinan nasional yang berpengaruh kepada perubahan strategi kerja sama internasional yang bergeser ke arah diplomasi ekonomi dan juga adaptasi terhadap dinamika internasional serta merespon kebutuhan dari negara berkembang lainnya.



Grafik 3. Jumlah Kegiatan KSS menurut Sektor, Sebelum dan Sesudah 2010

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

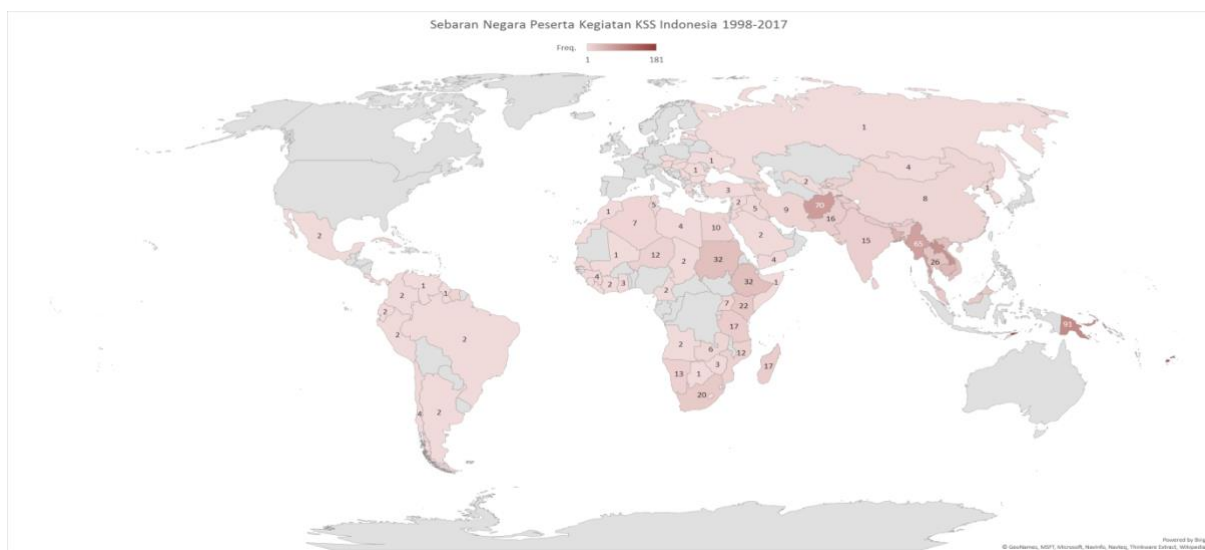
Kegiatan-kegiatan KSS Indonesia hingga saat ini umumnya berupa berbagi pengetahuan dan pengalaman terbaik, serta program magang atau beasiswa. Tidak hanya mengundang negara peserta KSS untuk mengikuti kegiatan KSS di Indonesia, pemerintah juga beberapa kali mengirimkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan di negara penerima secara langsung. Dari berbagai negara tersebut, ribuan peserta telah menjadi penerima manfaat melalui keterlibatannya dalam kegiatan KSS Indonesia sejak tahun 1988–2017. Jumlah peserta KSS Indonesia secara khusus meningkat tajam sejak tahun 2006. Seiring dengan peningkatan jumlah kegiatan sejak tahun 2006, jumlah peserta kegiatan KSS Indonesia meningkat. Total peserta yang terdata sejak tahun 1988 sebanyak 11.187 orang (Grafik 4).



Grafik 4. Jumlah Peserta Negara Berkembang dalam Kegiatan KSS Indonesia (1988-2017)

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

Dalam konteks jangkauan wilayah program KSS Indonesia, kegiatan-kegiatan KSS Indonesia tersebar di negara-negara berkembang dari berbagai kawasan, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara pelopor KAA, tidak mengejutkan bahwa negara penerima manfaat KSS Indonesia pun lebih banyak berasal dari kedua benua tersebut. Sementara, negara berkembang dari kawasan Amerika Latin relatif belum banyak terlibat dalam kegiatan KSS Indonesia (Gambar 13).



Gambar 13. Peta Sebaran Negara Peserta Kegiatan KSS Indonesia (1988-2017)

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

Meningkatnya komitmen pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan KSS, dapat dilihat salah satunya dari peningkatan anggaran per tahun yang dialokasikan pemerintah sejak tahun 1988–2017 (Grafik 5). Dari informasi terkait anggaran kegiatan yang didapat, total keseluruhan anggaran untuk kegiatan KSS dari berbagai institusi tahun 1988–2017 adalah sebesar 244 miliar rupiah. Namun demikian, jumlah tersebut belum menggambarkan keseluruhan kegiatan KSS karena karena banyak data kegiatan yang informasi anggarannya belum tersedia. Sejak tahun 2006–2010, total anggaran yang dikeluarkan meningkat sampai pada kisaran 20–30 miliar rupiah. Jumlah anggaran ini turun kembali di tahun 2011. Hal ini mengindikasikan fluktuasi perubahan alokasi anggaran tiap tahun karena tidak semua kegiatan yang terdata memiliki informasi terkait anggaran.

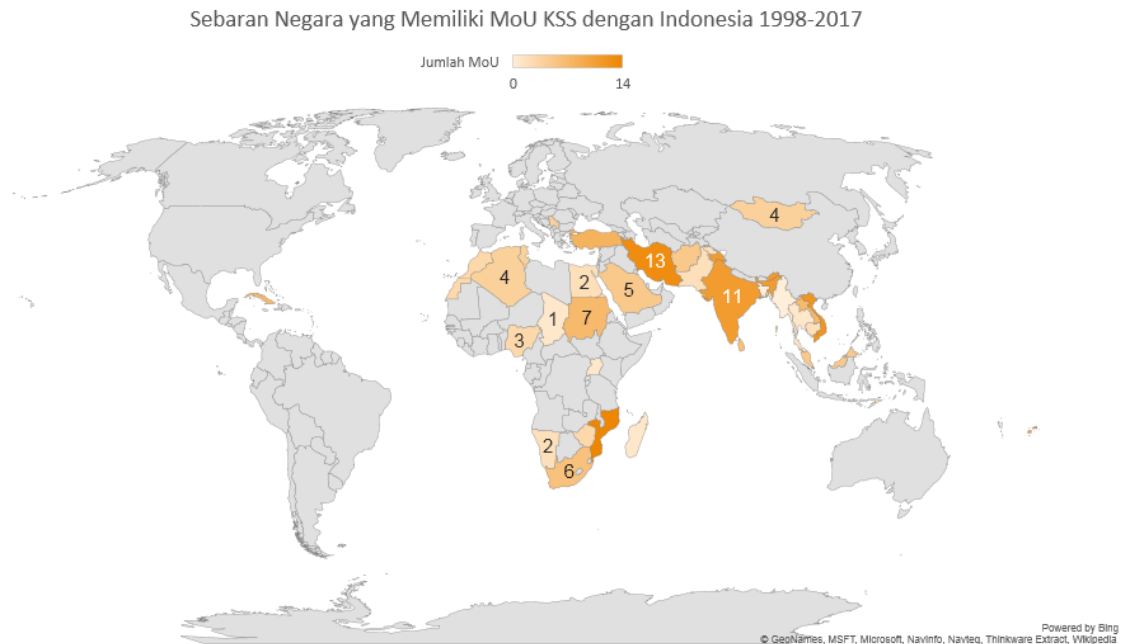


Catatan: Kegiatan KSS Indonesia sebelum tahun 2000 belum terdokumentasi dengan baik sehingga besaran anggaran dan jumlah kegiatan yang tercatat hanya berdasarkan dari informasi yang tersedia dan dimungkinkan terdapat anggaran dan kegiatan KSS yang belum tercatat.

Grafik 5. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan KSS Indonesia (1988–2017)

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

Dalam upaya memperluas jangkauan program KSS Indonesia dengan basis berbagi pengalaman, Indonesia telah menjalin kerja sama formal melalui *MoU* dengan beberapa negara-negara berkembang yang sebagian besar adalah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah, serta Afrika. Berdasarkan data dari Arsip Nasional, negara yang memiliki *MoU* terbanyak dengan Indonesia saat ini adalah Iran (13) dan diikuti oleh India (11) (Gambar 14). Terjalinnnya hubungan kerja sama secara formal ini juga merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan agenda KSS.



Gambar 14. Peta Sebaran Negara yang Memiliki *MoUKSS* dengan Indonesia (1988–2017)

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

3.2. Ragam Pelaksana KSS Indonesia: Membangun Kemitraan

Dari rangkaian data-data yang telah dipaparkan, dalam pelaksanaannya, kegiatan KSS Indonesia juga dapat dikelompokkan berdasarkan institusi pelaksana kegiatan. Dua pelaksana utama kegiatan-kegiatan KSS adalah institusi pemerintah, baik itu kementerian atau lembaga negara, dan institusi di luar pemerintahan. Beberapa di antaranya menjadi *centre of excellence* yang berperan sebagai lembaga penyedia tenaga ahli untuk memberikan pelatihan atau bertukar pengalaman dan *best practices* sesuai dengan bidang kegiatan KSS masing-masing. Beberapa contoh *center of excellence* yang terlibat dalam pelaksanaan KSS Indonesia adalah BBIB Singosari di bawah Kementerian Pertanian di bidang peternakan, *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center* (TDMRC), Universitas Syiah Kuala di bidang kebencanaan, dan lain sebagainya.

Perlu dicatat bahwa pembentukan beberapa *center of excellence* seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak terlepas dari peran mitra pembangunan yang awalnya menginisiasi pembentukan beberapa *center of excellence* di Indonesia sebagai tempat transfer pengetahuan (*transfer knowledge*) dari negara mitra ke Indonesia. Hal ini yang kemudian

menjadi modal bagi pemerintah Indonesia untuk kemudian berbagi kepada negara berkembang lainnya. Sebagai contoh adalah pengembangan *Multimedia Training Center*, BBIB Singosari, dan Politeknik Negeri Surabaya yang bekerja sama dengan JICA.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai K/L dan Lembaga Arsip Nasional, terdapat sepuluh Kementerian/Lembaga yang paling banyak melaksanakan kegiatan KSS sebagaimana ditunjukkan di Tabel 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang melaksanakan program KSS terbanyak. Kemudian diikuti oleh Kementerian Pertanian dan selanjutnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berdasarkan wawancara dengan pihak Kementerian Pertanian, negara-negara Selatan memang paling banyak meminta bantuan pelatihan di bidang pertanian. Hal ini disebabkan karena cara bertani di negara-negara tersebut masih cukup tertinggal dari Indonesia dan memiliki kemiripan cuaca dan iklim. Selain itu, Indonesia sudah memiliki banyak balai pertanian yang dapat memberikan bantuan pelatihan. Sedangkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu dari lima besar pelaksana, memfokuskan kepada pemberian pelatihan perawatan dan pembangunan infrastruktur ke negara Selatan-Selatan sejak tahun 2005, khususnya ke Timor Leste, Palestina, Fiji, dan Afghanistan.

Sementara itu di bidang kesehatan, program KSS Indonesia banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur kesehatan dan *capacity building* bagi rakyat Afghanistan di bidang perumahnya termasuk program *sister hospital*, keperawatan, nutrisi, dan buku KIA. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam peningkatan kapasitas para petugas di bidang kesehatan ibu dan bayi di Timor Leste. Sementara itu beberapa institusi non-K/L yang sering melaksanakan kegiatan KSS antara lain IPB, PENS ITS, *Institute for Peace and Democracy* (IPD) serta MMTC Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan KSS Indonesia tidak hanya bergantung pada institusi resmi pemerintahan, namun juga melibatkan institusi atau lembaga yang ada di luar pemerintahan.

Tabel 1. Institusi dengan Kegiatan KSS Terbanyak

No	Institusi K/L	Institusi Non K/L
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Institut Pertanian Bogor
2	Kementerian Pertanian	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Institut Teknologi Sepuluh November
3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)	Institute for Peace and Democracy (IPD)

4	Kementerian Luar Negeri	Multi Media Training Center (MMTC)/Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tsunami & Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala
6	Kementerian Perindustrian	Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)
7	Kementerian Kesehatan	PT. Telekomunikasi
8	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Universitas Gadjah Mada
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Ciputra Foundation
10	Kementerian Komunikasi dan Informatika	

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

Jika dilihat secara lebih detail, pelaksanaan KSS Indonesia secara tidak langsung juga telah melibatkan aktor lainnya yaitu universitas/akademisi, kelompok masyarakat sipil (OMS), serta kelompok swasta. Peran universitas/akademisi misalnya melalui pendirian TDMRC di Universitas Syiah Kuala yang telah banyak melakukan kegiatan dengan fokus mitigasi bencana. Adapun keterlibatan OMS dalam KSS Indonesia sudah terlihat sejak tahun 1991 melalui Yayasan Dian Desa yang menfokuskan kegiatan pada upaya pengembangan komunitas (lihat bab 2). Selain itu, Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) juga merupakan salah satu OMS yang terlibat aktif di bidang pengembangan teknologi pembangkit listrik di wilayah pedesaan. Dalam perkembangannya, masih terbuka peluang besar dalam memaksimalkan potensi universitas/akademisi dan OMS baik sebagai mitra pemerintah maupun bertindak sebagai penyedia (*provider*) secara mandiri.⁴⁸

Adapun keterlibatan pihak swasta dapat dilihat melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam misi dagang 26 Maret - 1 April 2000 ke negara-negara Afrika Bagian Selatan (Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Namibia), KADIN membuat kesepakatan dengan *Center for Cultural Interchange* di Namibia dan Badan Promosi Dagang Zimbabwe (ZIMTRADE) untuk meningkatkan perdagangan yang dilakukan oleh pihak swasta. Selain itu, sebagai bagian dari strategi pemasaran produk-produk Indonesia ke pasar Afrika, pada kesempatan tersebut dilakukan pembukaan "*House of Indonesia*" di Johannesburg, Afrika

⁴⁸ Lebih jauh tentang keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan akademisi dalam KSS Indonesia dapat disimak dalam Fredy B.L Tobing, A. Virgianita, dkk., *Buku Saku KSS Indonesia*, CIREs FISIP Universitas Indonesia, Februari 2018, hlm. 38-51.

Selatan dan Harare, Zimbabwe yang dikelola oleh pihak swasta.⁴⁹ Kerja sama Indonesia dengan Afrika semakin memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut melakukan pembangunan infrastruktur di Afrika oleh BUMN dan Swasta sebagai bagian dari komitmen Indonesia di *International Development Association (IDA)*-Bank Dunia.⁵⁰

Contoh terkini peran swasta dalam KSS adalah keterlibatan BUMN Bio Farma dalam memberikan pengetahuan, pengalaman dan bantuan teknis, mengenai produksi vaksin kepada negara anggota IsDB dan OKI, seperti Tunisia dan Maroko. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27-30 Agustus 2018, di Jakarta dan Bandung, Indonesia melalui program *Reverse Linkage* dengan dukungan *Islamic Development Bank (IsDB)*.⁵¹ Swasta lain yang juga cukup berperan dalam KSS Indonesia adalah CV. Karya Hidup Sentosa atau *Quick Tractor Indonesia* yang memproduksi traktor tangan yang sudah banyak dimanfaatkan negara-negara peserta KSS di bidang pertanian.⁵² Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Indonesia banyak memberikan bantuan alat dan mesin pertanian ke negara berkembang lainnya. Tercatat pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian memberikan sebanyak 100 traktor ke Fiji. Bantuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengadaan pelatihan bagi petugas operator dan mekanisasi pertanian di Fiji (*Agricultural Mechanization Training Program*) yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 Desember 2018 dengan melibatkan Balai Besar Mekanisasi Pertanian, NAM-CSSTC dan CV. Karya Hidup Sentosa. Pelatihan teknis kemudian dilaksanakan di kantor pusat CV. Karya Hidup Sentosa Yogyakarta dengan menitikberatkan pada pengenalan, perawatan dan pemeliharaan traktor roda dua G1000 BOKSER yang diperbantukan.⁵³

"Traktor tersebut jadi penyemangat baru untuk bisa membangun pertanian di Fiji. Saya ingin bisa memainkan pertanian di Fiji seperti pertanian di Indonesia "

⁴⁹ Biro Hubungan Masyarakat Depperindag, "Laporan Kunjungan Misi Dagang ke Afrika Selatan, Zimbabwe dan Namibia tanggal 26 Maret – 1 April 2000", diakses dari http://depperindag.tripod.com/ind_2000/humas/pers/01042000.htm pada tanggal 20 Februari 2019

⁵⁰ Ariyanti, F., "Sri Mulyani Minta Swasta dan BUMN Bangun Infrastruktur di Afrika" diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2895870/sri-mulyani-minta-swasta-dan-bumn-bangun-infrastruktur-di-afrika> pada tanggal 20 Februari 2019.

⁵¹ PT Bio Farma (Persero), "Perkuat Kerjasama Indonesia – Maroko – Tunisia, Indonesia dipercaya untuk Membantu Kemandirian Produksi Vaksin di Negara Anggota OKI" diakses dari <http://bumn.go.id/biofarma/berita/1-Perkuat-Kerjasama-Indonesia---Maroko---Tunisia-Indonesia-dipercaya#> pada tanggal 20 Februari 2019.

⁵² Kementerian Luar Negeri RI, "Indonesia Berupaya Memperkuat Kepemimpinan dalam KSST" diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Berupaya-Memperkuat-Kepemimpinan-dalam-Kerja-Sama-Selatan-Selatan-dan-Triangular.aspx> pada tanggal 20 Februari 2019.

⁵³ R. Elvi, "Indonesia Latih Operator Pertanian Fiji untuk Gunakan Traktor", diakses dari <http://rilis.id/indonesia-latih-operator-pertanian-fiji-untuk-gunakan-traktor> pada tanggal 22 Februari 2019.

Boks 8. Testimoni Bapak Ramazi, Peserta *Agricultural Mechanization Training Program* pada tanggal 10-17 Desember 2018⁵⁴

Selain itu, peran BUMN Indonesia di bidang infrastruktur di Timor Leste juga menjadi contoh keterlibatan swasta dalam mendukung program KSS Indonesia. BUMN tersebut antara lain Hutama Karya, Waskita, WIKA, Pembangunan Perumahan (PT. PP), dan Adhi Karya. Mereka terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur seperti irigasi air, jalan, jembatan, perumahan dan permukiman. Kerja sama tersebut meningkat sejak tahun 2011 setelah Timor Leste menandatangani kerja sama untuk menerima pelatihan dan pembangunan di bidang infrastruktur dari Indonesia. Bentuk kerja sama pun dilengkapi dengan pengembangan infrastruktur perkotaan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang konstruksi.⁵⁵

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2015-2019 bahwa kerja sama pembangunan juga bermotifkan keuntungan ekonomis yang dapat menunjang pembangunan nasional, maka keterlibatan sektor swasta sangat penting. Dalam hal ini terdapat upaya saling menjajaki peluang pasar dan investasi di antara negara-negara berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip berbagi pengalaman dan pengetahuan (*sharing experiences and knowledges*) serta berbasis pada kemanfaatan yang dirasakan bersama (*mutual benefit*).

3.3. Peran Mitra Pembangunan dalam KSS Indonesia

KSS dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama pembangunan yang berbeda dari bentuk kerja sama pembangunan tradisional, karena kerja sama tersebut tidak dilakukan oleh negara maju untuk negara berkembang, melainkan seutuhnya di antara sesama negara berkembang. Secara teknis, hal tersebut adalah pengertian harfiah dari KSS. Kata ‘Selatan’ di dalamnya mengacu pada negara-negara berkembang. Namun, secara konseptual, kemunculan KSS erat kaitannya dengan perubahan pada arsitektur pembangunan global.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Simorangir, Eduardo, “BUMN RI Dominasi Pembangunan di Timor Leste”, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3650588/bumn-ri-dominasi-pembangunan-di-timor-leste> pada tanggal 20 Februari 2019.

Namun demikian, dalam prakteknya KSS tidak dapat begitu saja melepaskan peran negara Utara. Dalam perkembangannya, keterlibatan negara Utara yang notabene adalah negara maju dalam KSS diakomodasi dalam skema kerja sama triangular. Kerja sama triangular merupakan sebuah bentuk kemitraan antara negara DAC (mitra pembangunan) dan negara penyedia bantuan KSS untuk mengimplementasikan proyek kerja sama pembangunan di negara-negara penerima manfaat.⁵⁶ Kerja sama triangular ini hadir sebagai implikasi dari fenomena pergeseran kekuatan ekonomi dan politik global ke tatanan dunia yang multipolar yang kemudian mengubah perdebatan dalam hubungan internasional dan politik pembangunan.⁵⁷ Bentuk kerja sama triangular ini dapat dilihat sebagai kerja sama yang menjembatani perbedaan antara paradigma di antara negara Utara dengan negara Selatan dalam melaksanakan kerja sama pembangunan atau dapat dilihat sebagai sebuah inovasi moda baru dalam kerja sama pembangunan.⁵⁸

Istilah ini kerja sama triangular semakin marak pada tahun 2010 seiring dengan berbagai kesepakatan di tingkat internasional seperti HLE di Bogota (2010), Accra Agenda (2008), dan Deklarasi Paris (2005). Di level regional, Konsensus Tunisia (2010) yang diinisiasi oleh *African Union Commission, the New Partnership for Africa's Development (NEPAD)*, dan *The African Development Bank* menekankan pentingnya bantuan pendanaan dari negara-negara Utara dalam wujud kerja sama triangular.⁵⁹

Di level nasional, dalam prakteknya, KSS Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini dapat berupa badan kerja sama suatu negara, organisasi regional, maupun organisasi multilateral seperti JICA, USAID, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)*, IsDB, UNDP, UNFPA, Sekretariat ASEAN, *Korea International Cooperation Agency (KOICA)*, dan lain sebagainya. Jika ditelusuri dari fase awal KSS Indonesia, sesungguhnya keterlibatan pihak ketiga (mitra pembangunan) dalam prakteknya sudah terjadi. Misalnya ketika Indonesia pada tahun 1966 memberikan bantuan lewat FAO ke negara-negara Afrika dan kerja sama Indonesia-JICA dalam bentuk pelatihan *third country training program*.

Dari data yang diolah, besarnya peran mitra pembangunan ini ditunjukkan pada grafik 6. Dari 1.078 kegiatan yang tercatat, 21% dari keseluruhan kegiatan tersebut merupakan

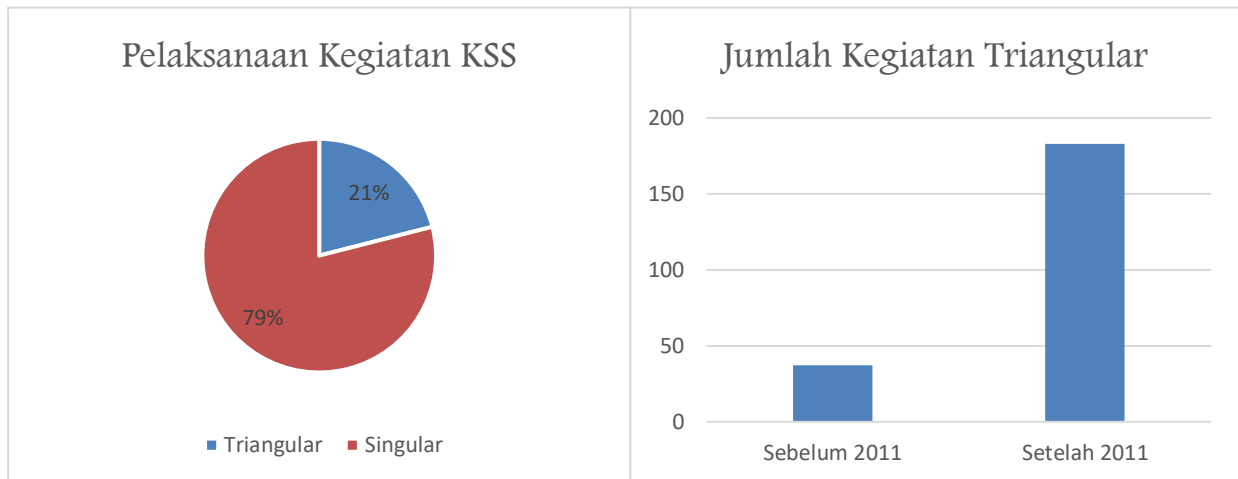
⁵⁶ Julia Langendorf, Dkk. *Triangular Cooperation: A Guideline for Working in Practice*, GIZ, 2012, hlm. 25.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 21

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 15.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 23.

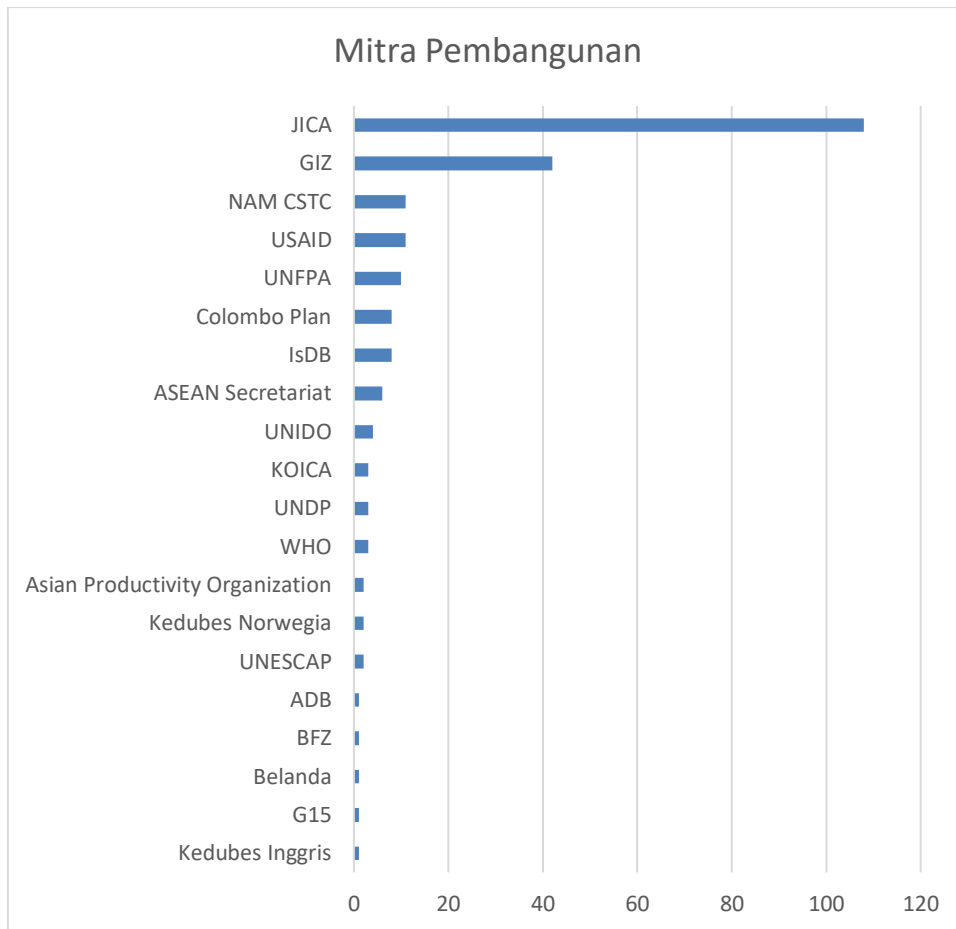
kerja sama dengan mitra pembangunan, baik dengan negara maupun lembaga multilateral. Jumlah kegiatan yang dilakukan melalui skema triangular meningkat setelah tahun 2011. Jika dikaitkan dengan perkembangan domestik, dapat dikatakan Tim Kornas KSS Indonesia yang muncul sebagai wujud pelembagaan KSS yang lebih kuat, mempunyai andil dalam peningkatan peran mitra pembangunan tersebut. Peran mitra pembangunan ini dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melaksanakan kegiatan KSS.



Grafik 6. Pelaksanaan Kegiatan KSS Indonesia dengan Skema Triangular

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

JICA tercatat sebagai institusi yang paling aktif bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan kegiatan KSS, yaitu dengan jumlah kegiatan sebanyak 108 kegiatan. Selain dengan JICA, mitra pembangunan lain yang cukup banyak melaksanakan kegiatan adalah USAID dan GIZ. Sedangkan, untuk mitra pembangunan berupa organisasi internasional yang paling banyak terlibat dalam KSS Indonesia adalah lembaga dalam lingkup UN, yaitu UNFPA, UNDP, dan UNESCAP. Namun menarik untuk mencatat bahwa IsDB dalam 10 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan keterlibatannya dalam KSS Indonesia melalui program *reverse linkage*.



Grafik 7. Mitra Pembangunan dan Jumlah Keterlibatannya dalam Program KSS Indonesia

Sumber: Berbagai Kementerian/Lembaga, Arsip Nasional (diolah)

Program-program yang dilakukan dalam kerangka KSS bersama mitra pembangunan memberikan pembelajaran tentang desain kegiatan KSS yang dilaksanakan oleh Indonesia telah mengalami pengembangan dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga kesinambungannya. Sebagai contoh, JICA mendesain kegiatannya dalam bentuk *Project Type Cooperation* yang terdiri dari pelatihan, magang dan pengiriman ahli sebagai bagian dari *sharing knowledge* dalam satu siklus program dan muatan materi yang bertambah sebagai pelengkap dari bantuan teknis yang diberikan. Sementara itu, USAID fokus pada pembangunan kapasitas dan tenaga ahli dengan menggunakan pola kemitraan dalam membuat *Program Design* bersama Tim Kornas KSS Indonesia dan menyiapkan Indonesia menjadi negara penyedia bantuan (*provider*) bagi negara berkembang lainnya. Adapun skema terbaru adalah program *reverse linkage* yang diinisiasi dan didukung oleh IsDB dengan melibatkan sektor swasta. IsDB dalam hal ini juga bertindak sebagai fasilitator antara dua negara dalam KSS untuk membuat pendanaan yang berkelanjutan (dijelaskan pada bagian berikutnya). Secara tidak langsung, Indonesia juga dapat bertukar pengalaman

dan belajar bagaimana pelaksanaan birokrasi yang efektif untuk menjalankan program KSS dari perspektif negara maju dan membuka kanal diplomasi bagi Indonesia dengan para mitra pembangunan.

Boks 9. Contoh Kerja Sama Triangular Indonesia Dengan Mitra Pembangunan

JICA

Kerja sama JICA dengan Indonesia telah memiliki landasan formal bagi mekanisme manajemen kerja sama triangular, yakni melalui program kemitraan yang diluncurkan pada tahun 2003.⁶⁰ Komitmen kerja sama antara JICA dengan Indonesia juga dilengkapi dengan ditandatanganinya *Record of Discussion* pada 26 April 2013.⁶¹ Dukungan JICA terhadap kegiatan KSS Indonesia dimulai dengan pelibatan Indonesia untuk melakukan pembagian ilmu (*knowledge-sharing*) atas proyek JICA yang berhasil dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan tersebut dikenal dengan nama *Third Country Training Partnership* (TCTP).⁶² Dalam perkembangannya, JICA memiliki ciri unik yaitu pemberian bantuan dengan memberikan dukungan pembentukan *center of excellence*. Contoh yang sudah berjalan adalah *center of excellence* untuk pelatihan inseminasi buatan di BBIB Singosari. Salah satu yang sudah berjalan adalah program pelatihan bagi negara Palestina yang datang ke BBIB Singosari untuk mempelajari teknologi inseminasi buatan.

⁶⁰ Shunichiro Honda, *Japan's Triangular Cooperation Mechanism: With a Focus on JICA's Activities*. (Tokyo: JICA Research Institute, 2014): 20, diakses dari https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/booksandreports/jrft3q0000029sb-att/Triangular_Cooperation_Mechanisms_2_for_web.pdf pada tanggal 20 Februari 2019.

⁶¹ *Kajian Akademik: Pembentukan Single Agency Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia*, Tim Koordinasi Nasional KSST, (Jakarta: 2017): 32, diakses dari https://ktln.setneg.go.id/pdf/publikasi_01_12072018.pdf pada tanggal 20 Februari 2019.

⁶² Wawancara Perwakilan JICA pada tanggal 5 September 2018 di Jakarta.



Gambar 15. *Training Program on Frozen Semen Production and Breeding of Small Ruminant for Palestine* diberikan BBIB Singosari, Malang dengan dukungan JICA pada 2015

Sumber: Dokumentasi Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia

Salah satu lembaga lain yang memiliki kisah sukses menjadi *centre of excellence* adalah Pusat Pelatihan Ekspor Impor (PPEI) di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. PPEI merupakan lembaga yang dibangun atas hibah dari JICA dan bertahan hingga saat ini untuk memberikan pelatihan di bidang perdagangan internasional bagi negara-negara berkembang. Bukan hanya pelatihan yang dilaksanakan di Indonesia, PPEI juga mengirim tenaga ahli ke beberapa negara berdasarkan permintaan (*demand-driven*).⁶³

Dalam prinsip kemitraan, JICA saat ini juga menerapkan konsep Triangular dalam mendukung program KSS yang dilaksanakan Indonesia. Program Triangular pertama JICA

⁶³ Wawancara dengan Perwakilan PPEI pada tanggal 12 November 2018 di Jakarta.

dengan Indonesia adalah program pembangunan dan pemeliharaan jalan di Timor Leste yang dilaksanakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan nama program *Capacity Development Project on Road Maintenance of Timor Leste*. Kegiatan yang diberikan adalah berupa pelatihan, pemagangan, dan pengiriman tenaga ahli.

Secara formal, keterlibatan JICA dalam KSS direalisasikan melalui pelaksanaan program *Capacity Development Project for South-South and Triangular Cooperation (CADEP-SSTC)* sebagai salah satu bentuk komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Tim Kornas KSS Indonesia dengan JICA yang ditandatangani pada 26 April 2013.⁶⁴



Gambar 16. Kegiatan Pengiriman Tenaga Ahli Indonesia ke Timor Leste dalam rangka Program *Capacity Development on Road Maintenance of Timor Leste* pada tahun 2018

Sumber: Dokumentasi Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia

USAID

USAID mulai terlibat dalam program KSS sejak tahun 2014, diawali dengan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diwakili Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry.⁶⁵ Kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan *Individual Arrangement (IA)* antara Kementerian PPN/Bappenas dan USAID melalui perjanjian USAID-GOI *Assistance Agreement No. 497-AA-030 for the*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Wawancara dengan Perwakilan USAID pada tanggal 9 Oktober 2018 di Jakarta.

Achievement of a Stronger Indonesia Advancing National and Global Development, sebagai payung perjanjian kerja sama pembangunan antara Indonesia dan USAID.⁶⁶

Program USAID bagi Indonesia dibuat dalam *Country Development Cooperation Strategy* (CDCS) Indonesia, periode 2014–2018 yang mendasari perubahan pola kerja sama, dari model *donor-recipient* menjadi kemitraan (*partnership*). Keterlibatan USAID di KSS dijalankan melalui pembentukan *US-Indonesia Partnership for South-South Cooperation Component 1* (USIP 1 for SSTC). USIP 1 for SSTC bertujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan membantu pemerintah Indonesia menyiapkan kelembagaan pemerintah dalam transisi Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut memberikan bantuan (*country-self reliance*), termasuk dalam penyiapan untuk memiliki institusi formal untuk memberikan bantuan. Program KSS yang diunggulkan adalah pembuatan *Country Partnership Strategy* (CPS) bagi Timor Leste, sebagai program percontohan untuk pembuatan kerangka dalam pemberian bantuan dari Indonesia ke negara berkembang. Melalui penyusunan CPS untuk Timor Leste ini, Indonesia diharapkan mempunyai program KSS Indonesia yang lebih tepat dan mempunyai dampak yang signifikan baik bagi pembangunan Indonesia maupun Timor Leste sesuai dengan kapasitas Indonesia dan kebutuhan Timor Leste. Dalam hal ini USIP 1 for SSTC juga membantu dalam pelaksanaan program percontohan CPS untuk Timor Leste dan melakukan inisiasi pengembangan CPS bagi negara lainnya serta pelaksanaan program percontohan lainnya.⁶⁷



⁶⁶ Tim Kornas KSS Indonesia. *Kajian Akademik: Pembentukan “Single Agency” Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia*, Tim Kornas 2017.

⁶⁷ *Ibid*

Gambar 17. Rapat Konsultasi *Country Partnership Strategy* (CPS) dengan Kementerian Luar Negeri Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) 2018

Sumber: Dokumentasi USAID



Gambar 18. Rapat Konsultasi *Country Partnership Strategy* (CPS) dengan *Timor Aid* (NGO di RDTL) 2018

Sumber: Dokumentasi USAID

Selain itu, USAID juga mendukung pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan di bidang lain. Salah satunya adalah terkait isu pemberdayaan perempuan dengan nama program *Gender Responsive Planning and Budgeting* (GRPB) untuk negara Fiji. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Fiji dalam program pemberdayaan perempuan di segi perencanaan maupun penganggaran. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa pelatihan, *workshop*, dan magang dengan mitra utama dari Kementerian Urusan Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Fiji.



Gambar 19. Pemberian Pendampingan dalam Program Magang GRPB Fiji

Sumber: Dokumentasi USAID



Gambar 20. Pelatihan di Bidang Penanggulangan Bencana dengan Dukungan USAID

Sumber: Dokumentasi USAID

GIZ

Mitra pembangunan lain yang cukup terlibat adalah GIZ, GIZ sudah berada di Indonesia sejak 1958 dengan dukungan kerja sama yang dimulai pada 1970-an. Di samping klaster pertumbuhan inklusif, GIZ kini memfokuskan diri dalam klaster tata kelola pemerintahan yang baik dengan penyertaan *multi-stakeholder partnership*. Dalam perjalanannya, proyek awal GIZ di Indonesia adalah peningkatan kualitas di bidang pendidikan vokasi/kejuruan dalam pendampingan pendirian SMK Mikael di Solo. Dalam proyek tersebut, GIZ berperan mulai dari *trainer*, pembuatan model hingga konsep SMK di negara berkembang. Bidang kerja sama di bidang pendidikan vokasi/kejuruan tersebut sudah berlangsung puluhan tahun. Selanjutnya sejak 2010, GIZ menggulirkan program *Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET)*.⁶⁸

Implementasi program SED-TVET salah satunya adalah “*Workshop of Teaching Factory*” dengan peserta dari Myanmar yang dilaksanakan bekerjasama dengan Politeknik ATI Makassar pada tanggal 9–15 Maret 2017. Pelatihan ini merupakan suatu model pembelajaran yang *link* dan *match* dengan kebutuhan industri.

⁶⁸ Wawancara dengan Perwakilan GIZ pada tanggal di 3 Desember 2018 Jakarta.



Gambar 21. *Workshop Teaching Factory for Myanmar Participants* diadakan di Politeknik ATI Makassar dengan dukungan GIZ melalui program SED-TVET pada tanggal 9 Maret – 15 Maret 2017

Sumber: Dokumentasi Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia dan GIZ

IsDB

Dukungan IsDB dalam KSS Indonesia tergolong baru dan berbeda dari lembaga mitra pembangunan lainnya. Hal itu ditandai dengan MoU *on South-South Cooperation and Reverse Linkage* antara Pemerintah Indonesia melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Presiden IsDB pada tanggal 6 April 2013. IsDB memberikan dukungan melalui skema program yang disebut *reverse linkage*. Program *reverse linkage* ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan KSST untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah dalam membentuk dan mengembangkan kemitraan global yang lebih strategis untuk penguatan kerja sama pembangunan.



Gambar 22. Penandatanganan MoU *on South-South Cooperation and Reverse Linkage* antara Pemerintah Indonesia melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Presiden IDB Bandar Hajar pada tanggal 6 April 2013

Sumber: Dokumentasi IsDB

Skema tersebut berupa pelibatan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan kegiatan KSS. IsDB berperan sebagai fasilitator untuk menilai manfaat yang berwujud (*tangible benefits*) serta mempromosikannya ke sektor swasta.⁶⁹ Dukungan sektor swasta berupa investasi atau menjadi pasar dari produk hasil kerja sama. Dengan kata lain IsDB memberikan akses pasar kepada kedua belah pihak, baik negara pemberi maupun negara penerima. Salah satu contoh sukses adalah kerja sama antara Indonesia dengan Kyrgyzstan melalui program inseminasi buatan di BBIB Singosari. Wujud keberlanjutan dari kerja sama tersebut adalah dibangunnya pabrik industri atas kerja sama BBIB Singosari dan pihak Kyrgyzstan. Keberhasilan program ini tidak lepas dari manajemen yang baik atas BBIB Singosari oleh pemerintah Indonesia. Dengan program *reverse linkage* ini, pelaksanaan program KSS diharapkan mampu memberi manfaat ekonomi dan menjadi contoh terbaik (*best practice*) pemanfaatan KSS untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.⁷⁰ Pada akhir tahun 2017, IsDB telah menandatangani MoU dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melaksanakan program *reverse linkage* di 13 sektor lain.



Gambar 23. *Training on Reproduction Disorder Control* dan Peluncuran Ekspor Semen Beku ke Kyrgyzstan dengan dukungan IsDB pada tanggal 17 Januari – 6 Februari 2016 di BBIB Singosari, Malang.

Sumber: Dokumentasi IsDB

⁶⁹ Wawancara dengan Perwakilan IsDB pada tanggal 18 September 2018 di Jakarta

⁷⁰ Tm Kornas KSS Indonesia, 2017.

BAB 4:

PENCAPAIAN KSS INDONESIA: MEMBANGUN DUNIA YANG LEBIH BAIK

Peran aktif Indonesia dalam program-program KSS seperti yang telah dipaparkan di bab 3 memberikan bukti nyata komitmen Indonesia dalam mendorong pembangunan negara-negara Selatan. Indonesia juga secara serius menggarap program KSS ini melalui perumusan program unggulan yang dapat dibagikan kepada negara-negara Selatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (*demand driven*). Pelibatan berbagai aktor, termasuk mitra pembangunan, menjadi salah satu strategi dalam mengoptimalkan program KSS Indonesia, baik dari sisi jangkauan wilayah maupun ragam program yang ditawarkan.

Kontribusi KSS Indonesia yang signifikan mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan yang diberikan oleh PBB (UNESCAP dan UNOSCC) pada tahun 2018 dalam rangka hari peringatan “*Regional Commemoration of the United Nations Day for South-South Cooperation*.” Penghargaan ini menjadi pendorong bagi Indonesia untuk melanjutkan peran yang signifikan dalam membantu pembangunan di negara-negara berkembang dengan misi berbagi pengalaman pembangunan Indonesia sebagai *best practices*.

Dalam rangka memperkuat gambaran tersebut, bab ini akan fokus pada capaian KSS Indonesia dengan memfokuskan pembahasan pada tiga hal utama, yaitu penguatan solidaritas Selatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi negara berkembang, dan tata kelola yang lebih baik. Capaian dalam ketiga hal ini merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembentukan KSS yang didasari oleh spirit KAA dan konstitusi RI, yaitu membentuk dunia yang damai, adil dan makmur.

4.1. Penguatan Solidaritas Selatan

Indonesia melahirkan beberapa gagasan penting dalam perkembangan KSS yang menjadi momentum penguatan semangat solidaritas Selatan. Hal ini terealisasi melalui beberapa program kerja sama baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral yang merupakan inisiasi Indonesia, antara lain: (1) Solidaritas Selatan terhadap Kemerdekaan

Palestina, (2) Pembentukan NAM CSSTC, (3) *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP), dan (4) *Indonesia-Africa Forum* 2018.

Sepanjang sejarah sejak Republik Indonesia berdiri, isu kemerdekaan Palestina menjadi agenda penting yang terus diperjuangkan Indonesia. Realitas ini terlihat ketika Indonesia mendorong isu Palestina sebagai salah satu bahasan kunci dalam KAA tahun 1955. Negara-negara KAA pun menyatakan dukungannya terhadap hak-hak Palestina.⁷¹ Bahkan, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan hutang sejarah bagi negara-negara Asia Afrika yang telah merdeka.

“Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat perjuangan untuk Palestina.”

Boks 10. Pernyataan Menlu RI Retno Marsudi

Sumber: Pernyataan Pers Tahunan Menlu tahun 2019

Solidaritas Indonesia terhadap Palestina didasarkan kepada beberapa hal. Pertama, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian tidak terpisahkan dari amanat konstitusi UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ...” (alinea I) dan di dalam frase “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” (alinea 4). Kedua, ada hubungan historis antara Indonesia dengan Palestina ketika Palestina memberikan dukungan dan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh *mufti* Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini.⁷² Ketiga, bahwa Palestina merupakan satu-satunya negara yang belum mencapai kemerdekaan penuh dari 29 negara peserta KAA tahun 1955. Keempat, bahwa pendirian forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 25 September 1969 tidak terlepas dari bentuk

⁷¹ Siaran Pemerintah Djam 20.05 tanggal 4 Mei 1955 tentang Masalah Palestina dalam Hubungannya dengan KAA, dalam “Siaran Pemerintah dari Kementerian Penerangan Terbitan Terbitan No. 166, 167, 172, 174, 177, 180, 183, 189, 190, 195, 198 tanggal 29 April 1955 sampai dengan 18 Mei 1955 mengenai jalannya acara dan hasil KAA”, 28 April 1955, Inventaris Arsip Djamal Marsudi (1947-1979), No.120, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

⁷² M. Zein Hassan, Lc. Lt. “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri: Perjuangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm 157

solidaritas terhadap Palestina.⁷³ Kelima, Indonesia secara konsisten sejak 1955 menolak penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dengan tidak pernah mengakui dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Komitmen Indonesia terhadap solidaritas kemerdekaan Palestina tertuang dalam beberapa strategi: (1) Dukungan terbentuknya negara Palestina sebagai negara merdeka; (2) Dukungan dalam bentuk *capacity building* agar Pemerintah Palestina dapat menjalankan fungsinya sebagai pemerintah negara merdeka; (3) Dukungan agar status Palestina sebagai negara mendapatkan pengakuan penuh oleh dunia dan masyarakat internasional; (4) Menggalang dukungan internasional untuk menekan Israel guna mengakhiri kolonisasi Palestina.⁷⁴

Wujud nyata dukungan Indonesia terlihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah deklarasi kemerdekaan di Aljazair pada tanggal 15 November 1988. Selain itu, Indonesia menerima penugasan Duta Besar Palestina pertama untuk Indonesia pada tahun 1990, mengakreditasi Duta Besar RI di Tunisia yang merangkap negara Palestina serta sejak 2004 Palestina menjadi wilayah akreditasi rangkapan KBRI Amman, Yordania. Lebih lanjut, pada 13 Maret 2016 Indonesia meningkatkan keterwakilan Pemerintah RI di Palestina dengan bentuk pengangkatan Konsul Kehormatan RI di Ramallah Maha Abu Shusheh.⁷⁵

Adapun dalam perkembangannya, bentuk dukungan Indonesia dilakukan melalui program peningkatan kapasitas sebagai bagian dari kerja sama teknis KSS Indonesia. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 di antaranya pelatihan 1.000 orang Palestina selama 5 tahun pertama (2008–2013) dalam kerangka NAASP. Kegiatan ini terus berlanjut hingga pada November 2018 tercatat 1.914 orang Palestina telah menerima mandat dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sebanyak 173 pelatihan. Pada 2018, Indonesia memberikan pelatihan untuk Palestina di bidang *microfinance* (25–28 Maret

⁷³ Konflik Arab-Israel yang memanas di Timur Tengah dan dipicu juga dengan adanya peristiwa pembakaran mimbar Masjid Al Aqsha oleh seorang ekstrimis Yahudi Cohen serta pendudukan wilayah Palestina dan Yerusalem oleh Israel menjadi pemicu bagi terbentuknya Organisasi Konferensi Islam di Rabat, Maroko pada 29 Agustus 1969. Salah satu tujuan OKI adalah menghapus kolonialisme dan membantu rakyat Palestina meraih hak dan kemerdekaan tanah airnya.

⁷⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Isu Palestina", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx> pada tanggal 15 Januari 2019.

⁷⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Hubungan Bilateral Indonesia–Palestina", diakses dari <https://www.kemlu.go.id/amman/id/Pages/Palestina.aspx> pada tanggal 15 Januari 2019.

2018) dan usaha kecil, mikro dan menengah pada 17–21 November 2018 yang dilaksanakan di Amman, Yordania.

Selain dalam kerangka NAASP, Indonesia juga mendorong inisiatif kerja sama negara–negara Asia Tenggara dan Asia Timur yang tercermin pada partisipasi Indonesia dalam penyelenggaraan “*Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)*”. Dalam kerangka CEAPAD, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Ministerial Meeting (MM)* CEAPAD II di Jakarta pada 1 Maret 2014, serta tuan rumah *Senior Official Meeting (SOM)* CEAPAD pada 31 Mei 2018. Dalam penyelenggaraan MM CEAPAD III di Bangkok pada 27 Juni 2018 Indonesia menyampaikan komitmen bantuan peningkatan kapasitas untuk Palestina senilai USD 2 juta selama 2019–2021 dalam kerangka CEAPAD.⁷⁶

Salah satu program yang berjalan melalui CEAPAD adalah program “*Training on Sustainable Fish Farming through the Adoption of Artificial Insemination*” pada 5–25 Februari 2019. Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi teknik inseminasi buatan dan program pembibitan bagi para peserta dari Kementerian Pertanian Palestina. Program ini dilakukan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan BBIB Singosari dengan dukungan JICA.⁷⁷

⁷⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Berikan 2 Juta Dollar Program Penguatan Kapasitas untuk Palestina”, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Berikan-2-Juta-Dollar-Program-Penguatan-Kapasitas-untuk-Palestina.aspx> pada tanggal 25 Februari 2019.

⁷⁷ JICA, “*Palestine-Indonesia-Japan Triangular Cooperation – Sustainable Fish Farming through the Adoption of Artificial Insemination*”, diakses dari <https://www.jica.go.jp/indonesia/english/office/topics/190208.html> pada tanggal 25 Februari 2019.



Gambar 24. *Training on Sustainable Fish Farming through the Adoption of Artificial Insemination* pada 5–25 Februari 2019 melalui skema CEAPAD.

Sumber: JICA

Kerangka CEAPAD merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam membangun solidaritas terhadap Palestina. Komitmen ini diwujudkan dengan membangun kerja sama dengan negara-negara lain untuk bersama aktif memberikan perhatian secara serius dalam isu Palestina atas inisiasi yang dilakukan oleh Indonesia.

Solidaritas Indonesia terhadap Palestina terus dilakukan Indonesia dengan berbagai upaya. Indonesia berkomitmen memberikan peningkatan bantuan kepada Palestina dengan penandatanganan *MoU* Pembentukan Komisi Bersama RI–Palestina, dan bantuan kepada Palestina dengan melibatkan lembaga masyarakat seperti Badan Amil Zakat Nasional, Forum Rektor Indonesia, dan Universitas Padjajaran. Partisipasi berbagai elemen masyarakat seperti dalam penyelenggaraan “*Solidarity Week for Palestine*” (lihat Gambar 25) menunjukkan komitmen bangsa Indonesia terhadap isu Palestina yang tidak pernah berhenti.



Gambar 25. Forum untuk Palestina: *Solidarity Week for Palestine*, Bandung pada 13–17 Oktober 2018.

Sumber: Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI⁷⁸

Dalam rangkaian solidaritas Selatan tersebut, kehadiran NAM CSSTC menjadi salah satu media nyata untuk membantu pembangunan di negara–negara Selatan. Sebagai salah satu bentuk inisiatif Indonesia dalam membangun kemitraan negara–negara Selatan, NAM CSSTC merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting untuk dicatat. Inisiatif Indonesia dalam Konferensi GNB ke–11 di Cartagena, Kolombia pada tahun 1995 berbuah langkah konkret dari pertalian Indonesia bersama negara–negara Selatan untuk meningkatkan solidaritas melalui kerja sama teknik.⁷⁹ Keberadaan NAM CSSTC merupakan *landmark* Indonesia dalam kerja sama teknik negara berkembang.⁸⁰

Indonesia saat ini merupakan satu–satunya kontributor bagi NAM CSSTC. Komitmen Indonesia terhadap NAM CSSTC sebagai salah satu elemen *soft–power* Indonesia

⁷⁸ “*Solidarity Week for Palestine*: Tidak Pernah Padam, Dukungan Indonesia Bagi Perjuangan Palestina”, diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Solidarity-Week-for-Palestine.aspx> pada tanggal 25 Februari 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan Duta Besar Wawancara dengan Duta Besar Ronny P. Yuliantoro, Direktur NAM CSSTC & Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri (menjabat sejak Juli 2017), pada tanggal 5 November 2018 di Jakarta.

⁸⁰ Wawancara dengan Achmad Rofi’e, Mantan Asisten Direktur NAM CSSTC pada tanggal 23 Oktober 2018 di Surakarta, Jawa Tengah.

menunjukkan bahwa prinsip multilateralisme merupakan elemen penting dalam kerja sama internasional. Sejak awal berdirinya hingga kini tercatat NAM CSSTC telah menjalankan 101 program kegiatan dengan melibatkan juga mitra pembangunan.⁸¹

Tak hanya itu, pada tahun 2005, Indonesia melalui forum bersama negara-negara Asia Afrika mendorong kemitraan pembangunan untuk menciptakan solidaritas kawasan.⁸² Kemitraan yang dibangun melalui kerangka NAASP termaktub dalam tiga pilar utama: (1) Solidaritas Politik, (2) Kerja sama Ekonomi dan Hubungan Sosial Budaya, dan (3) Kerja sama antar-organisasi regional/sub-regional serta antar-masyarakat (*people-to-people contact*).

Sejak 2005, Indonesia bersama dengan Afrika Selatan menjadi ketua bersama NAASP. Pada periode 2006–2011, Indonesia telah berhasil melaksanakan 26 program di bawah NAASP diantaranya adalah NAASP-UNEP *Workshop on Environmental Law and Policy* tahun 2006, *Asian African Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* pada tahun 2007, dan *Apprenticeship Program for Mozambican Farmers* pada tahun 2010. NAASP juga menginisiasi NAASP *Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* tahun 2008 yang diadakan di Indonesia.⁸³

⁸¹ Penjelasan NAM CSSTC sebelumnya sudah dijelaskan di Bab 2 dalam Boks 6.

⁸² Partisipasi aktif Indonesia dalam kemitraan Asia dan Afrika sebenarnya sudah dijalin sebelum keberadaan NAASP 2005. Salah satu bentuk Indonesia aktif berperan dalam 1st *Tokyo International Conference on African Development* (TICAD) 1993 untuk membangun masa depan Afrika.

⁸³ “Kerjasama Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP)” diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/NAASP.aspx> pada tanggal 28 Januari 2019.



Gambar 26. Kegiatan NAASP: Pelatihan *Project Cycle* oleh Kementerian PUPR untuk Aparat Palestina pada Juli 2011.

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum RI⁸⁴

Melalui Kementerian PU dan Kementerian Luar Negeri RI pada tahun 2011 diselenggarakan Pelatihan *Project Cycle* untuk pelaku infrastruktur Palestina dengan judul *Training On Project Cycle (Planning, Appraisal, and Management of Infrastructure Projects) for the Officials of Palestine* (Gambar 23). Program ini merupakan kelanjutan dari NAASP *Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* di tahun 2008.⁸⁵

Hal penting dari keberadaan NAASP adalah menjadi jalan solidaritas bagi Palestina disebabkan Palestina menjadi satu-satunya peserta KAA 1955 yang belum mendapatkan kemerdekaan penuh. Kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas menjadi fokus bagi Palestina.

Dalam perkembangannya, pada peringatan 60 tahun KAA yang dilakukan pada tanggal 22 April 2015 dibentuk *Asia-Africa Forum*. Hal ini menandai keberadaan KAA sebagai inspirasi dan semangat perjalanan KSS. Dalam pidato pembukaannya, Presiden RI Joko Widodo

⁸⁴ Kementerian Pekerjaan Umum RI, "Indonesia Berikan Pelatihan Project Cycle Untuk Palestina" diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/view/6641/indonesia-berikan-pelatihan-project-cycle-untuk-palestina> pada tanggal 28 Januari 2019.

⁸⁵ *Ibid.*

menegaskan mengenai posisi sejajar antara negara-negara Asia dan Afrika. Semangat inilah yang sejak inisiasi KAA terus dijalankan dan dipertahankan. Membentuk dunia yang lebih baik tidak dilakukan dengan pola pikir *patron-client*, tetapi dengan semangat kepemimpinan kolektif (*collective-leadership*).⁸⁶

Kemudian, Presiden Joko Widodo menegaskan Semangat Bandung (*Bandung Spirit*) yang tertuang dalam 10 prinsip Dasasila Bandung secara umum menegaskan tiga poin utama. Pertama, kesejahteraan (*prosperity*). Kesejahteraan dapat didorong dengan kerja sama secara intensif untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan mengembangkan ilmu dan teknologi serta membuka lapangan pekerjaan. Kedua, solidaritas. Solidaritas kini lebih ditekankan dengan peningkatan perdagangan dan investasi melalui kerja sama ekonomi yang semakin diperkuat. Ketiga, stabilitas internal dan eksternal serta menghormati hak azasi manusia. Hal-hal inilah yang kembali menjadi semangat dalam pertemuan Konferensi Asia Afrika di tahun 2015 dengan mengembalikan kembali semangat yang telah dibangun pada KAA 1955.



Gambar 27. Konferensi Asia-Afrika 2015

Sumber: Dokumentasi Tim Koordinasi Nasional KSS Indonesia dan USAID

⁸⁶ "Opening Statement Joko Widodo, President Of The Republic Of Indonesia At The Asian-African Summit 2015, Jakarta, 22 April 2015" diakses dari <https://setkab.go.id/opening-statement-joko-widodo-president-of-the-republic-of-indonesia-at-the-asian-african-summit-2015-jakarta-22-april-2015/> pada tanggal 25 Februari 2019

Peran Indonesia dalam konteks penguatan solidaritas Selatan juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pembangunan di kawasan Afrika. Disadari bahwa kerja sama dengan Afrika memberikan potensi baru bagi hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Pada 2010, *McKinsey Global Institute* memandang Afrika sebagai “*lions on the move*”. Pertumbuhan GDP Afrika antara tahun 2000–2010 mencapai 5,4% tetapi mengalami penurunan ke 3,3% pada periode 2010–2015. Penurunan tersebut merupakan imbas dari gejolak yang ada di wilayah utara Afrika yang sering dikenal dengan peristiwa *Arab Spring* pada 2011. Namun, catatan *World Economic Forum* menunjukkan 3 tren positif Afrika: (1) Afrika merupakan benua dengan tingkat populasi usia muda cukup tinggi (usia kerja) di mana pada 2034 Afrika diharapkan memiliki 1,1 milyar populasi usia kerja. (2) Afrika masih mengalami urbanisasi dan masih memiliki manfaat ekonomi ke depan. (3) Ekonomi Afrika berada pada posisi yang baik untuk mengambil manfaat dari era perubahan teknologi yang terjadi saat ini.⁸⁷

Dengan latar belakang tersebut, forum kemitraan untuk menjembatani hubungan strategis antara Indonesia dan Benua Afrika dibentuk melalui *Indonesia–Africa Forum (IAF) 2018*. Forum ini dimulai dengan kesepakatan kesepakatan bisnis senilai USD 586,56 juta dan diakhiri dengan tambahan kesepakatan bisnis sebesar USD 499,2 juta serta 11 *business announcement* dengan potensi sebesar USD 1,3 Milyar.⁸⁸ Forum IAF diharapkan dapat mendorong diplomasi ekonomi yang dibangun Indonesia dan sejumlah negara Afrika. Hubungan yang dibangun pun mengalami transformasi dari sejak 1955 yang dimulai lebih kepada semangat solidaritas antar-bangsa sebagai negara-negara yang berdaulat menuju kerja sama dalam upaya meningkatkan kemakmuran bersama.⁸⁹

Keberadaan IAF merupakan inisiatif Indonesia dalam intensitas menjalin hubungan dengan Afrika secara lebih serius setelah sukses dengan keberadaan forum NAASP dan peringatan 60 tahun KAA pada 2015. IAF 2018 yang bertema “*Developing Sustainable Economic and Investment Cooperation*” dihadiri 575 delegasi yang terdiri dari delegasi pemerintah dan pebisnis dari 47 negara Afrika dan memberikan sinyal kuat bahwa IAF merupakan pintu

⁸⁷ Leke Acha dan Dominic Barton, “*3 Reasons Things are Looking Up for African Economies*”, diakses dari <https://www.weforum.org/agenda/2016/05/what-s-the-future-of-economic-growth-in-africa/> pada tanggal 20 Januari 2019.

⁸⁸ “Hasil Konkret IAF 2018: Penguatan Kemitraan Indonesia–Afrika” diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Hasil-Konkrit-IAF-2018-Penguatan-Kemitraan-RI-Afrika.aspx> pada tanggal 18 Januari 2019 dan “Hasil Forum Indonesia Afrika”, diakses dari <https://www.antaraneews.com/foto/700486/hasil-forum-indonesia-afrika> pada tanggal 18 Januari 2019.

⁸⁹ “*What is The Indonesia Africa Forum?*” diakses dari <https://iaf.kemlu.go.id/> pada tanggal 18 Januari 2019.

gerbang bagi kerja sama strategis lainnya yang akan dibangun oleh Indonesia dan negara-negara Afrika di masa mendatang.



Gambar 28. Indonesia–Africa Forum 2018

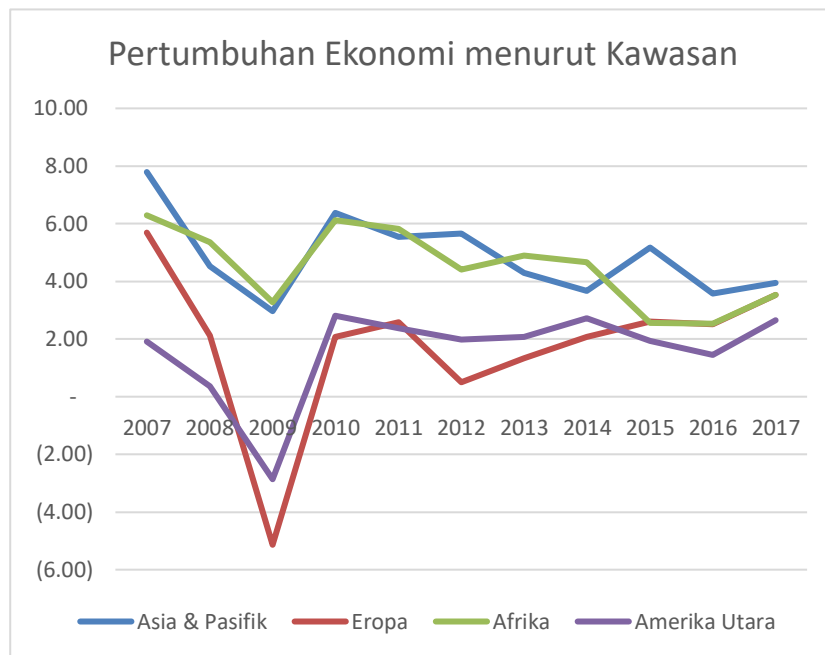
Sumber: Dokumentasi Indonesia–Africa Forum 2018⁹⁰

4.2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Negara Berkembang

Salah satu motivasi kerja sama antarnegara adalah motivasi ekonomi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan setara. Hal ini juga yang melandasi program KSS Indonesia yang tidak hanya terfokus pada persoalan solidaritas secara politik melainkan juga ditujukan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi tidak hanya dengan negara maju namun juga di antara negara berkembang. Oleh karena itu, penting bagi sesama negara berkembang untuk bersinergi dan bekerja sama meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembangunan ekonominya agar dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan mengejar ketertinggalan dari negara maju. KSS menjadi salah satu bentuk sinergi yang diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan pembangunan yang menjadi isu utama sejak pasca Perang Dunia Kedua.

⁹⁰ Data diakses dari <https://iaf.kemlu.go.id/gallery/photo> pada tanggal 19 Januari 2019

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Grafik 8, dapat dilihat bahwa persentase tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan Afrika sejak 2007 menunjukkan tren yang lebih positif dibandingkan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara-negara Selatan sampai tahun 2017 cukup menjanjikan.



Grafik 8. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kawasan

Sumber: World Bank

Namun, jika melihat kinerja pembangunan manusia dan ekonomi berdasarkan wilayah di Tabel 2, terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara negara-negara Utara (Eropa dan Amerika Utara) dengan negara-negara Selatan (Afrika, Asia Pasifik, dan Amerika Latin). Negara-negara Utara cenderung memiliki *Gross National Income* (GNI) yang relatif tinggi, namun dengan pertumbuhan yang relatif lambat. Sementara negara-negara Selatan memiliki GNI yang belum tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jika dilihat dari kualitas pembangunan manusia, negara-negara Utara (Amerika Utara dan Eropa) memiliki nilai yang tinggi pada *Human Development Index* (HDI), sementara negara-negara Selatan memiliki nilai HDI yang lebih rendah. Bahkan nilai HDI Afrika hanya 0.52. Dari indikator-indikator ini terlihat jelas bahwa ada ketimpangan dalam hal pembangunan ekonomi dan manusia antara negara Utara dan negara Selatan.

Namun demikian, terdapat juga ketimpangan yang cukup signifikan di antara negara-negara berkembang. Sebagai contoh, indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa

ketika negara-negara berkembang di Asia Pasifik dan Timur Tengah mampu menunjukkan pertumbuhan di atas 3% per tahun, negara-negara di Afrika hanya tumbuh sebesar 2.58%. Bahkan, Amerika Latin hanya tumbuh 1.88%. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam hal pembangunan manusia. Hal ini juga senada jika dibandingkan dengan data pertumbuhan pada Grafik 8. Dalam hal HDI, jika negara-negara selatan di wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin memiliki angka HDI antara 0,72 hingga 0,73, maka di wilayah Afrika angka HDI hanya 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara negara-negara Selatan dalam proses pembangunan manusia dan ekonomi.

Tabel 2. Perbandingan rata-rata Kinerja Ekonomi dan HDI berdasarkan Wilayah tahun 2016

<i>Region</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	<i>GNI PPP</i>	<i>Persentase Investasi Terhadap PDB</i>	<i>HDI</i>
Asia & Pacific	3.57	1,719,168,616,652	28.43	0.72
Europe	2.47	677,463,647,280	21.63	0.86
Arab States	3.08	371,570,713,326	29.86	0.72
Africa	2.58	93,791,745,365	22.36	0.52
South/Latin America	1.88	388,732,836,922	24.84	0.73
North America	1.45	10,286,290,000,000	21.45	0.92
Global South	2.70	584,062,404,615	25.68	0.64
Global North	2.58	1,294,706,119,866	21.65	0.88

Sumber: World Bank dan UNDP, diolah

Dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya melalui ekspansi dan promosi yang progresif atas program-program KSS yang telah dilakukan secara rutin sejak tahun 1980an. Reorientasi program KSS sebagai bagian diplomasi ekonomi di samping diplomasi politik membuat pemerintah Indonesia telah meningkatkan variasi dari jenis-jenis program KSS yang ditawarkan ke negara mitra untuk menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi di negara-negara Selatan.

Seperti yang telah dijelaskan di awal buku ini, berbagai inisiatif telah dilakukan dalam upaya membangun kerja sama ekonomi antarnegara Selatan. KSS Indonesia, misalnya, memusatkan perhatian pada hubungan dagang dan investasi dalam kerja sama ekonomi. Beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan tahun 1997, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tahun 1999, dan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kepulauan Fiji mengenai Bantuan Pinjaman di Bidang Kerja sama Pertanian tahun 2004.⁹¹ Tercapainya kesepakatan ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menginisiasi kerja sama ekonomi antar negara berkembang berlandaskan prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Indonesia juga aktif terlibat dalam skema kerja sama regional dan internasional baik yang berbentuk preferensi yang bertujuan untuk mengurangi tarif perdagangan, maupun non-preferensi, yang lebih diarahkan pada kerja sama antarprodusen komoditas primer di antara negara-negara berkembang. Model kerja sama preferensi dapat dilihat pada kerja sama ekonomi di ASEAN, *Global System of Trade Preferences (GSTP)*-UNCTAD, *Preferential Trade Agreement (PTA) among Developing 8 (D-8) Member States*, dan *Framework Agreement on Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference (OKI)*.⁹² Sementara itu, kerja sama nonpreferensi negara-negara antara lain *Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)* yang beranggotakan China, India, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand; *International Pepper Community (IPC)* dengan anggota Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam; dan *Asia and Pasific Coconut Community (APCC)* yang beranggotakan Micronesia, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Marshall Island, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu, Vietnam, Samoa, dan Kiribati; dan *Tripartite on Rubber Cooperation among Thailand, Indonesia, and Malaysia*.⁹³

Sementara itu, dalam kaitan dengan kerja sama teknis KSS Indonesia, tercatat bahwa tiga sektor ekonomi yang paling sering dilaksanakan yaitu sektor pertanian, perikanan, kehutanan dengan 286 kegiatan, kemudian sektor Pendidikan dan Budaya dengan 234

⁹¹ Syamsul Hadi, et.al., *Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan*, (Jakarta: JICA), 2000, hlm. 83.

⁹² Herry Soetanto, "Kerjasama Selatan-Selatan Terkait Masalah Perdagangan (Sebuah Catatan)", *handout* yang dikeluarkan dalam Seminar *Mencari Modalitas Baru Kerjasama ECDC: Tindak Lanjut*, diadakan oleh BPPK Deplu RI, pada tanggal 3 Desember 2009, *Ibid*. hlm. 83.

⁹³ *Ibid*, hlm. 84.

kegiatan, serta sektor Infrastruktur publik dengan 172 kegiatan. Pada sektor pertanian dan infrastruktur publik, bentuk bantuan yang diberikan adalah pelatihan dan pengiriman tenaga ahli di bidang tersebut. Sedangkan, pada sektor pendidikan dan budaya, bantuan yang diberikan paling banyak berbentuk beasiswa.



Gambar 29. Program *International Training on Agriculture for African Countries* yang dilaksanakan pada Maret–Mei 2017. Pelatihan ini merupakan bentuk bantuan teknis Indonesia berupa *capacity building (training, workshop)* di bidang budidaya padi, produk hortikultura, peternakan, maupun perikanan

Sumber: Tim Kornas KSS dan mitra pembangunan

Dalam bidang pertanian dalam arti luas, KSS Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan internasional bagi peserta dari berbagai negara berkembang seperti *International Training Course on Artificial Insemination for Dairy Cattle* di tahun 2007, *International Training Program on Intensive Shrimp Culture for Asian Countries* di tahun 2009, *Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle for Developing Countries* di tahun 2010, *International Training Program for African Countries on Marine Fish* di tahun 2011, *International Training Workshop on Water Management for African Union Countries* 2013, dan *Training on Frozen Semen Handling and Semen Production* di tahun 2015 yang diselenggarakan oleh berbagai *center of excellence* seperti BBIB Singosari, Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) di Jepara dan Situbondo, serta Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bali milik Kementerian Pertanian. Selain pelatihan, Indonesia juga memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Alat dan mesin pertanian (*Rice Milling*,

Traktor Tangan) ke Fiji tahun 2004, ke Vanuatu di tahun 2006, ke Tanzania, Sudan, Gambia, Tonga, Samoa, Laos, dan Timor Leste di tahun 2007 dan ke Myanmar, Kamboja dan Papua Nugini di tahun 2009.

Dari berbagai kegiatan diatas capaian Indonesia yang paling terlihat adalah dalam program inseminasi buatan. Melalui program ini telah banyak diberikan pelatihan inseminasi buatan untuk pengembangan peternakan sapi di negara berkembang. Tidak hanya itu, permintaan terhadap produk semen beku Indonesia juga meningkat.⁹⁴ Sementara itu, di bidang pertanian, capaian KSS Indonesia juga dapat dikaitkan dengan pengembangan pertanian di beberapa negara berkembang dengan menggunakan traktor tangan. Program mekanisasi pertanian menarik minat banyak negara terutama dari kawasan Pasifik dan Afrika.

Kedua program tersebut setidaknya mengindikasikan dua capaian. Capaian pertama bagi negara penerima manfaat, menunjukkan bahwa terjadi transfer pengetahuan yang mendorong negara penerima manfaat untuk untuk mengembangkan pertanian dan peternakan sapi dengan metode yang telah dijalankan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kyrgyztan yang menggunakan program inseminasi buatan ini sejalan dengan prioritas pemerintahnya dalam sektor keamanan dan ketahanan pangan. Contoh lainnya adalah berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan pada tahun 2016 atas bantuan program inseminasi buatan yang diberikan ke Timor Leste di periode 2007–2015, tercatat bahwa terdapat 30 persen sapi betina yang teridentifikasi hamil dari hasil program tersebut.⁹⁵ Hal ini menunjukkan keberhasilan program Indonesia dalam mendukung kesejahteraan peternak sapi dan ketahanan pangan di Timor Leste.⁹⁶ Capaian kedua, yaitu potensi ekonomi yang muncul dari kegiatan tersebut yang tidak hanya membawa manfaat bagi pemerintah kedua negara namun juga pihak swasta yang terlibat.

Sedangkan bidang lainnya yang erat dengan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Program KSS Indonesia di bidang infrastruktur banyak dilakukan bagi negara Timor Leste, Fiji, Afghanistan, dan Palestina. Program KSS sektor infrastruktur di Timor Leste antara lain adalah pelatihan *Road Reconstruction and Rehabilitation* dan *Capacity Development Project on Road Maintenance*. Selain itu, dilakukan seminar *Terminal Evaluation program Capacity*

⁹⁴ Wawancara dengan Perwakilan Bappenas RI, tanggal 26 September 2018 dan Wawancara dengan Perwakilan IsDB tanggal 18 September 2018.

⁹⁵ Strengthening of the Artificial Insemination as the Tool to Achieve Food Security in the Republic Democratic of Timor Leste, diakses dari <https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/211-strengthening-of-the-artificial-insemination-as-the-tool-to-achieve-food-security-in-the-republic-democratic-of-timor-leste> pada tanggal 25 Februari 2019.

⁹⁶ *Ibid.*

Development Project on Road Maintenance. Pelatihan lainnya adalah pelatihan teknik pompa air bersih dan pelatihan pengolahan air limbah. Di samping itu, melalui program KSS, Pemerintah Indonesia juga mengirimkan 34 orang tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait bangunan. Selain itu, program KSS ke Fiji di bidang infrastruktur lebih diarahkan ke tata ruang perkotaan, sedangkan program KSS ke Afghanistan difokuskan ke pelatihan pembangunan infrastruktur khususnya *Road Operation and Maintenance*. Selain itu, program KSS ke Palestina lebih ditekankan ke pelatihan siklus proyek dan pembangunan infrastruktur.



Gambar 30. Program kegiatan pelatihan *International Training on Infrastructure for Palestinians*, 3–13 Juli 2017 di Bandung, Jawa Barat oleh PUPR

Sumber: Tim Kornas KSS dan mitra pembangunan

Di bidang infrastruktur, capaian KSS Indonesia dapat diindikasikan dari dukungan Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur di Timor Leste yang sejalan dengan *Strategic Development Plan* Pemerintah Timor Leste 2011–2030. Pengembangan infrastruktur juga diarahkan dalam rangka mempermudah mobilisasi barang dan jasa. Tidak hanya itu, pelatihan SDM yang diberikan juga sekaligus mendukung program Pemerintah Timor Leste dalam meningkatkan kualitas SDM.

Selain itu, terdapat kegiatan KSS dalam bentuk *sharing knowledge* melalui seminar dan pelatihan internasional yang bertujuan untuk membagikan pengalaman dan kesuksesan ke

negara-negara berkembang lainnya di bidang-bidang yang terkait dengan pembangunan ekonomi seperti *International Training Course on Poverty Reduction through Rural Development* di tahun 2003, *International Workshop on Women Empowerment in Economic Development: Promoting Womens Productivity* di tahun 2008, *International Training Program on Business Incubator to Develop Small and Medium Enterprises Focusing on Creative Industry* di tahun 2010, *Entrepreneurship Boot Camp: International Workshop on Entrepreneurship for Asia Pacific* di tahun 2015 and 2017, *Capacity building Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry* di tahun 2016, dan *International Training on Ecotourism for Pacific Countries* di tahun 2017.

Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam sektor ekonomi namun juga dalam memperkuat *people to people contact* sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas dan semangat berbagai diantara negara-negara Selatan. KSS Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga solidaritas dan semangat tersebut.

4.3. Pengembangan Kapasitas dan Tata Kelola yang Lebih Baik

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan untuk menjalankan tata kelola yang baik adalah kunci keberhasilan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab. Kualitas SDM tersebut sangat ditentukan oleh proses pendidikan, tingkat kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang akan melaksanakan tugas pembangunan.

Dalam program peningkatan kapasitas dan tata kelola yang baik, sejumlah K/L menjadi *focal point* dalam implementasi program KSS Indonesia. Beberapa K/L menjadi perhatian dalam melihat capaian Indonesia dalam bidang ini. Program peningkatan kapasitas dan tata kelola yang baik di antaranya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). BKKBN mewakili institusi yang selama ini melaksanakan program unggulan, yaitu program Keluarga Berencana. Sementara itu, Kemendikbud berperan sebagai institusi yang memfokuskan kegiatan pada peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Di samping itu, program KSS juga melingkupi isu keamanan perbatasan dan polisi air.

BKKBN aktif terlibat dalam KSS sejak tahun 1990-an. Hal ini sejalan dengan keberhasilan Program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh BKKBN pada masa itu. Dalam kesuksesan tersebut, Indonesia aktif berbagi ilmu kepada negara-negara berkembang lain, khususnya yang masih menghadapi masalah kependudukan. Kegiatan yang diadakan berupa kegiatan yang bertujuan untuk berbagi ilmu dan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, seminar, *workshop*, *study tour*, dan magang.

Tercatat BKKBN telah aktif dalam kegiatan KSS sejak tahun 1989 hingga tahun 2017 dengan total kegiatan lebih dari 100 kegiatan. Topik yang paling sering diangkat adalah mengenai kesehatan reproduksi dalam kaitannya dengan keluarga berencana. Negara-negara peserta umumnya berasal dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia Selatan, dan Pasifik. Hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana Indonesia yang menjadi acuan berbagai negara-negara berkembang di dunia. Total peserta dalam program tersebut tercatat sebanyak 437 peserta. Kebanyakan peserta merupakan pegawai pemerintahan dengan harapan melalui kegiatan yang dilakukan akan terjadi perbaikan pengelolaan di bidang kependudukan. Selain itu, peserta juga berasal dari unsur pemimpin agama dan pemuda remaja masjid, khususnya di tahun 2016 dan 2017. BKKBN bersama UNFPA mengadakan pelatihan mengenai keluarga berencana kepada pemimpin agama Islam di Filipina.⁹⁷



Gambar 31. *Training Course on Population, Family Planning, and Family Development* pada Oktober 2014 Dalam bidang Keluarga Berencana, BKKBN memberikan *capacity building* kepada *General Office for Population Family Planning (GOPFP) Vietnam*

Sumber: Tim Kornas KSS dan mitra pembangunan

⁹⁷ Data didapatkan dari data BKKBN

Kemudian dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Indonesia melalui Kemendikbud berkontribusi dengan memberikan bantuan berupa beasiswa bagi negara Selatan-Selatan. Tiga jenis beasiswa yang tiap tahun diberikan bahkan sejak tahun 2000-an awal adalah Program Pascasarjana dalam Kerangka KSS, Program Darmasiswa RI, dan Beasiswa Seni Pendidikan dan Budaya. Selain dari peningkatan kapasitas SDM, program beasiswa ini juga ditujukan untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Peserta kebanyakan berasal dari negara-negara Pasifik, yaitu Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.

Selain itu, terdapat beberapa program beasiswa yang diberikan secara tidak rutin. Salah satunya adalah program beasiswa dengan topik perikanan dan kelautan di Ambon yang diberikan kepada Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Selain itu, terdapat program beasiswa untuk program master pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Pembangunan Indonesia (UPI) dengan peserta berasal dari negara Afghanistan. Total penerima beasiswa yang tercatat dari seluruh program adalah sebanyak 567 peserta.⁹⁸

Sebagai upaya mendukung pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan untuk menjalankan tata kelola yang baik, program peningkatan pengelolaan perbatasan dan polisi air dijalankan. Indonesia secara intensif melakukan berbagai macam pendekatan dalam usaha tersebut. Pelaksanaan program "*International Workshop on Tourism for Border Communities 2015*" yang diadakan di Jayapura, Papua menjadi wujud nyata upaya menjaga kedaulatan wilayah dengan cara meningkatkan sistem pengelolaan perbatasan melalui pemberian pelatihan. Sebanyak 8 (delapan) peserta yang berasal dari Papua Nugini turut serta dalam pelatihan yang diadakan bersama dengan Kantor Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia.

Pelatihan juga dilakukan dalam program "*International Training on Automotive for Border Community 2016*" di Jayapura, Papua. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri. Setidaknya, tercatat 10 peserta dari Papua Nugini turut serta dalam pelatihan yang diadakan pada 2016. Pemberian bantuan teknik dalam bentuk pelatihan bagi polisi air dilakukan Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bersama Timor Leste. Sepanjang 2011, tercatat setidaknya 11 perwira polisi Timor Leste turut serta dalam pelatihan yang diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan juga untuk bersama meningkatkan profesionalitas dan kemampuan teknik dari personil kepolisian air dalam usaha menjaga kedaulatan wilayah dari Indonesia dan Timor Leste.

⁹⁸ Data didapatkan dari data Kemendikbud



Gambar 32. Pelatihan bagi pemuda Papua Nugini ini terselenggara melalui Pusat Pelatihan Kerja Provinsi Papua dalam rangka solidaritas dan pengokohan hubungan antarnegara

Sumber: Tim Kornas KSS dan mitra pembangunan

Dari beberapa program unggulan di atas, Indonesia juga menginisiasi beragam program dalam merespon isu-isu global kontemporer, misalnya isu keamanan pangan dan isu perlindungan perempuan dan anak. BPOM dan KPPPA menjadi institusi baru yang memulai keterlibatannya dalam program KSS pasca terbentuknya Tim Kornas KSS Indonesia. BPOM menjadi salah satu institusi pelaksana dalam merealisasikan program terkait keamanan pangan. Keberadaan BPOM, menurut Bappenas, merupakan salah satu *centre of excellence* Indonesia dalam bidang KSS. Dalam program “Perkuatan Kapasitas Inspektur Pangan di Bawah Kerangka KSS” antara BPOM RI dengan Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan Hidup RDTL disepakati adanya usaha mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama dalam pertukaran informasi mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan yang berlaku di Indonesia maupun RDTL. Kerja sama ini diselenggarakan dalam dua bentuk kegiatan: (1) *Training for Food Inspectors* (Perkuatan Kapasitas Inspektur Pangan), dan (2) *Knowledge Sharing on Drug and Food*

Control.⁹⁹ Program “Perkuatan Kapasitas Inspektur Pangan di bawah Kerangka KSS” diadakan pada 23–28 Juli 2018 di Bali, Indonesia. Peserta program berasal dari RDTL. Dari program ini peserta mendapatkan pengetahuan baru terkait sistem pengawasan pangan dan cara melakukan inspeksi ke sarana produksi dan distribusi pangan sesuai dengan cara pengolahan pangan yang baik.¹⁰⁰

Sementara itu, terkait isu perlindungan perempuan dan anak, KPPPA menjadi salah satu *focal point* penyelenggara program tersebut sejak 2010.¹⁰¹ Program-program dijalankan baik secara bilateral maupun bersama mitra pembangunan. KPPPA juga melibatkan sejumlah LSM dan media dalam berbagai inisiasi program baik yang diimplementasikan di level daerah atau nasional. Beberapa LSM dan media yang terlibat seperti PATTIRO, FITRA dan Kompas (media) menjadi wujud pelibatan *multi-stakeholders* dalam implementasi program yang dijalankan KPPPA.¹⁰²

Isu pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan, pengarusutamaan gender, perempuan dan IT, dan kota layak anak, serta kepemimpinan menjadi cakupan isu dalam berbagai program yang dijalankan KPPPA. Dari isu-isu tersebut, beberapa program yang dijalankan KPPPA di antaranya adalah program “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengambil Keputusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender” yang dijalankan KPPPA di tahun 2010 dengan peserta berasal dari Palestina. Kemudian bersama Colombo Plan, isu kota layak anak dengan realisasi program Sekolah Ramah Anak dan Pusat Layanan Autis diadakan KPPPA pada tahun 2018 di kota Surakarta, Jawa Tengah (lihat Boks 11).¹⁰³

Dari paparan atas capaian Indonesia diatas, ada dua hal utama yang perlu menjadi catatan. Pertama, perlu upaya khusus untuk memastikan bahwa capaian–capaian tersebut dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat di negara penerima manfaat. Kegiatan pascaprogram seperti evaluasi dan monitoring menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program yang dijalankan. Kedua, aspek keberlanjutan harus menjadi pertimbangan atas pelaksanaan sebuah program, untuk memastikan keberhasilan sebuah program yang tentu tetap harus diselaraskan dengan

⁹⁹ BPOM, Laporan Pelaksanaan Perkuatan Kapasaitas Inspektur Pangan di Bawah Rangka Kerja Sama Selatan–Selatan (KSS) Badan POM RI dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Bali 23–27 Juli 2018.

¹⁰⁰ *Ibid*,

¹⁰¹ Data didapatkan dari data KPPA

¹⁰² Wawancara dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 29 Oktober 2018 di Jakarta.

¹⁰³ Data didapatkan dari KPPA

kebutuhan negara penerima manfaat. Terkait dengan catatan tersebut, bab selanjutnya akan menfokuskan pembahasan pada berbagai tantangan yang dihadapi KSS Indonesia baik di

SDN Mangkubumen Lor No. 15 Surakarta mendapatkan apresiasi sebagai Sekolah Ramah Anak Terbaik 2017 Sekolah Ramah Anak memiliki beberapa indikator yaitu (1) Inklusif secara proaktif, (2) Sehat, Aman dan Protektif, (3) Partisipasi Masyarakat, (4) Efektif dan Berpusat pada Anak, (5) Kestetaraan Gender, (6) Sistem Sekolah Ramah Anak.

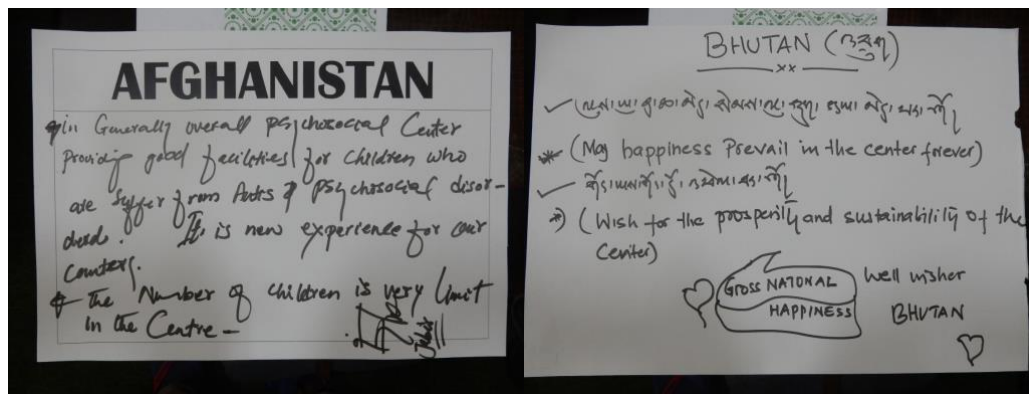
Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.



tingkat domestik maupun global.

Boks 11. Sekolah Ramah Anak SDN Mangkubumen Lor No.15 Surakarta
Sumber: Hasil Observasi Lapangan tanggal 23 Oktober 2018 di Surakarta

PLA menjadi pilar penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Surakarta. Bagi PLA Surakarta, Kunjungan 25 perwakilan negara *Colombo Plan* menjadi pengalaman pertama bagi Pusat Layanan Autis Surakarta dan keberadaan PLA merupakan hal yang baru bagi negara-negara *Colombo Plan*. PLA ini berbeda dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). PLA lebih seperti bengkel di mana penanganan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditentukan dari kecenderungan permasalahan dari setiap anak. PLA Surakarta ini mengembangkan konsep yang disebut dengan *Trans-Education* (Pendidikan Transisi) untuk mempersiapkan ABK memasuki sekolah reguler atau sekolah inklusi.



Boks 12. Pusat Layanan Autis (PLA) Surakarta

Sumber: Hasil Observasi Lapangan tanggal 23 Oktober 2018 di Surakarta

BAB 5

TANTANGAN DOMESTIK DAN GLOBAL BAGI KSS INDONESIA

Kontribusi KSS Indonesia dalam mendukung pembangunan di negara-negara Selatan secara nyata telah mendapat pengakuan internasional. Capaian di berbagai bidang juga telah dipaparkan. Namun demikian, disadari bahwa dalam perkembangannya program KSS Indonesia menghadapi tantangan baik dari domestik maupun global. Hal ini tidak lepas dari dinamika domestik, baik di level pemerintahan maupun masyarakat, dan perubahan konstelasi dunia dan munculnya berbagai isu global. Bab ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan tersebut dengan memulai pembahasan pada tantangan internal dengan menyoroti isu kelembagaan dan pengelolaan. Bagian berikutnya akan membahas tantangan global dengan mengangkat isu semangat kerja sama dalam dunia yang berubah dan peran KSS Indonesia dalam merespon agenda pembangunan global.

5.1. Menuju Pengelolaan KSS Indonesia yang Lebih Baik

Komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan peran di tataran global secara umum dan dalam KSS secara khusus telah diakui oleh dunia Internasional. Peran ini terus menerus akan dijalankan baik untuk menjawab tantangan domestik maupun global. Dalam perjalanannya terdapat beberapa tantangan domestik yang harus segera diatasi. Pertama, permasalahan kesinambungan dan konsistensi program KSS Indonesia dalam perubahan politik kepemimpinan nasional. Kedua, tantangan penumbuhan rasa kepemilikan dan sinkronisasi program dari masing-masing K/L pelaksana, mengingat masing-masing lembaga telah mempunyai pengalaman panjang dan hubungan bilateral antar negara secara langsung dari masing-masing sektor. Selain itu, koordinasi dan optimalisasi peran mitra pembangunan dalam pelaksanaan program dan *transfer knowledge* bagi Indonesia dan negara penerima manfaat memerlukan sebuah standar prosedur pelaksanaan program KSS yang baik.

Ketiga, masalah sumber dan pengelolaan pendanaan juga masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi penguatan KSS Indonesia. Selama ini, pengelolaan pendanaan masih tersebar di masing-masing K/L. Penguatan anggaran dan perbaikan sistem perencanaan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Yang keempat terkait dengan permasalahan mengukur dampak dan mengevaluasi program yang dijalankan. Monitoring dan evaluasi

menjadi komponen penting sebagai dasar untuk merancang program KSS ke depan. Selain itu, aspek *sustainability* harus menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan dampak program yang dijalankan.

Dalam upaya memaksimalkan capaian KSS ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan lima strategi yaitu: (i) intervensi kebijakan pengembangan KSS; (ii) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSS; (iii) pengembangan dan pementapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSS; (iv) promosi KSS di tingkat nasional dan internasional; dan (v) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang terlibat KSS. Dari kelima strategi tersebut, hal yang selama ini belum cukup mendapatkan perhatian pemerintah adalah pelibatan swasta dan masyarakat seperti tercantum dalam strategi kelima. Diyakini bahwa pelibatan aktor swasta dan OMS akan menjadi salah satu strategi jangka panjang dalam implementasi KSS yang berbasis pada prinsip berbagi dan upaya memaksimalkan manfaat KSS sampai ke tingkat lokal bagi negara yang terlibat. Bahkan, pelibatan aktor swasta diyakini akan dapat meningkatkan efektivitas program KSS.¹⁰⁴

Dari konteks global, tantangan utama bagi KSS Indonesia adalah terkait perlunya menyesuaikan program KSS Indonesia dengan isu-isu yang berkembang. Selama ini, program KSS Indonesia masih sangat terfokus pada program unggulan. Indonesia perlu memetakan program-program ke depan yang adaptif dengan dinamika global. Kegiatan KSS sebaiknya berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran (*demand and supply*) serta prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) antara Indonesia dan negara yang terlibat. Tantangan lainnya adalah promosi KSS di tingkat global maupun domestik. Indonesia harus lebih aktif untuk mempromosikan pencapaian-pencapaian di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya sehingga dapat menjadi contoh dan tempat berbagi pengalaman bagi negara berkembang lainnya.

Untuk menjawab tantangan domestik dan global yang sangat dinamis, maka tata kelola KSS harus menyesuaikan dengan hal tersebut melalui perbaikan kerangka hukum, penguatan kelembagaan, perbaikan komitmen dari para pemangku kepentingan dan proses bisnis yang makin baik. Wacana pembentukan *single agency* diharapkan bisa berperan dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

¹⁰⁴ Sukma, Rizal. 2015. "KSST: Sebuah Paradigma Baru dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional" (Wawancara dalam National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation (NCT-SSTC), 2015, *Annual Report of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation* (SSTC) 2015, (Jakarta: NCT-SSTC).

“Single agency is the answer because the issue of providing assistance must be handled in a specific and holistic manner. Moreover, the issue of assistance is certainly based on foreign policy with economic factors and socio cultural relations also playing a strong role. It is difficult for one ministry to impose its authority on foreign assistance, because this issue is cross cutting and multi-sectoral. There needs to be a separate institution that becomes a conductor as well as an implementer so that all relevant ministries/agencies

Boks 13. Wawancara dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi

Sumber: *Annual Report Indonesia’s SSC*, 2017, hlm.8

5.2. Memelihara Semangat Kerja Sama dalam Dunia yang Berubah

“Saya ingin menegaskan bahwa (dalam) pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan

Boks 14. Pidato Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR 20 Oktober 2014.

Konstelasi politik dunia yang berubah saat ini ditandai dengan menguatnya ekonomi dan eksistensi negara-negara Selatan yang menghadirkan peluang bagi negara-negara Selatan untuk memainkan peran lebih dalam politik global. Kondisi ini dapat terlihat dari fenomena kemunculan kerja sama yang diinisiasi oleh kekuatan negara-negara Selatan, di antaranya BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) dan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia).¹⁰⁵ Pada saat yang bersamaan, kondisi ini menyurutkan semangat multilateralisme yang telah dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal ini juga dipengaruhi oleh berkembangnya *me-first policy*.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Stunkel, Oliver dalam ulasan G. John Ikenberry, *Post Western World: How Emerging Powers are Remaking Global Order* (oleh Oliver Stuenkel), diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2017-02-13/post-western-world-how-emerging-powers-are-remaking-global-order> pada tanggal 5 Februari 2019.

¹⁰⁶ Poin-poin ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2019. Data diakses dari

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menjaga semangat solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Selatan untuk menciptakan dunia damai, adil dan makmur. Hal ini sudah menjadi semangat bangsa Indonesia sejak perjalanannya menuju negara yang merdeka. Secara historis, inisiasi Indonesia sejak Konferensi Colombo (1954), Konferensi Asia Afrika (1955) dan Gerakan Non-Blok (1961), hingga kini menjadi catatan penting partisipasi Indonesia dalam membangun semangat solidaritas dan kerja sama. Tidak hanya dalam konteks kerja sama yang dibangun antara negara berkembang, Indonesia pun tidak menutup diri untuk merajut jalinan dengan negara-negara Utara melalui beragam kerja sama baik di level bilateral maupun multilateral.

Belajar dari sejarah tersebut, peran aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional maupun regional menjadi strategi untuk menyuarakan pentingnya penguatan KSS sebagai salah satu bentuk kerja sama pembangunan yang tidak hanya bermanfaat bagi negara-negara berkembang namun juga bagi masyarakat dunia internasional. Beberapa hal lain yang dapat dilakukan yaitu, pertama, mendesain program-program KSS sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara Selatan dalam menghadapi tantangan dan isu-isu baru; kedua, meningkatkan *people to people contact*, melalui berbagai kegiatan atau platform; dan ketiga, mengembangkan dan memperkuat jejaring (*network*) dalam kerangka KSS.

5.3. Perwujudan Kesejahteraan: Menegaskan Peran Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

“As part of the international community, Indonesia has constantly pursued various types of international development cooperation, including South-South Cooperation (SSC). Indonesia, along with the other developing countries and other partners, has been working to help realize the international development agenda.”

Boks 15. Wawancara dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi

Sumber *Annual Report SSC*, 2017: hlm. 5.

<https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/arsip/pidato/Pages/Pernyataan%20Pers%20Tahunan%20Menteri%20Luar%20Negeri%20Republik%20Indonesia%20Retno%20L.%20P.%20Marsudi%20tahun%202019.pdf> pada tanggal 10 Januari 2019.

Pembangunan berkelanjutan menjadi platform pembangunan internasional yang telah mulai diinisiasi pada pertemuan *World's Summit on Sustainable Development*, Johannesburg tahun 2002. Pembangunan berkelanjutan ini kemudian dirumuskan dalam MDGs pada tahun 2002, dan secara jelas dibahasakan dalam agenda pembangunan pasca-2015 dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan rencana aksi dari "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" yang dideklarasikan pada 25 September 2015 dalam Sidang PBB di New York. Agenda SDGs terdiri atas 17 goals, 169 target, dan 24 indikator. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan negara. SDGs yang mencantumkan secara komprehensif aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tujuan pembangunan berkelanjutan menunjukkan representasi kepentingan dan tantangan baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

Dalam konteks hubungan kerja sama internasional, serupa dengan MDGs (Tujuan 8), SDGs, juga menjadi platform tentang pentingnya kemitraan (Tujuan 17) baik antara negara maju dan berkembang maupun antarnegara berkembang dan pendekatan multi pihak (*multi stakeholder approach*). Kedua hal ini diyakini menjadi salah satu kunci penegakan prinsip-prinsip dan capaian agenda pembangunan berkelanjutan.

- a. ***Universal***. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan oleh dunia baik negara maju maupun negara berkembang, terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang
- b. ***Integration***. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
- c. ***Leave no one behind***. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan, serta melibatkannya melibatkan semua

Boks 16. Tiga prinsip utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hadirnya SDGs sebagai agenda pembangunan 2030 memberikan tantangan baru bagi KSS, termasuk KSS Indonesia untuk menerjemahkan prinsip-prinsip SSC dalam paradigma baru. Secara spesifik, tantangan utama bagi pemerintah Indonesia adalah mendefinisikan peran seperti apa yang akan dilakukan dalam kerangka KSS. Beragamnya program KSS Indonesia yang tersebar di berbagai kawasan menjadi modalitas, namun memerlukan kerangka dan arahan yang jelas dalam upaya menyelaraskan dengan agenda SDGs. Beberapa upaya telah

dilakukan Pemerintah Indonesia, misalnya melalui perumusan RPJMN/P yang mengaitkan dengan tujuan dalam SDGs. Dalam hal ini, sasaran yang ingin dicapai adalah penyelarasan prioritas nasional dengan kebutuhan negara berkembang lainnya, begitupun sebaliknya.

Prinsip universal, integrasi, dan *leave no one behind* dalam SDGs harus mampu diimplementasikan melalui KSS Indonesia. Namun, harus diakui hal tersebut memerlukan dukungan dan partisipasi luas berbagai aktor (sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi). Misalnya, pemanfaatan dana-dana sektor swasta untuk menjalankan program pembangunan, merupakan salah satu bagian skema pembiayaan kerja sama internasional yang sudah diformulasikan oleh KSS Indonesia namun belum dioptimalkan pemanfaatannya. Skema ini menjadi alternatif di tengah keterbatasan anggaran negara dan sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi sektor swasta di negara-negara yang melakukan kerja sama. Investasi sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara jelas juga disebutkan dalam Agenda 2030.

Selain itu, sejalan dengan prinsip SDGs *leave no one behind*, pelibatan kelompok/organisasi masyarakat sipil (OMS) juga dibutuhkan untuk membantu kerja pemerintah dalam memaksimalkan program KSS Indonesia. Dengan semangat *voluntarism*, OMS memiliki keunggulan dalam melakukan pendekatan ke masyarakat dan jejaring yang kuat di berbagai level, sehingga pelibatan OMS diharapkan akan dapat membantu implementasi program KSS di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

BAB 6

MASA DEPAN KSS INDONESIA

6.1. Refleksi KSS Indonesia: Sebuah Pembelajaran

*“ We must build a new global economic order,
that is open to new emerging economic powers”*

Joko Widodo dalam Pertemuan Forum Asia Afrika
“Strengthening SSC to Promote World Peace and Prosperity”

KSS telah menjadi warna dalam sejarah perjalanan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di bidang hubungan internasional. Semangat untuk membangun dunia baru bersama yang adil dan terbuka menjadi salah satu tujuan KSS yang terus digaungkan. Implementasi KSS Indonesia telah berupaya mencapai tujuan tersebut dengan melakukan berbagai transformasi sebagai langkah adaptif dalam dunia yang dinamis. Transformasi yang signifikan dari perjalanan KSS Indonesia dalam menjawab tantangan global dan domestik tentunya dapat menjadi pembelajaran bersama baik bagi Indonesia dan negara anggota KSS lainnya, maupun dunia internasional.

Pesan penting dari keterlibatan Indonesia dalam KSS ini adalah keseriusan dan komitmen Indonesia dalam berbagi pengalaman pembangunan sesuai modalitas yang dimiliki dengan negara-negara Selatan. Keseriusan dan komitmen Indonesia ditunjukkan melalui transformasi KSS Indonesia yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan perluasan program serta penguatan kelembagaan. Berikut ini beberapa tonggak penting transformasi KSS Indonesia dari tahun 1980an sampai sekarang.

Dekade 1980-1990

Di masa ini, KSS Indonesia memasuki periode baru. Indonesia tidak hanya menjadi penerima dari bantuan teknik dari dunia internasional, tetapi juga sudah secara perlahan memberikan

bantuan teknik kepada negara-negara sahabat. Kondisi ini didorong oleh situasi perekonomian Indonesia yang juga terus membaik pada periode ini.

1990–2000

Pembentukan NAM CSSTC merupakan jejak sejarah Indonesia di masa ini yang merupakan tindak lanjut dari keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Gerakan Non Blok tahun 1992 sebagai Ketua. Pembentukan NAM CSSTC ini adalah penegasan komitmen Indonesia terhadap KSS yang fokus melaksanakan program KSS untuk memperkuat negara-negara Selatan.

2000–2010

Munculnya skema triangular merupakan momentum penting di masa ini. Disepakatinya *Jakarta Commitment* pada 2009 antara pemerintah Indonesia dengan 26 mitra pembangunan, menunjukkan pengembangan KSS yang konkret melalui skema triangular dan bersamaan pula mulai mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan. Dari hal ini terlihat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya dijalankan secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara Selatan, tetapi juga melibatkan mitra pembangunan dalam menciptakan tatanan kemakmuran global bersama. Untuk lebih memformalkan komitmen-komitmen tersebut, Indonesia kemudian memasukkan konsep KSST sebagai bagian dari dokumen perencanaan nasional sehingga mempunyai kerangka hukum yang kuat sebagai dasar kebijakan.

2010–sekarang

Catatan penting yang terjadi di dekade ini adalah penguatan kelembagaan KSS Indonesia yang diawali dengan dimasukkannya KSS dalam RPJP 2010–2025 dan terus direspon hingga terbentuknya Tim Kornas KSS Indonesia. Pada era ini program KSS Indonesia semakin beragam, baik dari sisi bentuk program maupun aktor yang terlibat. Program unggulan Indonesia juga ditetapkan pada periode ini sehingga semakin jelas kontribusi Indonesia dalam penguatan KSS secara global.

Namun penting mencatat bahwa transformasi KSS Indonesia tidak lepas dari pergeseran pada konteks KSS secara global.¹⁰⁷ Pertama, implementasi KSS terkesan bergeser dari upaya kolektif (*collective endeavour*) ke aktivitas negara masing-masing (*individual activity*). Hal ini tidak lepas dari pergeseran kedua, yaitu KSS menjadi salah satu ajang pencapaian kepentingan nasional negara-negara yang terlibat (dari solidaritas Selatan ke penyelarasan kepentingan nasional masing-masing negara). Fenomena yang tak kalah menariknya yaitu fokus KSS yang awalnya mengutamakan skema global kemudian lebih mengarah pada kerja sama regional dan bilateral. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa secara umum semakin marak kerja sama regional yang disepakati. Pergeseran lain yang tak kalah penting adalah KSS yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pengaruh (*leverage*) terhadap negara-negara Utara, saat ini lebih berfokus pada peningkatan kerja sama antara negara-negara Selatan.

Berkaca dari tonggak sejarah transformasi KSS Indonesia dan pergeseran KSS secara global, berikut beberapa catatan utama yang dapat menjadi pembelajaran atas perkembangan KSS Indonesia:

1. Konsistensi Indonesia untuk menjaga semangat solidaritas di antara negara-negara Selatan diharapkan menjadi pengikat jangka panjang kerja sama KSS dengan sesama negara Selatan, negara maju, maupun dengan mitra pembangunan.
2. Adaptasi isu-isu global seperti SDGs dan konsep triangular dalam hubungan kerja sama internasional menjadikan KSS Indonesia dapat dengan cepat tetap merespon permintaan dari negara-negara berkembang lainnya dan tetap berperan dalam pemberian program-program KSS terutama sejak tahun 2010.
3. Formulasi arah dan kebijakan KSS dalam dokumen perencanaan nasional Indonesia baik dalam jangka panjang dan jangka menengah memberikan jaminan kesinambungan program KSS walaupun terjadi perubahan kepemimpinan nasional. Selain itu, dokumen perencanaan nasional ini menjadi rujukan rencana dan strategi semua kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan KSS.
4. Penguatan kelembagaan menjadi modalitas Indonesia untuk berada di garda terdepan dalam implementasi berbagai program KSS yang lebih terkoordinasi, solid dan memberikan dampak yang luas dengan tetap berpijak pada prinsip berbagi

¹⁰⁷ Wawancara dengan Duta Besar Soemadi Brotodiningrat, 11 Desember 2018, Jakarta

(*sharing*) dan mengarah pada penyelerasan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki (*matching needs and capacity*).

6.2. Langkah ke Depan

Menyimak sejarah perjalanan KSS Indonesia dan pembelajaran atas implementasi yang telah dilakukan, kedua hal tersebut seyogyanya memberikan pijakan untuk visi KSS Indonesia ke depan. KSS Indonesia yang saat ini ditempatkan sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dalam RPJMN 2014–2019, nampaknya akan terus berjalan. Diplomasi dalam konteks ini tidak berarti memikirkan keuntungan ekonomi semata, namun juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat negara lain tentang capaian Indonesia dalam inovasi dan pembangunan, yang kemudian dibagikan ke negara lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Jadi sesungguhnya sifat sosial (*solidarity*) menjadi ruh yang senantiasa hadir menjadi landasan utama KSS Indonesia¹⁰⁸. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pembukaan UUD RI 1945.

Seiring dengan pergeseran yang muncul, kerangka KSS Indonesia ke depan harus sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional, tanpa harus menafikan prinsip-prinsip KSS yang sudah disepakati seperti *mutual benefit*, *demand driven*, dan *non-interference*. KSS Indonesia ke depan harus mampu diterjemahkan secara konkret dalam perencanaan pembangunan nasional sehingga menjadi agenda bersama. Dalam konteks ini, sosialisasi dan promosi ke masyarakat domestik Indonesia perlu dibuat lebih masif. Pada rentang waktu 2017–2018, sudah ada beberapa program sosialisasi dan promosi yang dilakukan di beberapa universitas (*road show*) yang dilakukan atas dukungan JICA dan USAID. Ke depan kegiatan serupa menjadi penting dilanjutkan namun menyasar tidak hanya universitas, akan tetapi termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Program-program KSS Indonesia yang dijalankan ke depan akan lebih terarah di bawah tata kelola Tim Kornas. Penyusunan *Country Partnership Strategy* yang mulai dilakukan sejak 2016 dengan dukungan dari USAID sebagai upaya menyelaraskan *demand* dengan *supply*, menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menggarap Program KSS secara lebih profesional. Tidak hanya itu, wacana sebagai *emerging donor* yang muncul bersamaan ketika Indonesia dinyatakan sebagai negara *middle income country*, turut mendorong langkah pemerintah

¹⁰⁸ Wawancara dengan Direktorat KPI dan Polugri Bappenas, 8 November 2018, Jakarta

Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam berbagai kerja sama internasional, khususnya kerja sama antar negara berkembang, baik dalam kerangka KSS maupun lainnya.

Bersamaan dengan kesepakatan internasional terhadap pemanfaatan pendekatan *multistakeholder*, KSS Indonesia ke depan seyogyanya akan lebih membuka ruang partisipasi dan dialog yang lebih inklusif dari berbagai aktor pembangunan. Hal ini juga menjadi jawaban atas kritik terhadap program KSS yang terkesan *state centric*. Selain itu, *multistakeholder partnership* menjadi salah satu syarat dalam perluasan partisipasi KSS Indonesia, baik dari sisi jangkauan kawasan, ragam program maupun aktor yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga sekaligus akan menegaskan posisi dan profil Indonesia sebagai *emerging donor*. Namun demikian perluasan program dan aktor harus diiringi perluasan dampak serta keuntungan dari program yang dijalankan. KSS Indonesia ke depan diharapkan dapat mengevaluasi dan mengukur dampak dari program-program yang dijalankan.

Dalam konteks program, KSS Indonesia ke depan dapat lebih meningkatkan peran di bidang manajemen kebencanaan. Pengalaman Indonesia dalam manajemen kebencanaan dan keberadaan TDMRC di Universitas Syiah Kuala Aceh menjadi modalitas dalam berbagi pengalaman (*knowledge sharing*) dengan negara lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan peluang pelibatan universitas dan akademisi secara lebih luas dalam program KSS. Di bidang kesehatan, program pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan menjadi area yang dapat dikembangkan dengan melibatkan kelompok bisnis secara berkelanjutan.

Tak hanya itu fasilitasi perdagangan (contohnya *e-commerce*) dan kerja sama perbankan (*fintech*) menjadi area yang penting dikembangkan sebagai upaya peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digitalisasi saat ini. Potensi kerja sama di bidang-bidang tersebut membuka ruang pelibatan aktor swasta, Organisasi Masyarakat Sipil, dan akademisi.

Pada prinsipnya, potensi KSS, termasuk KSS Indonesia dan mitra pembangunan, diharapkan dapat membantu proses transformasi pembangunan negara berkembang yang bertumpu pada kemandirian negara tersebut (*self-reliance*) dan solusi pembangunan yang berlandaskan pada unsur lokal yang sesuai dengan konteks negara masing-masing.¹⁰⁹

Pada akhirnya, KSS Indonesia di masa depan harus dirancang untuk mampu mengantisipasi dan merespon fenomena global yang hadir. Hal ini tidak hanya berdampak pada upaya

¹⁰⁹ Wawancara dengan Adik Bandoro (Mantan Kepala Biro Kerjasama Bakornas PBP, Sekretaris Negara RI), 11 Desember 2018, Jakarta

pembangunan ekonomi semata, akan tetapi lebih jauh sebagai bagian dari promosi perdamaian global yang merupakan amanat konstitusi Indonesia.